

PROFIL STATISTIK GENDER KOTA DENPASAR TAHUN 2017

PENULIS:

**NI LUH ARJANI
I WAYAN SUWENA**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR
BEKERJASAMA DENGAN
PUSAT STUDI WANITA DAN PERLINDUNGAN ANAK UNIVERSITAS
UDAYANA**

SAMBUTAN

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Denpasar



Om Swastyastu,

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha- Nya penyusunan buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada berbagai bidang pembangunan masih tampak cukup menonjol, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan secara serius dan konsisten adalah penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Sementara ini masih ada dugaan bahwa, salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berperspektif gender. Padahal data terpilah berdasarkan jenis kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat dikatakan

sebagai dasar utama dalam menyusun perencanaan yang responsif gender karena atas dasar inilah kita bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat.

Tersusunnya buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2017, tidak lepas dan adanya komitmen dari pemerintah Kota Denpasar untuk mempublikasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dan secara berkala memperbaharui data tersebut. Tujuan publikasi ini adalah untuk menunjukkan secara lebih nyata tentang kesenjangan dan isu gender yang masih terjadi pada berbagai aspek pembangunan yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program/kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara lebih cermat dan tepat.

Oleh Karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Walikota Denpasar serta semua pihak yang telah memfasilitasi sampai terwujudnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di Kota Denpasar.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Juli 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar

Ir. I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600505 198603 2 025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat	5
1.4 Jenis dan Sumber Data	5
1.5 Analisis Data	6
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR	7
2.1 Sejarah Ringkas Kota Denpasar	7
2.2 Penjelasan Lambang	8
2.3 Visi dan Misi	10
2.3.1 Visi	10
2.3.2 Misi	10
2.4 Letak Geografis	10
BAB III DEMOGRAFI	13
3.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	13
3.2 Kepadatan Penduduk Menurut Wilayah.....	16
3.3 Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk	18
BAB IV PENDIDIKAN	22
4.1 Angka Partisipasi Murni (APM)	22
4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)	24
4.3 Jumlah Siswa	25
4.3.1 Jumlah Siswa TK	26
4.3.2 Jumlah Siswa SD	28
4.3.3 Jumlah Siswa SMP	28
4.3.4 Jumlah Siswa SMA dan SMK	29
4.4 Siswa Melanjutkan Sekolah	30
4.4.1 Siswa Melanjutkan ke SD/MI	31
4.4.2 Siswa Melanjutkan ke SMP	31
4.4.3 Siswa Melanjutkan ke SMA	32
4.5 Jumlah Siswa Putus Sekolah	34
4.5.1 Angka Putus Sekolah Siswa SD	34
4.5.2 Angka Putus Sekolah Siswa SMP	34
4.5.3 Angka Putus Sekolah Siswa SMA	35
4.5.4 Angka Putus Sekolah Siswa SMK	36

4.6	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan	36
4.7	Proporsi Guru	38
4.8	Guru yang Mempunyai Sertifikat Pendidik	40
4.8.1	Guru SD yang Trsertifikasi	41
4.8.2	Guru SMP yang Tsertifikasi	42
4.8.3	Guru SMA dan SMK yang Tsertifikasi	43
BAB V KESEHATAN		45
5.1	Pemberian ASI Eksklusif di Kota Denpasar	46
5.2	Angka Kematian Anak Balita (AKAB)	50
5.3	Kepemilikan Akte Kelahiran	53
5.4	Peserta Keluarga Berencana (KB)	54
5.5	Jumlah Tenaga Kesehatan	56
5.5.1	Dokter Umum	57
5.5.2	Dokter Gigi	58
5.5.3	Dokter Spesialis	59
BAB VI EKONOMI		62
6.1	Kegiatan Utama Penduduk	63
6.2	Juru Parkir	64
6.3	Petugas Kebersihan	67
6.4	Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata	68
6.5	Tenaga Kerja Restoran/RM	71
BAB VII SEKTOR PUBLIK		74
7.1	Legislatif	76
7.1	Keanggotaan DPRD	76
7.2	Pengurus Partai Politik	77
7.3	Anggota Panitia Pemilihan	80
7.4	Anggota Panitia Pemungutan Suara	81
7.5	Anggota KPU	82
7.6.	Eksekutif.	83
7.6.1	Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan	84
7.7	Pejabat Berdasarkan Eselon	85
7.8	Yudikatif	78
7.8.1	Jaksa	88
7.8.2	Hakim	89
7.8.3	Notaris	90

7.8.4 Advokat	91
7.8.5 Polisi	92
BAB VIII LAIN-LAIN	96
8.1 Korban dan Pelaku Kekerasan.....	96
8.2 Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)	100
8.3 Penduduk Lanjut Usia (Lansia)	103
8.4 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	106
8.5 Panti Asuhan Penampungan Anak	108
BAB IX PENUTUP	111
9.1 Simpulan.....	111
9.2 Rekomendasi.....	112
Daftar Pustaka	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan & Banjar/Lingkungan per Kecamatan Dirinci menurut Dinas dan Adat Tahun 2016	11
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Denpasar Tahun 2016	15
Tabel 3.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016	17
Tabel 3.3	Jumlah Rumah Tangga, Rata-rata Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar, 2016	19
Tabel 4.1	APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar tahun 2014/2015 dan 2015/2016	23
Tabel 4.2	APK menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar tahun 2015/2016.....	24
Tabel 4.3	Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, 2014/2015 dan 2015/2016	26
Tabel 4.4	Jumlah Siswa PAUD menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016	27
Tabel 4.5	Jumlah Siswa SD menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016	28
Tabel 4.6	Jumlah Siswa SMP menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016	29
Tabel 4.7	Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016.....	29
Tabel 4.8	Jumlah Siswa TK melanjutkan ke SD/MI menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016	31
Tabel 4.9	Jumlah Siswa SD melanjutkan ke SMP/MTs menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016	32
Tabel 4.10	Jumlah Siswa SMP melanjutkan ke SMA/SMK/MA menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016	33
Tabel 4.11	Jumlah Siswa SD/Mi yang Putus Sekolah menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016	34
Tabel 4.12	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Putus Sekolah menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016	35
Tabel 4.13	Jumlah Siswa SMA/MA yang Putus Sekolah, tahun 2016	35
Tabel 4.14	Jumlah Siswa SMK yang Putus Sekolah menurut Kecamatan di	

	Denpasar Tahun 2016	36
Tabel 4.15	Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2015/2016	37
Tabel 4.16	Jumlah Guru SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Denpasar berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan, 2015/2016	39
Tabel 4.17	Jumlah Guru SD yang sudah tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2015/2016	41
Tabel: 4.18	Jumlah Guru SMP yang sudah Sertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar	42
Tabel 4.19	Jumlah Guru SMA dan SMK yang sudah tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar	43
Tabel 5.1	Pemberian ASI Eksklusif di Kota Denpasar Tahun 2016	47
Tabel 5.2	Jumlah Angka Kematian Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014, 2015, 2016	51
Tabel 5.3	Jumlah Anak yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2016	53
Tabel 5.4	Jumlah Peserta KB di Kota Denpasar Tahun 2016	55
Tabel 5.5	Jumlah Dokter Umum (IDI) yang ada di Kota Denpasar Tahun 2015 dan 2016	58
Tabel: 5.6	Jumlah Dokter Gigi (IDI) yang ada di Kota Denpasar Tahun 2016	59
Tabel 5.7	Jumlah Dokter Spesialis yang ada di Kota Denpasar Tahun 2016	60
Tabel 6.1	Jumlah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pelataran menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 dan 2016	66
Tabel 6.2	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pertamanan di Kota Denpasar tahun 2015 dan 2016	68
Tabel 6.3	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata di Kota Denpasar tahun 2015.....	69
Tabel 7.2	Jumlah Pengurus Partai Politik (Parpol) menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016	78
Tabel: 7.3	Jumlah Anggota pemilihan kecamatan (PPK) menurut jenis kelamin di Denpasar tahun 2016	81
Tabel: 7.4	Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, tahun 2016	82
Tabel: 7.5	Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2016	84
Tabel: 7.6	Jumlah Pejabat berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016	86

Tabel: 7.7	Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar 2015 dan 2016....	93
Tabel: 8.1	Bentuk-Bentuk Kekerasan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2016	97
Tabel: 8.2	Ciri – Ciri dan Pelaku Korban Kekerasan menurut Umur di Kota Denpasar. 2016	99
Tabel: 8.3	Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin Yang Telah Dibina di Kota Denpasar, Tahun 2015 dan 2016	102
Tabel: 8.4	Penduduk Lansia di Kota Denpasar menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, Tahun 2016	105
Tabel: 8.5	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang terlayani di Kota Denpasar menurut umur dan Jenis Kelamin, 2016	107
Tabel: 8.6	Panti Asuhan dan Jumlah Anak yang diTampung menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2016	109

Daftar Gambar dan Grafik

Gambar: 2.1	Peta Kota Denpasar	11
Gambar: 2.2	Persentase Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2012....	12
Gambar: 3.1	Persentase penduduk Kota Denpasar Berdasarkan jenis kelamin Tahun 2012	16
Gambar: 4.1	Persentase Angka Partisipasi Murni SD-SMA dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2015/2016	23
Gambar: 4.2	Persentase Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016	25
Gambar: 4.3	Persentase Siswa SD- SMA/SMK Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar tahun 2016	30
Gambar: 4.4	Persentase Siswa melanjutkan menurut Jenis Kelamin dan Jenjang pendidikan Tahun 2016.....	33
Gerafik: 4.5	Persentase Guru SD, SMP, dan SMA Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2016	40
Gerafik: 4.6	Persentase Guru SD, SMP, SMA dan SMK yang Telah Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin, 2015/2016	44
Gambar: 5.1	Cakupan ASI Eksklusif Di Kota Denpasar Tahun 2015 dan 2016	49
Gambar: 6.1	Persentase Tenaga kerja Laki-laki dan Perempuan yang Terserap di Sektor Pariwisata di Kota Denpasar Th.2015.....	71
Gambar: 6.2	Persentase Tenaga Kerja yang diserap pada Bidang Usaha Restoran dan Rumah makan Menurut Jenis Kelamin, 2015	73
Gambar: 7.1	Proporsi Keanggotaan DPRD menurut Jenis kelamin Periode pemilu 2014-2019.....	76
Gambar: 7.2	Pengurus Partai Politik Di Kota Denpasar Menurut Jenis kelamin Tahun 2016	79
Gambar: 7.3	Jumlah Anggota KPU Kota Denpasar Periode 2013-2018.....	83
Gambar: 7.4	Perbandingan Persentase Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan Perempuan menurut Golongan Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2016.....	85
Gambar: 7.5	Persentase Pejabat berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016.....	87
Gambar: 7.6	Persentase Jaksa berdasarkan jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016.....	88

Gambar: 7.7	Persentase Hakim Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013.....	89
Gambar: 7.8	Persentase Notaris menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016.....	90
Gambar: 7.9	Persentase Advokat menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016....	92
Gambar: 7.10	Persentase Polisi menurut jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2013.....	94
Gambar: 7.11	Persentase Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016.....	95
Gambar: 8.1	Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin Yang Telah Dibina di Kota Denpasar, Tahun 2015 dan 2016.....	103

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJP Nasional 2005-2025) disebutkan bahwa salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran tercapainya Indonesia maju, mandiri, dan adil adalah tercapainya sasaran berupa terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan.

Meskipun secara normatif telah tersirat dan tersurat tujuan hidup adil dan sejahtera, namun sampai saat ini persoalan gender dan pemberdayaan perempuan masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Hal ini secara nyata tampak dari kondisi ketimpangan gender yang masih terjadi pada berbagai indikator pembangunan seperti di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang politik. Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan gender tetap menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan serius. Lebih-lebih saat ini permasalahan gender sudah menjadi isu global dengan dimasukkannya dalam kesepakatan Millenium Dvelopment Gols (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam *Millenium Summit* yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000. MDGs telah menyepakati 8 goals dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015. Salah satu dari delapan goals tersebut yakni goals ke tiga adalah Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya hal ini juga tetap masuk dalam kesepakatan sustainable development goals (SDGs) yang diharapkan terwujud di tahun 2030. Ini berarti bahwa setiap negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut harus mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan pada target yang sudah ditentukan. Ini berarti bahwa permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi tantangan global bagi semua elemen masyarakat baik pemerintah maupun swasta.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan sudah lebih dari tiga dasa warsa. Perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan gender (KPP, 2005;4).

Berbagai strategi dan pendekatan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan gender di Indonesia. Secara resmi penanganan masalah perempuan dan gander dilakukan sejak didirikannya lembaga khusus pemberdayaan perempuan pada tahun 1978 yang saat itu bernama Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (Men.UPW). Melalui lembaga Negara ini pemerintah Indonesia melaksanakan aksi penanggulangan permasalahan Perempuan dan gender yang banyak terjadi di masyarakat.

Kuatnya komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sudah tampak sejak pemerintah meratifikasi konvensi ILO No. III melalui Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957. Payung hukum ini menggariskan pengupahan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam jenis pekerjaan yang sama nilainya. Kemudian pada tahun 1984 Pemerintah RI juga telah meratifikasi *Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Againt Women (CEDAW)* dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menghendaki penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Berbagai kebijakan dan strategi pembangunan juga telah ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat, seperti *Women in Development (WID)*, *Women and Development (WAD)*, *Gender and Dvelopment (GAD)* dan *Gender Mainstreaming (GM)*. Pada tahun 2000 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Melalui instrumen yuridis ini, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas

kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Instruksi Presiden di atas kemudian mendapat respon yang positif dari jajaran pemerintahan di daerah, termasuk di Provinsi Bali khususnya pemerintah Kota Denpasar. Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar dalam mendukung kebijakan pemerintah dan program pemberdayaan perempuan, pada tahun 2001 di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah dibentuk lembaga khusus yang menangani masalah peningkatan peranan perempuan, yaitu Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan (BKPP), yang dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon II. Sementara itu, di kota telah dibentuk pula lembaga serupa setingkat eselon dua. Saat ini, lembaga yang menangani masalah pemberdayaan perempuan di tingkat Provinsi Bali adalah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan untuk di Kota Denpasar urusan pemberdayaan perempuan ditangani oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) yang sejak tahun 2017 ini telah berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB). Dengan adanya lembaga khusus yang menangani persoalan gender dan perempuan, maka akan lebih mudah dan lebih terfokus dalam mengaplikasikan program-program dan strategi pengarusutamaan gender, serta upaya-upaya lain dalam mengatasi persoalan gender dan perempuan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada berbagai bidang pembangunan masih tampak cukup menonjol, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan secara serius dan konsisten adalah penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Sementara ini masih ada dugaan bahwa, salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berperspektif gender. Padahal data terpilah berdasarkan jenis

kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat dikatakan sebagai dasar utama dalam menyusun perencanaan yang responsif gender karena atas dasar inilah kita bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia pada umumnya dan Provinsi Bali serta Kabupaten/kota, sejak tahun 2001 mulai mempublikasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dalam bentuk buku Profil Statistik Gender, dan secara berkala memperbaharui data tersebut. Tujuan publikasi ini adalah untuk menunjukkan secara lebih nyata tentang kesenjangan dan isu gender yang masih terjadi pada berbagai aspek pembangunan yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program/kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara lebih cermat dan tepat.

Selain itu, eksistensi buku yang mempublikasikan data gender secara lengkap menjadi dasar untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknik analisis gender. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan profil statistik gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting terutama dalam membantu para perencana dalam menyusun perencanaan yang responsif gender.

1.2 Tujuan

Seperti telah diuraikan di atas bahwa keberadaan buku statistik gender memegang peranan penting dalam menyusun perencanaan yang responsif gender. Oleh karena itu tujuan penyusunan buku Profil Statistik Gender ini adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya. Penulisan Profil Statistik Gender ini dibuat secara deskriptif, dan sejauh mungkin memperlihatkan isu gender di setiap babnya. Berdasarkan data-data yang ada dalam buku ini, para pembaca khususnya para penentu kebijakan akan dapat menemukannya isu-isu gender yang ada pada masing-masing sektor pembangunan. Atas dasar ini mereka nantinya akan dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan

isu yang ada sehingga pada gilirannya tujuan pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender dapat cepat terwujud. Dengan demikian diharapkan target SDGs bisa tercapai pada tahun 2030..

1.3. Manfaat

Selama ini seringkali penyusunan perencanaan pembangunan tanpa dilandasi data-data yang valid, dan kadangkala tanpa dasar data. Hal ini dilakukan oleh para perencana atau penyusun program karena tidak tersedianya data yang memadai. Kondisi ini pada gilirannya akan menyebabkan program yang dilakukan kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, secara khusus manfaat dari penyusunan buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar ini antara lain adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun program pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender. Hal ini menjadi penting karena akan dapat mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di segala bidang pembangunan sehingga kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dapat cepat terwujud.

1.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan buku statistik gender ini, diperlukan data sekunder maupun primer. Jenis data ada berbagai macam, diantaranya adalah data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang ditampilkan dalam buku ini adalah data kuantitatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang dipublikasikan ini sebagian besar berupa data primer yang diambil dari hasil-hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Suvei Sosial Ekonomi (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-lain. Selain dari BPS, data juga bersumber dari berbagai instansi terkait seperti dari Dinas pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Pariwisata dan lain-lain.

1.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Seperti telah diuraikan di atas bahwa sebagian besar data yang ada dalam buku Profil statistik gender ini adalah menampilkan data kuantitatif/ data angka-angka yang diperoleh dari berbagai sumber. Data ini dianalisis secara mendalam dan selanjutnya akan diberikan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kondisi nyata dimasyarakat. Namun penafsiran ini baru berupa dugaan sementara yang pada gilirannya untuk menguji kebenarannya masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut sehingga apa yang ditafsirkan bisa mendapatkan jawaban yang jelas dan nyata.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR

2.1 Sejarah Ringkas Kota Denpasar

Munculnya suatu wilayah atau daerah tentu tidak bisa lepas dari proses sejarah. Seperti halnya eksistensi Kota Denpasar, jika dilihat telusuri secara historis, Kota Denpasar pada awalnya adalah merupakan pusat kerajaan Badung. Oleh karena itu, Kota Denpasar merupakan perkembangan dari wilayah kerajaan yang saat itu Puri Denpasar menjadi pusat pemerintahannya. Jika ditinjau dari arti katanya, maka secara etimologis kata Denpasar berasal dari dua suku kata yakni kata *den* dan *pasar*. Kata *den* berarti utara dan kata *pasar* berarti pasar atau *peken*. Jadi Denpasar berarti di utara pasar yang sekaligus juga menunjukkan lokasi puri yang saat itu menjadi pusat orientasi penduduk berada di sebelah utara pasar (Salain dalam Wiasti, 2010; 52).

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dan selanjutnya pada tahun 1958 Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Bali sekaligus menjadi ibu kota. Pada awalnya Kota Denpasar dijadikan sebagai kota Administratif dengan fokus orientasi pada urusan administrasi pemerintahan. Selanjutnya dengan dijadikannya sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat II Badung dan sebagai ibu kota Provinsi Bali, maka tidak bisa dipungkiri menjadi pusat orientasi berbagai aspek kehidupan dari berbagai penjuru wilayah pemerintahan sehingga secara pasti mengalami perkembangan yang sangat cepat baik secara fisik, ekonomi, sosial dan budaya maupun kependudukan/demografi.

Selain sebagai pusat pemerintahan, secara otomatis Kota Denpasar juga menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat pariwisata yang pada awalnya secara keseluruhan wilayahnya di bagi menjadi tiga kecamatan yakni: Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Melihat perkembangan kota administratif ini dari berbagai sektor begitu pesat, maka tidak mungkin ditangani oleh pemerintahan sebatas pemerintahan yang berstatus kota administratif. Oleh karena itu, selanjutnya sesuai dengan perkembangan kota serta berbagai pertimbangan antara provinsi Bali dan

Kabupaten Badung sepakat untuk meningkatkan status kota administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Febroari 1992. Berubahnya status kota Denpasar dari kota administratif menjadi Kota Denpasar berarti juga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan kota. Berlandaskan pada visi dan misi yang telah dirumuskan, pemerintah menjalankan program-program pembangunan perkotaan.

2.2 Penjelasan Lambang

Lambang mempunyai arti penting bagi setiap daerah, oleh karena itu setiap daerah mempunyai lambang tersendiri, demikian juga Kota Denpasar. Lambang daerah Kota Denpasar bebentuk segi lima sama sisi dengan warna dasar biru laut dan garis pinggir warna hitam. Motto "PURRADHIPA BHARA BHAVANA" artinya kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. Di dalam segi lima sama sisi tersebut terdpat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang sebagai berikut.

1. Segi lima sama sisi

- Dasar dengan bentuk segi lima sama sisi berarti bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.
- Warna dasar biru laut melambangkan keagungan.
- Garis pinggir berwarna putih melambangkan kesucian/budi luhur, dan warna hitam melambangkan kekuatan.

2. Padmasana Jagatnatha

- Melambangkan alam semesta tempat suci untuk pemujaan Ida Sanghyang Widhi Wasa.
- Jagatnatha dapat pula diartikan sebagai tempat pemerintahan atau penguasa. Jadi Jagatnatha dalam hal ini diartikan sebagai Denpasar merupakan pusat pemerintahan.

- Warna kuning emas pada pura jagatnatha melambangkan tempat suci untuk pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

3. Keris

- Melambangkan jiwa/melintas keperwiraan yang lazim disebut jiwa keperwiraan.
- Keris juga melambangkan bahwa Kota Denpasar sebagai kota perjuangan.
- Warna hitam dalam keris melambangkan ketegasan.

4. Candi Bentar

- Melambangkan kebudayaan yakni Kota Denpasar memiliki kebudayaan yang bersifat khas.
- Candi bentar juga diartikan sebagai pintu gerbangnya Provinsi Bali.

5. Tangga yang berjumlah tiga buah, melambangkan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar aselalu berlandaskan konsep TRI KAYA PARISUDHA.

6. Lingkaran bunga teratai yang jumlahnya 8 (delapan) helai melambangkan asta dala atau asta beratha.

7. Padi Kapas serta rantai (gelang) 2 (dua) buah, melambangkan

- Padi yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah melambangkan tanggal 27.
- Rantai (gelang) berjumlah dua buah melambangkan bulan dua (pebruari).
- Kapas dengan bunga berjumlah 9 (sembilan) buah dan daun dua helai melambangkan tahun 92. Dengan demikian, padi, kapas, serta rantai sebagai pengikat padi kapas melambangkan bahwa Kota Denpasar lahir pada tanggal 27 Pebruari 1992.

2.3 VISI dan MISI

2.3.1 VISI

Dalam upaya mengarahkan pembangunan Kota Denpasar, maka pemerintah merumuskan Visi: **Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan.** Visi ini selanjutnya dijabarkan menjadi 5 (lima) misi.

2.3.2 MISI

Adapun misi pembangunan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Penguatan jatidiri masyarakat kota Denpasar berlandaskan budaya Bali;
2. Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penegakan supremasi hukum (*law inforcement*);
4. Meningkatkan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat (*welfare society*);
5. Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan.

2.4 Letak Geografis

Kota Denpasar merupakan daerah yang wilayahnya tergolong relatif bagus karena tidak banyak terdapat wilayah perbukitan dan tandus. Tanah pertaniannya termasuk lahan subur serta wilayah pesisirnya yang potensial untuk sumber penghidupan penduduknya. Secara geografis, Kota Denpasar berada di bagian selatan Pulau Bali, tepatnya terletak di antara 08 35" 31" – 08 44" 49" Lintang Selatan dan 115 10" 23' – 115o 16" 27" Bujur Timur. Daerahnya berbatasan masing-masing dengan Kabupaten Badung di sebelah utara, di sebelah Timur Kabupaten Gianyar, di sebelah selatan Selat Badung, dan di sebelah barat Kabupaten Badung. Secara administratif wilayah Kota Denpasar memiliki 4 Kecamatan, dan 43 desa/kelurahan serta 35 desa adat. Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 10 desa/kelurahan dan 11 desa adat, Denpasar Timur 11 desa/kelurahan dan 12 desa adat, Denpasar Barat 11 desa/kelurahan dan 2 desa adat, dan Denpasar Utara 11 desa/kelurahan dan

terbagi menjadi 10 desa adat. Secara lengkap cakupan wilayah Kota Denpasar seperti tergambar pada Tabel. 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan & Banjar/Lingkungan per Kecamatan Dirinci menurut Dinas dan Adat Tahun 2016

Kecamatan	Letak Ibu Kota Kecamatan	Desa/Kel.		Banjar	
		Dinas	Adat	Dinas	Adat
Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	11	10	102	99
Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	11	12	87	97
Denpasar Selatan	Kelurahan Seseetan	10	11	105	90
Denpasar Barat	Kelurahan Padangsembian	11	2	112	106
Jumlah		43	35	407	392

Sumber : BPS Kota Denpasar, ,2016

Untuk lebih jelasnya, keseluruhan wilayah Kota Denpasar seperti tampak pada peta berikut ini.

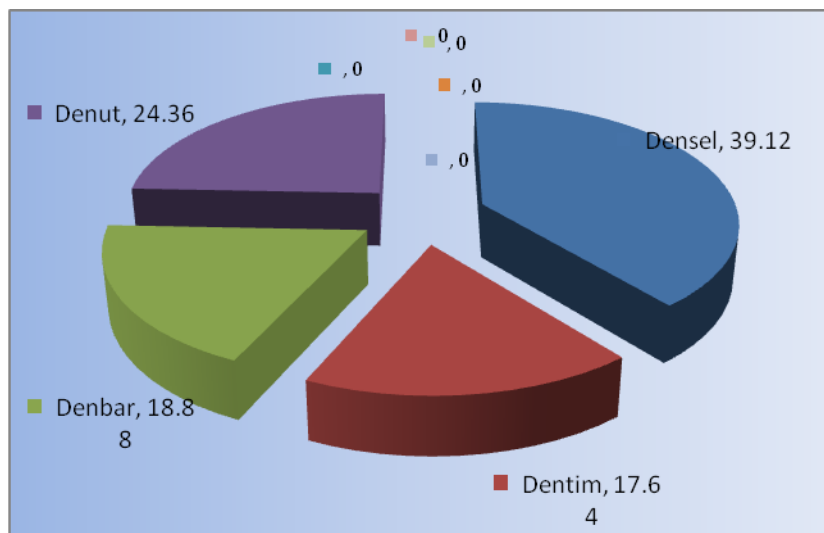
Gambar: 2.1. Peta Kota Denpasar



Secara keseluruhan luas wilayah Kota Denpasar mencapai 127,78 Km² atau 12.778 Ha (2,18 persen dari luas wilayah Provinsi Bali), termasuk

tambahan reklamasi Pantai Serangan seluas 380 Ha. Berdasarkan tata guna tanah, luas tersebut meliputi tanah sawah 2.717 Ha, dan tanah kering 9.999 Ha. Tanah kering terdiri dari tanah pekarangan 7.714 Ha, tanah tegalan 396 Ha, tanah tambak/kolam 9 Ha, tanah sementara tidak diusahakan 81 Ha, tanah hutan 613 Ha, tanah perkebunan 35 Ha, dan tanah lainnya seluas 1.162 Ha. Luas ini terbagi ke dalam 4 kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Selatan seluas 49,99 Km² atau 39,12 persen dari Kota Denpasar, 0,89 persen dari luas Provinsi Bali, Denpasar Timur, seluas 22,54 Km² (17,64 persen dari Kota Denpasar, dan 0,4 persen dari Provinsi Bali), Denpasar Barat, seluas 24,13 Km² (18,88 persen dari Kota Denpasar, dan 0,43 persen dari Provinsi Bali), sedangkan Denpasar Utara seluas 31,12 Km² (24,36 persen) dari Kota Denpasar, dan 0,55 persen dari Provinsi Bali). Di antara empat kecamatan yang ada di wilayah Kota Denpasar, tampaknya Denpasar Selatan mempunyai luas wilayah yang paling besar, yaitu 49,99 Km², dan Denpasar Timur dengan wilayah yang paling sempit (22,54 Km²) kurang dari setengah luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Secara lengkap hal ini tampak pada gambar 2.2 berikut ini.

Gambar: 2.2 Persentase Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2016



BAB III

DEMOGRAFI

Penduduk merupakan sumberdaya manusia sekaligus menjadi sumberdaya pembangunan dari setiap daerah. Penduduk akan menjadi aset pembangunan apabila dapat diberdayakan secara optimal, sebaliknya penduduk akan menjadi beban pembangunan apabila jumlah penduduk yang besar tidak disertai kualitas sumberdaya manusia yang memadai. Tinggi rendahnya kualitas sumberdaya manusia suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator seperti penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio, umur, pendidikan, dan lain-lainnya. Mengenai hal ini akan diuraikan secara rinci sebagai berikut.

3.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio sangat penting disajikan dalam buku ini karena dengan penyajian indikator ini bisa diketahui kondisi penduduk terutama dilihat dari perspektif gender. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan sebagai daerah tujuan wisata, maka tidak bisa dipungkiri kondisi kependudukannya menjadi persoalan yang sulit dipecahkan. Penduduknya sangat heterogen, baik berdasarkan okupasi, suku, ras, agama, dan budayanya. Selain itu, dinamika kependudukan juga menunjukkan tingkatan yang cukup tinggi terutama terkait dengan penambahan penduduk (pendatang). Heterogenitas dan dinamika kependudukan demikian memberi warna terhadap komposisi penduduk di Kota Denpasar. Komposisi penduduk dengan beragam karakteristiknya mendemonstrasikan ketersediaan sumber daya manusia sebagai subjek dan objek pembangunan.

Komposisi penduduk menurut berbagai karakteristik baik variabel demografi itu sendiri maupun variabel pembangunan akan memberikan gambaran tentang ketersediaan sumber daya manusia sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Penduduk Kota Denpasar pada tahun 2016 berjumlah **897,295** jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki **458,277** jiwa, dan penduduk perempuan **439,018** jiwa. Dalam periode lima tahun terakhir Jumlah

penduduk tahun 2016 ini mengalami kenaikan 71.595 jiwa jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya berjumlah 825 700 jiwa. Angka ini juga menggambarkan bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, atau kalau dilihat sex rasionya berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki. Bila dibandingkan dengan *sex ratio* pada tahun 2012 yang hanya sebesar 103, maka dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk laki-laki di Kota Denpasar lebih cepat dibandingkan penduduk perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin seperti tampak pada tabel 3.1 berikut ini

Dari tabel ini tampak bahwa penduduk yang berusia produktif yakni usia 20 – 50 tahun jumlahnya paling banyak. Sementara penduduk yang terkatagori lanjut usia (60 tahun ke atas) jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang tergolong usia anak-anak (0 -18 tahun). Hal yang menarik, jika dilihat dari perspektif gender tampak bahwa pada tingkat penduduk usia lanjut tampak jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Kondisi ini mencerminkan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari angka harapan laki-laki.

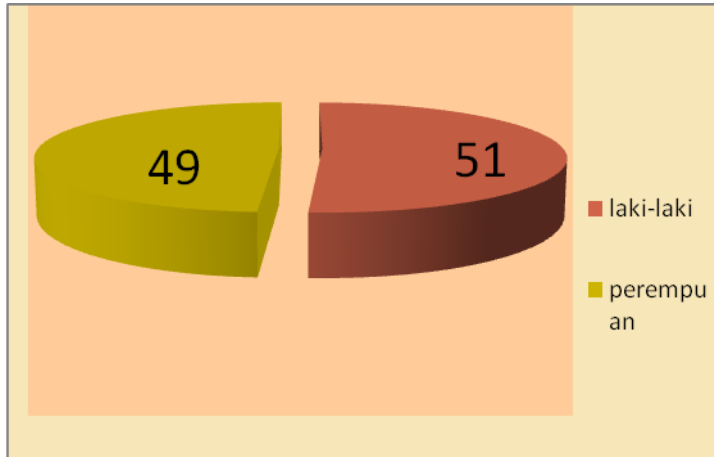
Tabel: 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Denpasar Tahun 2016

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 - 4	38,932	37,481	76,413
5 - 9	37,454	35,212	72,666
10 - 14	34,531	33,193	67,724
15-19	35,130	36,993	72,123
20 - 24	48,276	48,617	96,893
25 - 29	49,260	46,091	95,351
30 - 34	43,582	40,545	84,127
35 - 39	39,518	38,279	77,797
40 - 44	38,953	35,751	74,704
45 - 49	31,530	28,479	60,009
50 - 54	23,040	20,488	43,528
55 - 59	15,823	14,693	30,516
60 - 64	9,787	8,919	18,706
65 -69	6,003	6,131	12,134
70 - 74	3,339	3,693	7,032
75 +	3,119	4,453	7,572
Total	458,277	439,018	897,295

Sumber: BPS,Proyeksi Penduduk 2010 – 2020

Jika dilihat secara persentase, penduduk Kota Denpasar menurut jenis kelamin seperti tampak pada gambar 3.1 berikut ini.

Gambar: 3.1 Persentase penduduk Kota Denpasar Berdasarkan jenis Kelamin Tahun 2016



3.2 Kepadatan Penduduk Menurut Wilayah

Pengelompokan penduduk berdasarkan umur dimaksudkan untuk mengetahui komposisi penduduk usia anak-anak, remaja/usia produktif, dan usia lanjut (lansia). Namun dalam kaitannya dengan data penduduk menurut kelompok umur belum bisa disajikan data terpilah menurut jenis kelamin karena data gender seperti ini belum tersedia. Data yang disajikan hanya data berdasarkan kelompok umur yang ada di setiap kecamatan seperti tampak pada Tabel 3.2.

Struktur umur mencerminkan perubahan yang terjadi pada komponen demografi yaitu, kelahiran, kematian, dan migrasi pada satu kurun waktu tertentu. Pada awal transisi demografi, kelahiran yang tinggi menyebabkan proporsi penduduk usia muda cukup tinggi. Apabila hal ini diikuti dengan angka kematian yang tinggi, maka mereka yang bertahan hidup di usia di atasnya menjadi relatif berkurang. Teori transisi demografi ini melalui empat (4) tahap. Pertama, angka kelahiran dan kematian bergerak pada tingkatan yang tinggi. Artinya, pada satu kurun waktu tertentu angka kelahiran yang tinggi dibarengi dengan angka kematian yang tinggi pula. Kedua, angka kematian mulai memperlihatkan kecenderungan menurun tetapi angka kelahiran masih cukup

tinggi. Ketiga, angka kelahiran dan kematian bergerak menurun pada tingkat yang rendah.

Bila dilihat dari perbandingan *sex ratio* di seluruh kecamatan yang ada di Denpasar nampak bahwa, secara umum seluruh kecamatan di Denpasar memiliki jumlah laki-laki yang lebih banyak dibanding perempuan. Kecamatan Denpasar utara memiliki *sex ratio* tertinggi yaitu 105.02, sedangkan kecamatan Denpasar Timur memiliki *sex ratio* terendah yakni 103,72. Jika dilihat dari komposisi wilayahnya, nampak Denpasar Selatan memiliki wilayah paling luas dibandingkan tiga kecamatan lainnya. Oleh karena itu jumlah penduduk terpadat juga ada di Denpasar Selatan. Penduduk terpadat ke dua ada di kecamatan Denpasar Barat. Dengan luas wilayah yang hanya mencapai 24,06 km menyebabkan Denpasar Barat menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni mencapai 10.798 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan ini jauh di atas tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Denpasar yang hanya sebesar 7.022 jiwa per kilometer persegi (BPS Kota Denpasar, 2016). Untuk lebih jelasnya kondisi ini seperti terpapar pada tabel berikut ini.

Tabel: 3.2: Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016

Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2) *)	Jumlah Penduduk (**)	Kepadatan Penduduk (per Km2)
5171010	Denpasar Selatan	49.99	286,060	5,722
5171020	Denpasar Timur	22.31	153,480	6,879
5171030	Denpasar Barat	24.06	259,790	10,798
5171031	Denpasar Utara	31.42	197,970	6,301
5171	Kota Denpasar	127.78	897,300	7,022

Sumber: *) BPS, Kota Denpasar Dalam Angka 2016
 **) BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016

Struktur umur juga mencerminkan perubahan yang terjadi pada komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, pada satu kurun waktu tertentu. Pada awal masa transisi demografi, kelahiran yang tinggi menyebabkan proporsii penduduk usia muda cukup tinggi. Namun karena angka kematian juga tinggi, maka mereka yang bertahan hidup sampai usia di atasnya menjadi relatif sedikit. Teori transisi demografi ini mengenal 4 tahap : pertama, angka kelahiran dan kematian bergerak pada tingkat yang tinggi; kedua, angka kematian mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, tetapi angka kelahiran masih tinggi; ketiga angka kelahiran dan kematian bergerak, menurut waktu pada tingkat yang rendah. Implikasi dari struktur penduduk seperti ini mengakibatkan beban perempuan menjadi lebih berat. Oleh karena itu, berbagai program/kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penduduk perempuan seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain amat diperlukan sehingga wanita bisa berperan optimal di segala bidang pembangunan. Di samping itu program/kebijakan yang mengarah kepada perlindungan terhadap hari tua seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa juga sangat penting agar kehidupan penduduk usia lanjut bisa lebih terjamin.

Keadaan penduduk Kota Denpasar dewasa ini dapat dikatakan sudah sampai di antara pertengahan dan akhir dari tahap ketiga. Hal ini ditandai dengan rendahnya angka kelahiran maupun kematian, terutama jika dikaitkan dengan kelompok umur yang tergolong anak-anak sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa semua penduduk yang belum berusia 18 tahun adalah dikatagorikan sebagai anak-anak.

3.3. Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk

Berbicara rumah tangga berarti berbicara tentang komunitas terkecil yang ada di masyarakat yang anggotanya dipersatukan oleh kesatuan ekonomi atau dengan kata lain hidup dalam satu dapur. Namun konsep rumah tangga dalam konteks ini cenderung pada artian keluarga batih (suami, istri, dan anak-anak). Seseau dengan status Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali, maka sudah bisa diduga akan menjadi pusat orientasi bagi banyak orang luar untuk mengadu nasib di kota ini. Hal ini pada gilirannya berakibat terhadap tingginya angka migrasi dari daerah lain ke Denpasar. Akhirnya pertambahan

jumlah penduduk Denpasar setiap tahunnya akan semakin meningkat. Tabel 3.3 di bawah menunjukkan jumlah rumah tangga di Denpasar sebanyak 275.766. Jumlah rumah tangga terbanyak berada di Kecamatan Denpasar Selatan yakni 88.966 RT, dan Kecamatan Denpasar Timur memiliki jumlah rumah tangga paling sedikit yakni 44.855.

Tabel: 3.3 Jumlah Rumah Tangga, Rata-rata Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar, 2016

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rata – Rata Penduduk		Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
		Per Rumah Tangga	Per Desa	
Denpasar Selatan	88.966	3	279.650	5.594
Denpasar Timur	44.855	3	151.211	6.777
Denpasar Barat	83.027	3	255.171	10.605
Denpasar Utara	58.918	3	194.611	6.194
Jumlah	186.800	3	220.160	6.892

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2016

Tabel 3.3 juga menjelaskan bahwa desa-desa yang ada di Kota Denpasar dengan jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Selatan (rata-rata 279.650 orang), sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Denpasar Timur (rata-rata 151.211 orang). Sementara itu, rumah tangga yang ada di Kota Denpasar rata-rata memiliki anggota keluarga sebanyak tiga (3) orang. Angka ini menunjukkan bahwa di dalam setiap keluarga terdapat dua orang tua (ibu dan ayah) dengan satu orang anak. Sebuah keluarga yang ideal yang direkomendasikan oleh pemerintah RI melalui program keluarga berencana. Terkait dengan kepadatan penduduk tampak bahwa Kecamatan Denpasar Barat memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, yaitu 10.605 tiap Km², nomor dua setelah Kecamatan Denpasar Barat. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Denpasar Timur, yaitu 6.777 tiap Km², dan terendah terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan yakni 5.594 per Km². Meskipun jumlah penduduk Denpasar Selatan jumlahnya paling tinggi, tetapi tingkat kepadatannya paling rendah karena luas wilayahnya paling luas dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang lainnya.

BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara-cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat, pendidikan merupakan hal yang paling utama, hal itu dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli berikut Jean Jacques Rosseau, seorang tokoh pembaharu Perancis menyebutkan, Semua yang kita butuhkan dan semua kekurangan kita waktu lahir, hanya akan kita penuhi melalui pendidikan, selanjutnya Aristoteles seorang ahli filsafat Yunani kuno berpendapat, bahwa perbaikan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki sistem pendidikan. Tokoh Pendiri nasional yakni Ir. Soekarno dan Ki Hajar Dewantara, juga menyebutkan bahwa satu-satunya yang dapat mengubah nasib suatu bangsa hanyalah Pendidikan. Oleh karena itu pendidikan merupakan sector yang perlu mendapat perhatian yang lebih, mengingat kemajuan pendidikan merupakan barometer kemajuan sebuah Negara.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1) tegas disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya pada Ayat (3) dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu setiap komponen Bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Secara konseptual, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan pendidikan demikian sesuai dengan visi pendidikan nasional itu sendiri, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yakni berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam rangka peningkatan pembangunan pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Denpasar tidak bisa lepas dari peningkatan kualitas penduduknya (sumber daya manusia/SDM). Terlebih lagi di era pembangunan yang berwawasan otonomi daerah saat ini. Pembangunan di sektor pendidikan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas SDMinya, diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat dalam artian diselenggarakan oleh pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat dalam pengendalian mutu layanan pendidikan.

Sebagaimana terdapat dalam salah satu misi pendidikan kota Denpasar, bawasannya Pemerintah Kota Denpasar ingin menciptakan Pemerataan Peningkatan akses Pendidikan. Ini menunjukkan bahwa setiap anak (laki dan perempuan) diharapkan memperoleh akses yang sama dibidang pendidikan. Kondisi seperti ini secara normative dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Analisis kebijakan tersebut tidak menunjukkan adanya diskriminasi gender, namun demikian, dalam kenyataannya masih terlihat adanya ketimpangan gender yang cukup signifikan terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Profil pendidikan penting dikemukakan sebagai sarana strategis untuk mengetahui tingkat

keberhasilan program pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan. Berikut ini adalah analisis gender terhadap beberapa indikator pendidikan di Kota Denpasar.

4.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

Dalam konteks kesetaraan gender, kondisi APM juga penting diungkapkan, apakah ada kesenjangan dalam indikator ini, karena salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sukses tidaknya sebuah upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM).

Memahami angka partisipasi dalam pendidikan adalah sangat penting bagi semua pihak, sebab dengan mengetahui angka partisipasi maka akan diketahui sejauh mana upaya pemerataan dan perluasan akses di bidang pendidikan telah dicapai. Oleh karena itu dengan angka partisipasi akan dapat diketahui mengenai karakter, ketidakmerataan atau kesenjangan dalam memperoleh akses di bidang pendidikan.

Pengertian APM adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu. Seperti diketahui, penduduk usia sekolah dasar adalah anak umur 7 s.d. 12 tahun. Penduduk usia sekolah lanjutan pertama adalah anak umur 13 s.d. 15 tahun. Penduduk usia sekolah lanjutan atas adalah remaja umur 16 s.d. 18 tahun. Dengan demikian, kalau kita ambil contoh jenjang pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar (SD) maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa APM SD merupakan perbandingan antara jumlah siswa SD dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Kondisi APM Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD-SMA pada masing-masing kecamatan dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 ini mengungkapkan bahwa secara umum angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan di Kota Denpasar tampak kurang menggembirakan karena rata-rata APM pada semua jenjang pendidikan belum mencapai angka 100%, tetapi APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs tampak sangat menonjol yakni mencapai 104,82% untuk perempuan, dan terendah juga ada pada jenjang pendidikan ini yaitu sebanyak 55,89% untuk laki-laki. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014/2015 tampak terjadi penurunan persentase hamper disemua jenjang pendidikan, kecuali APM

tingkat SMP/MTs terjadi kenaikan pada APM perempuan yang melebihi angka 100 persen.

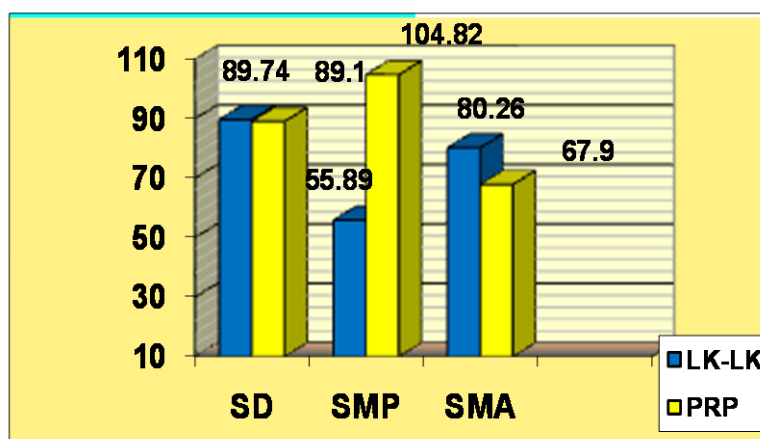
Tabel 4.1 APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar tahun 2014/2015 dan 2015/2016

Tingkatan Sekolah	2014/2015		2015/2016	
	L	P	L	p
SD/MI	92,61	91,89	89,74	89,10
SMP/MTs	78,95	75,48	55,89	104,82
SMA/MA	80,96	68,91	80,26	67,90

Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar, 2016

Sementara itu dari perspektif jenis kelamin rata-rata APM perempuan di Kota Denpasar khususnya pada jenjang pendidikan SMP jauh melebihi APM laki-laki yakni dengan perbandingan 104,82% : 55,89%. Kondisi tersebut kurang baik dan memerlukan perhatian semua pihak terkait untuk dicari penyebabnya sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Terlebih-lebih jika dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun bagi penduduk. Sementara untuk jenjang pendidikan lainnya perbedaan persentase APM laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan

Gambar: 4.1 Persentase Angka Partisipasi Murni SD-SMA dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2015/2016



Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar, 2016

4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah salah satu indikator untuk melihat partisipasi penduduk dalam bidang pendidikan. Angka ini biasanya digunakan untuk melihat gambaran kondisi siswa pada suatu jenjang pendidikan. APK tersebut menjelaskan penduduk pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usia mereka. Angka Partisipasi Kasar (APK) ini sesungguhnya adalah proporsi anak yang bersekolah pada tiap-tiap jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok umurnya. Berkenaan dengan itu, sebagai contoh penghitungan APK SD digunakan rumus jumlah penduduk yang bersekolah di SD dibagi dengan jumlah penduduk yang usia 7-12 tahun dikalikan 100. Dengan demikian maka APK dibedakan menurut jenjang pendidikan, yaitu APK TK, SD, SMP, dan SMA seperti yang tertera pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 APK menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar tahun 2015/2016

Tingkatan Sekolah	2014/2015		2015/2016	
	L	P	L	P
SD/MI	105,42	117,39	100,94	100,43
SMP/MTs	109,51	105,74	75,75	140,27
SMA/MA	112,43	102,65	111,58	98,38

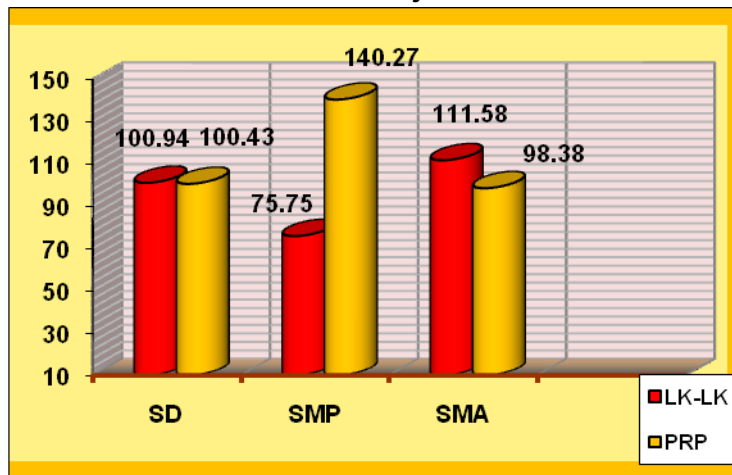
Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar, 2016

Berdasarkan data dari Profil Pendidikan Kota Denpasar yang dituangkan pada tabel di atas tampak bahwa secara umum rata-rata APK pada semua jenjang pendidikan tahun 2015/2016 di Kota Denpasar cukup tinggi bahkan melebihi 100% yaitu 108,94% untuk perempuan dan 97,72% laki-laki. APK yang paling proporsional antara laki-laki dan perempuan ada pada jenjang pendidikan SD/MI dengan perbandingan 100,94% : 100,43%, dan yang paling tidak proporsional pada jenjang pendidikan SMP/MTs yakni 75,75% : 140,27%. Bila dibandingkan dengan APK tahun sebelumnya tampak terjadi penurunan persentase hampir di semua jenjang pendidikan. Hanya pada jenjang pendidikan SMP/MTs terjadi peningkatan pada APK siswa perempuan.

Ditinjau dari perspektif jenis kelamin kondisi APK di Kota Denpasar tahun 2015/2016 sangat fluktuatif. Di tingkat SMP/MTs APK laki-laki hanya

mencapai hampir 50% dari APK perempuan (75,75% : 140,27%), tetapi di SMA/MA APK laki-laki jauh lebih tinggi daripada APK perempuan yaitu 111,58% : 98,38%. Hal menjadi menarik untuk ditelusuri apakah karena pada jenjang pendidikan SMP/MTs tidak dikenakan biaya (terkait dengan program wajib belajar 9 tahun) sehingga APK perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, sedangkan di SMA/MA karena dikenakan biaya menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Jika dugaan ini benar adanya, itu berarti masyarakat Kota Denpasar masih menganut paham atau kepercayaan yang mengutamakan salah satu jenis kelamin dibandingkan jenis kelamin lain sehingga tidak tercapai kesetaraan gender dalam pendidikan.

Gambar: 4.2 Persentase Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016



Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar, 2016

4.3 Jumlah Siswa

Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan selalu dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah melalui program wajib belajar sembilan tahun yang bertujuan untuk mendorong semua penduduk minimal berpendidikan SD- SMP. Di samping itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan suatu bangsa, khususnya di bidang pendidikan dapat dilihat juga dari tingkat partisipasi

sekolah penduduknya. Tingkat partisipasi sekolah penduduk menunjukkan capaian dari niat dan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh penduduk. Terkait dengan jumlah siswa sekolah dasar yang tercatat di Kota Denpasar seperti tampak pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, 2014/2015 dan 2015/2016

Tingkatan Sekolah	2014/2015			2015/2016		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
SD	48,378	44,202	92.580	44.105	40.750	84.855
SMP	19,824	18,165	37.990	13.598	24.931	38.529
SMA	8,605	11,968	20.573	9.183	9.700	18.883
Jumlah	77.807	74.335	152.142	66.886	75.381	142.267

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015/2016 secara keseluruhan jumlah siswa pada semua jenjang pendidikan di Kota Denpasar sebanyak 142.267 orang. Jumlah siswa sangat terkait dengan jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan tampak jumlah siswa semakin menurun. Berdasarkan jenis kelamin, tampak jumlah siswa laki-laki pada tahun 2015 sedikit lebih banyak dibandingkan siswa perempuan, Sedangkan tahun 2016 jumlah siswa perempuan lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki. Secara keseluruhan tampak terjadi penurunan jumlah siswa dalam periode dua tahun terakhir. Kalau tahun 2015 jumlah siswa mencapai 152.142 sedangkan tahun 2016 turun menjadi 142.267 siswa. Pertanyaannya mengapa hal ini terjadi, dan jawabannya tentu harus dilakukan pendalaman melalui penelitian sekaligus untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat.

4.3.1 Jumlah Siswa TK

Pendidikan pada usia anak-anak usia dini (PAUD) merupakan hal yang sangat penting..Taman kanak-kanak atau disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), yaitu usia sampai dengan 6 tahun. Usia anak masuk TK adalah 4-5 tahun dan menyelesaikan pendidikan di usia 6

tahun. Jenjang pendidikan di TK adalah TK 0 Kecil (TK Kecil) dan TK 0 Besar (TK Besar). Pada umumnya para orang tua zaman sekarang terutama di daerah perkotaan telah memiliki kesadaran dan partisipasi yang sangat tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya di PAUD dan TK.

Jumlah anak-anak PAUD di Kota Denpasar tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Jumlah Siswa PAUD menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016

NO	Wilayah	Jumlah Siswa Paud		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	2,344	2,179	4,523
2	Kec. Denpasar Selatan	1,559	1,392	2,951
3	Kec. Denpasar Timur	1,827	1,561	3,388
4	Kec. Denpasar Utara	2,094	1,988	4,082

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

Tabel 4.4 di atas menggambarkan jumlah keseluruhan siswa PAUD di Kota Denpasar tahun 2016 sebanyak 1449.944 orang. Siswa PAUD terbanyak ada di wilayah Kecamatan Denpasar Barat dan terkecil di Kecamatan Denpasar Selatan. Dari perspektif gender perbandingan siswa laki-laki lebih banyak daripada perempuan yakni laki-laki 7.824 orang dan perempuan 7.120 orang. Ada satu hal penting yang mesti diperhatikan dalam kaitan dengan Sekolah PAUD ini , yaitu sistem pendidikan dan pengajaran. Sistem pembelajaran di PAUD ini hendaknya disesuaikan dengan kurikulum PUD dan TK, pendidikan dan pengajaran seharusnya yang lebih ditekankan adalah pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (Id.wikipedia.org/./Taman_kanak-kanak). Kedua, yang perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti adalah memberikan porsi pembelajaran yang berimbang antara bidang sosial dengan bidang sains. Pembelajaran sosial seperti bagaimana anak-anak bisa berbagi makanan atau cerita, berterima kasih, bertenggang rasa, bermain dan makan bersama, dan lain-lain sangat penting dalam pembentukan karakter. Dengan demikian anak-anak sejak dini telah

belajar tentang nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dapat mengemukakan pendapat, menghargai barang dan atau orang lain.

4.3.2 Jumlah Siswa SD

Siswa adalah anak usia sekolah yang berpartisipasi aktif mengikuti pendidikan formal persekolahan sesuai dengan penjenjangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jumlah siswa SD di Kota Denpasar tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5 Jumlah Siswa SD menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016

NO	Wilayah	Siswa SD/MI		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	2,027	2,008	4,035
2	Kec. Denpasar Selatan	1,940	1,742	3,682
3	Kec. Denpasar Timur	1,497	1,298	2,795
4	Kec. Denpasar Utara	2,023	1,879	3,902

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

Tabel 4.5 yang dikutip dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar menggambarkan secara keseluruhan jumlah siswa SD tahun 2016 sebanyak 14.414 orang dengan rincian laki-laki 7.487 orang dan perempuan 6.927 orang. Secara rinci jumlah siswa SD terbanyak ada di Denpasar Barat (4.035 orang), dan terkecil ada di Kecamatan Denpasar Timur yakni sebanyak 2795 orang. Dilihat dari perbandingan, siswa laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Ini berarti terjadi kesenjangan gender pada siswa perempuan.

4.3.3 Jumlah Siswa SMP

Untuk mengetahui kondisi siswa SMP di Kota Denpasar dapat dilihat dari laporan Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Secara rinci jumlah siswa SMP di Kota Denpasar tahun 2016 disajikan pada tabel 4.6 berikut. Dari tabel 4.6 ini tampak bahwa secara keseluruhan jumlah siswa SMP tahun 2016 adalah 39.618 orang dengan perbandingan siswa laki-laki 20.632 orang dan perempuan 19.986 orang. Sementara itu jumlah siswa SMP terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Utara yaitu 14.742 orang dan terendah di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 6.540 orang. Jika dilihat dari perspektif gender

secara umum tampaknya masih tetap didominasi oleh siswa laki-laki. Oleh karena itu pada jenjang pendidikan ini tampaknya tidak mencerminkan terjadinya kesetaraan gender.

Tabel 4.6 Jumlah Siswa SMP menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016

NO	Jumlah Siswa SMP/MTs	TOTAL		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Wilayah			
1	Kec. Denpasar Barat	3,859	3,481	7,340
2	Kec. Denpasar Selatan	5,750	5,246	10,996
3	Kec. Denpasar Timur	3,348	3,192	6,540
4	Kec. Denpasar Utara	7,675	7,067	14,742

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

4.3.4 Jumlah Siswa SMA dan SMK

Semakin tinggi jenjang pendidikan biasanya jumlah siswa akan semakin menurun, akan tetapi hal ini tampaknya tidak terjadi di Kota Denpasar dimana jumlah siswa di jenjang pendidikan SMA dan SMK jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa SD dan SMP. Secara rinci kondisi siswa SMA dan SMK di Kota Denpasartahun 2016 seperti terlihat pada Tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7 Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016

NO	Wilayah	Jumlah Siswa SMA/MA/SMK		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	2,970	3,270	6,240
2	Kec. Denpasar Selatan	6,041	5,520	11,561
3	Kec. Denpasar Timur	5,459	5,146	10,605
4	Kec. Denpasar Utara	6,946	5,647	12,593

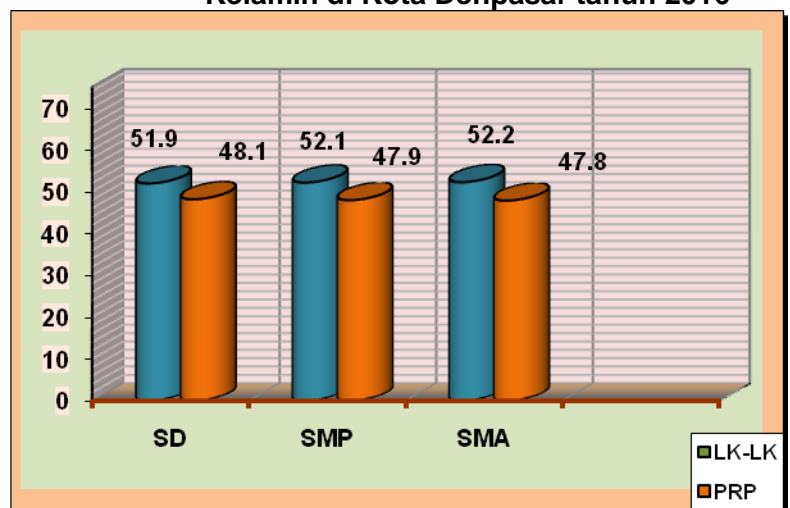
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

Dari tabel 4.7 tampak bahwa secara umum jumlah siswa SMA/MA /SMK adalah yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan sebelumnya yakni 40.999 orang. Di SMA/MA/SMK jumlah siswa laki-laki lebih banyak

dibandingkan siswa perempuan. Jumlah siswa terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Utara dan yang terkecil ada di Kecamatan Denpasar Barat. Secara keseluruhan jumlah siswa SMA/MA/SMK tahun 2016 laki-laki 21.416 orang, sedangkan jumlah perempuan 19.583 orang. Ini berarti terjadi ketidakseimbangan gender pada siswa perempuan sama dengan kondisi pada jenjang pendidikan SD dan SMP yang diuraikan sebelumnya. Mengenai factor penyebab terjadinya kondisi semacam ini tentu perlu dilakukan pendalaman melalui penelitian sehingga bisa ditentukan kebijakan yang lebih baik.

Secara umum perbandingan persentase siswa laki-laki dan perempuan dari jenjang pendidikan SD – SMA/SMK seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar: 4.3 Persentase Siswa SD- SMA/SMK Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar tahun 2016



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

4.4 Siswa Melanjutkan Sekolah

Siswa melanjutkan sekolah adalah siswa yang setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berikutnya. Pada bagian ini akan diuraikan persentase siswa melanjutkan dari SD ke SMP dan selanjutnya. Hal ini penting diungkapkan untuk mengetahui apakah semua anak-anak yang telah lulus dari jenjang pendidikan tertentu semuanya mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4.4.1 Siswa Melanjutkan ke SD/MI

Sebagaimana diungkapkan pada uraian terdahulu bahwa jumlah siswa Taman Kanak-kanak (TK) paada tahun 2016 adalah sejumlah 1449.944 oarang, terdiri atas 7487 orang laki-laki dan 6927 orang perempuan. Untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Jumlah Siswa TK melanjutkan ke SD/MI menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016

NO	Wilayah	Siswa TK melanjutkan ke SD/MI		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	2,027	2,008	4,035
2	Kec. Denpasar Selatan	1,940	1,742	3,682
3	Kec. Denpasar Timur	1,497	1,298	2,795
4	Kec. Denpasar Utara	2,023	1,879	3,902

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

Berdasarkan sajian pada tabel 4.8 tersebut dapat diketahui bahwa keseluruhan (100%) siswa TK yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SD/MI. Baik dilihat dari segi jumlah keseluruhan, maupun dari jenis kelamin hal ini persis sama dengan jumlah siswa TK di Kota Denpasar tahun 2016. Kondisi ini tentu saja sangat menggembirakan dan memang seharusnya demikian karena di jenjang pendidikan SD/MI tidak dikenakan biaya apapun sehingga tidak ada alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anak mereka.

4.4.2 Siswa Melanjutkan ke SMP

Dengan diluncurkannya program wajib belajar sembilan tahun seharusnya tidak ada alasan lagi bagi anak-anak yang tamat SD untuk tidak melanjutkan ke SMP, apalagi program ini sudah ditunjang oleh program lainnya seperti pemberian dana BOS. Tabel 4.9 di bawah menunjukkan siswa melanjutkan sekolah dari SD ke SMP di Kota Denpasar pada tahun 2016.

Tabel 4.9 Jumlah Siswa SD melanjutkan ke SMP/MTs menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016

NO	Wilayah	Siswa SD melanjutkan ke SMP/MTs		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	1,362	1,219	2,581
2	Kec. Denpasar Selatan	2,003	1,840	3,843
3	Kec. Denpasar Timur	1,090	1,064	2,154
4	Kec. Denpasar Utara	2,614	2,334	4,948

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 anak-anak tamatan SD berhasil melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMP sebanyak 13.526 orang yang terdiri atas laki-laki 7.069 orang siswa laki-laki dan 6.457 orang siswa perempuan. Jumlah anak-anak yang melanjutkan ke SMP paling banyak ada di Kecamatan Denpasar Selatan dan paling sedikit di Denpasar Timur. Dari perspektif gender tampak masih terjadi ketimpangan pada siswa perempuan. Untuk itu perlu digali lebih jauh faktor penyebabnya untuk kemudian dicarikan solusinya.

4.4.3 Siswa Melanjutkan ke SMA

Angka melanjutkan dalam hal ini dimaksudkan jumlah siswa yang melanjutkan sekolah dari jenjang pendidikan yang lebih rendah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yakni dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Meskipun berbagai program pemerintah telah diluncurkan pemerintah untuk mendukung pembangunan pendidikan namun sampai saat ini masih relatif banyak penduduk yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama dari SMP ke SMA/SMK, apalagi dari SMA ke perguruan tinggi. Kondisi ini terutama masih tampak di wilayah pedesaan yang masih banyak penduduknya hidup dalam kondisi miskin baik miskin ekonomi maupun miskin pengetahuan.

Untuk di Kota Denpasar anak-anak usia sekolah masih relatif tinggi yang mampu melanjutkan pendidikannya sampai SMA/MA. dibandingkan

dengan yang melanjutkan SMP/MTs. Kondisi angka melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA secara rinci seperti terurai pada Tabel, 4.10 berikut ini.

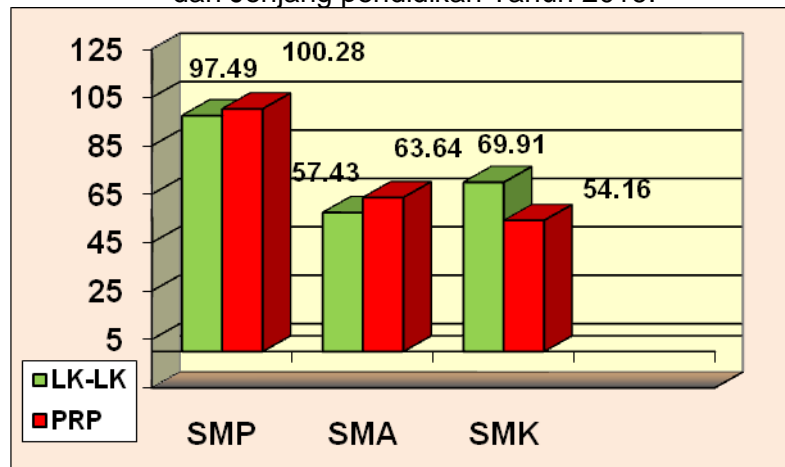
Tabel 4.10 Jumlah Siswa SMP melanjutkan ke SMA/SMK/MA menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016

NO	Wilayah	Siswa SMP melanjutkan ke SMA/SMK/MA		
		L	P	Jumlah
1	Denpasar Barat	1,015	1,181	2,196
2	Denpasar Selatan	2,175	1,962	4,137
3	Denpasar Timur	1,998	1,829	3,827
4	Denpasar Utara	2,570	1,978	4,548

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

Jika Tabel 4.10 dicermati lebih dalam tampak bahwa pada tahun 2016 secara keseluruhan jumlah anak-anak tamatan SMP yang mampu melanjutkan pendidikan ke SMA /MA sebanyak 14.708 orang , dalam hal ini yang lebih banyak melanjutkan adalah anak laki-lak (7.069) orang, dan perempuan hanya (6.950) orang. Hal ini tampaknya masih perlu mendapat perhatian sehingga angka melanjutkan bisa lebih meningkat lagi paling tidak bisa mencapai 90% atau lebih.

Gambar: 4.4 Persentase Siswa melanjutkan menurut Jenis Kelamin dan Jenjang pendidikan Tahun 2016.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

4.3 Jumlah Siswa Putus Sekolah

Di Kota Denpasar, tidak semua siswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar dan sukses. Ternyata ada juga siswa yang mengalami nasib kurang beruntung, yakni putus sekolah (*drop out*). Siswa putus sekolah adalah siswa yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan formal sampai tingkat terakhir pada jenjang pendidikan tertentu, yakni jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Penyebab putus sekolah yang dialami oleh sejumlah siswa di antaranya kesulitan ekonomi rumah tangga (hidup di bawah garis kemiskinan), kurangnya kesadaran peserta didik dan kurangnya perhatian orang tua siswa..

4.5.1 Angka Putus Sekolah Siswa SD

Data mengenai angka putus sekolah di Kota Denpasar pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.12. Data tersebut menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota Denpasar relatif kecil. Siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SD, hanya ada di kelas 6 yakni sebanyak 3 orang. Mereka terdistribusi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Selatan 2 orang, dan Kecamatan Denpasar Barat 1 orang. Dari perspektif gender kondisi ini tidak bisa diungkap karena belum tersedia data terpilah menurut jenis kelamin,

Tabel 4.11 Jumlah Siswa SD/Mi yang Putus Sekolah menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016

NO	Wilayah	Siswa SD/MI Putus Sekolah di kelas		
		4	5	6
1	Kec. Denpasar Barat	0	0	1
2	Kec. Den. Selatan	0	0	2
3	Kec. Denpasar Timur	0	0	0
4	Kec. Denpasar Utara	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

4.5.2 Angka Putus Sekolah Siswa SMP

Pada jenjang pendidikan SMP angka siswa putus sekolah di Kota Denpasar menunjukkan kondisi lebih buruk dibandingkan dengan kondisi di SD. Hal ini tampak pada tabel 4.13. Pada tahun 2016 terdapat 5 orang siswa SMP putus sekolah yang dialami oleh siswa kelas 8 sebanyak 2 orang dan

siswa kelas 9, sebanyak 3 orang. Siswa putus sekolah ini kesemanya berada di Kecamatan Denpasar Barat. Dari perspektif gender sama juga tidak bisa dijelaskan karena belum tersedia data terpilah menurut jenis kelamin. Siswa putus sekolah tersebut, sangat perlu mendapat penanganan dari pihak-pihak terkait secara lebih serius.

Tabel 4.12 Jumlah Siswa SMP/MTs yang Putus Sekolah menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2016

NO	Wilayah	Siswa SMP/MTs Putus Sekolah di kelas		
		7	8	9
1	Kec. Denpasar Barat	0	2	3
2	Kec. Den. Selatan	0	0	0
3	Kec. Denpasar Timur	0	0	0
4	Kec. Denpasar Utara	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

4.5.3 Angka Putus Sekolah Siswa SMA

Jika diperhatikan tabel 4.14 maka tampak ada sesuatu yang sangat menggembarakan telah terjadi. Dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, mulai dari SD, SMP, bahkan SMK, angka putus sekolah jenjang pendidikan SMA/MA adalah yang terbaik karena tidak ada satu orangpun siswa di Kota Denpasar tahun 2016 mengalami putus sekolah. Kondisi tersebut tentu sangat penting untuk dipertahankan dan bagi sekolah dengan angka putus sekolah sekecil apapun tentu sangat penting bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian lebih serius agar masalah tersebut bisa dicarikan solusinya. Secara rinci angka putus sekolah di Kota Denpasar tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.13 Jumlah Siswa SMA/MA yang Putus Sekolah, tahun 2016

NO	Wilayah	Siswa SMA/MA yg DO di kelas		
		10	11	12
1	Kec. Denpasar Barat	0	0	0
2	Kec. Den. Selatan	0	0	0
3	Kec. Denpasar Timur	0	0	0
4	Kec. Denpasar Utara	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

4.5.4 Angka Putus Sekolah Siswa SMK

Kondisi sangat memprihatinkan tampaknya terjadi pada jenjang pendidikan SMK di Kota Denpasar, Betapa tidak, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan tersebut sangat tinggi. Secara rinci hal tersebut disajikan pada tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14 Jumlah Siswa SMK yang Putus Sekolah menurut Kecamatan di Denpasar Tahun 2016

NO	Wilayah	Siswa SMK Putus Sekolah di kelas		
		10	11	12
1	Kec. Denpasar Barat	0	0	0
2	Kec. Den. Selatan	0	0	0
3	Kec. Denpasar Timur	2	0	0
4	Kec. Denpasar Utara	2	8	5

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar 2016

Jika dicermati tabel 4.14 di atas tampak jelas bahwa tahun 2016 jumlah siswa SMK di Kota Denpasar mencapai angka 15 orang, dan terjadi di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Utara. Kondisi tersebut tentu tidak bisa dianggap enteng atau wajar-wajar saja, tetapi harus dicari factor penyebabnya. Untuk itu pihak-pihak terkait sangat penting melakukan pendalaman melalui penelitian agar bisa dicarikan solusi yang tepat sehingga hal ini bisa diminimalisir.

4.6 Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Salah satu indikator pendukung keberhasilan pendidikan di suatu daerah adalah tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Di era sekarang dengan penyediaan anggaran pendidikan 20% seharusnya tidak ada alasan lagi untuk mengatakan kurangnya anggaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. merupakan sarana penting untuk menciptakan

suasana proses belajar mengajar yang baik, sehingga tercapai peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diinginkan. Tabel berikut menunjukkan ketersediaan fasilitas pendidikan pada beberapa jenjang pendidikan di Kota Denpasar

Tabel 4.15 Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2015/2016

Jenjang Pendidikan	2015/2016
TK	294
PAUD	455
TPA	28
SD/Sederajat	230
SLTP/Sederajat	66
SLTA/Sederajat	34
SMK	32

Sumber: Profil Pendidikan Kota Denpasar 2016

Berkaitan dengan jumlah sekolah pada tabel di atas, dapat diketahui dari beragam jenjang pendidikan, terutama jenjang pendidikan formal SD/ sederajat, SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, dan SMK, dan SD/Sederajat adalah mendominasi dalam hal jumlah. Kondisi ini mencerminkan bahwa anak-anak yang memasuki Sekolah Dasar dapat cukup terwadahi dalam lembaga pendidikan resmi. Selain itu, kondisi ini juga tidak terlepas dari program pemerintah yang mewajibkan belajar minimal yaitu SD, walaupun program yang dicanangkan adalah wajib belajar 9 tahun. Untuk sekolah dengan jenjang pendidikan SLTP/Sederajat jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan dengan SLTA/Sederajat dan SMK. Hal ini sangat terkait dengan jumlah siswa yang semakin sedikit seiring dengan semakin tinggi jenjang pendidikan.

Sedangkan jenis pendidikan formal maupun nonformal seperti: TK, PAUD, dan TPA, jumlahnya cukup banyak, dan didominasi oleh PAUD. Kondisi tersebut menandakan bahwa para orang tua zaman sekarang terutama di daerah perkotaan telah memiliki kesadaran dan partisipasi yang sangat tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya di PAUD, dan TK.

4.7 Proporsi Guru

Salah satu indikator dari manajemen pendidikan adalah eksistensi guru pendidik. Guru merupakan salah satu elemen terdepan dalam dunia pendidikan yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam menentukan keberhasilan pendidikan suatu Bangsa. Adapun tugas utama seorang guru yaitu mendidik siswa ataupun murid dalam hal membangun hard skill dan soft skillnya. Sehingga Peranan seorang guru sangat penting untuk menjadikan mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi persaingan di dunia pekerjaan dan menjadikan mereka sebagai lulusan yang berhasil dalam menghadapi kompetensi atau ketuntasan belajar.

Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan strategi bagi pengajar supaya peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Secara umum tugas seorang guru adalah mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik, mulai jenjang pendidikan Taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan sekolah menengah atas. Keberhasilan di bidang pendidikan ditunjukkan dari kualitas pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik ditentukan oleh proses pembelajaran, terutama pembelajaran di kelas. Guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran di kelas seperti seorang guru dapat mengambil kebijakan dan keputusan sesuai dengan proses pembelajaran di kelas.

Dalam keberhasilan proses pembelajaran, proporsi guru juga perlu diperhatikan. Keseimbangan proporsi guru laki-laki dan perempuan sangat penting. Hal ini disebabkan karena dengan proporsi guru yang seimbang akan memberikan perlakuan yang setara kepada siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam pemenuhan kebutuhannya yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk lebih jelasnya proporsi guru akan disajikan dalam bentuk tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa proporsi guru SD yang berjumlah 4.157 terdapat disparitas gender yang tajam yaitu didominasi oleh Guru perempuan yang berjumlah 3.015 orang. Proporsi guru SMP juga mengalami disparitas gender yang didominasi oleh guru perempuan dengan jumlah 1.326 orang dari jumlah keseluruhan guru adalah 2.296 guru. Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi guru SD dan SMP di dominasi oleh guru perempuan, kenapa?,

kemungkinan hal ini disebabkan karena kebutuhan SD dan SMP masih memerlukan bimbingan dari sentuhan lembah lembut dari seorang guru perempuan.

Tabel 4.16 Jumlah Guru SD,SMP, SMA dan SMK di Kota Denpasar berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan, 2015/2016

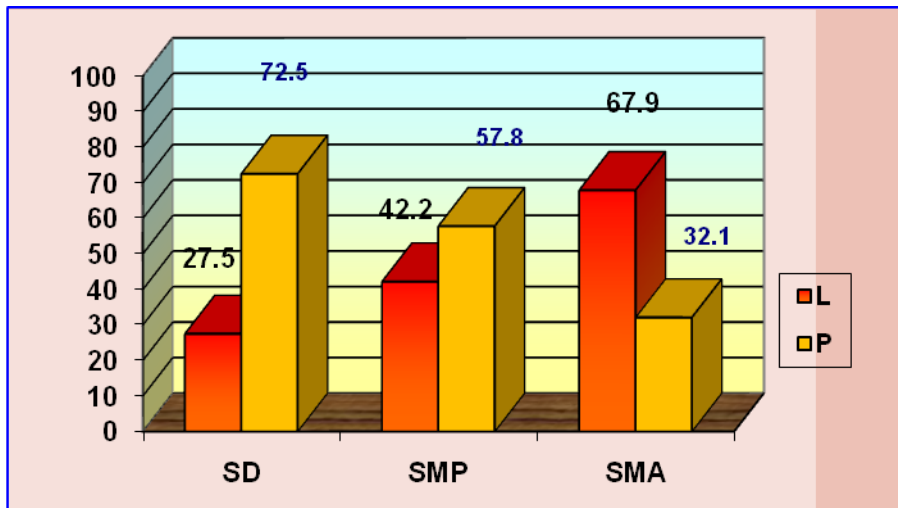
Kecamatan	SD			SMP			SMA			SMK		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Denpasar Barat	302	829	1,131	178	273	451	148	136	284	56	82	138
Denpasar Selatan	321	760	1,081	274	406	680	186	207	393	191	218	409
Denpasar Timur	241	651	892	155	201	356	136	134	270	193	285	478
Denpasar Utara	278	775	1,053	363	446	809	200	209	409	296	207	503
Jumlah	1.142	3.015	4.157	970	1.326	2.296	650	686	1.356	736	792	1.528

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2017

Berbeda dengan proporsi guru di jenjang pendidikan SMA yang di dominasi oleh guru laki-laki yang berjumlah 686 dari jumlah guru SMA seluruhnya yang berjumlah 1.356 sedangkan proporsi guru di SMK guru laki-laki sedikit lebih kecil jumlahnya dibandingkan guru perempuan, disparitas gender untuk guru di SMK hanya 58 orang. Kondisi seperti ini perlu direproporsi agar proporsi guru di Kota Denpasar responsif gender dalam rangka peningkatan kualitas peserta didik.

Untuk dapat melihat lebih jelas perbandingan persentase proporsi guru laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar, dapat disimak Grafik 4.4.

Grafik: 4.5 Persentase Guru SD, SMP, dan SMA Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2016



Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2017

4.8 Guru yang Mempunyai Sertifikat Pendidik

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam dunia pendidikan. Roh pendidikan sesungguhnya terletak dipundak guru. Bahkan, baik buruknya atau berhasil tidaknya pendidikan peserta didik hakikatnya ada di tangan guru. Oleh karena itu sosok guru memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan kualitas peserta didik menjadi pandai, cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas.

Namun kini banyak gelombang aksi tuntutan mengenai profesionalisme guru. Eksistensi guru menjadi bagian *inheren* yang tidak dapat dipisahkan dari satu kesatuan interaksi dalam sistem pengelolaan pengajaran pendidikan (sekolah). Tuntutan tersebut sejalan dengan cita-cita yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen.

Berdasarkan Undang-undang No 15 tahun 2006 tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. sikap profesionalisme dalam dunia pendidikan (sekolah), tidak sekadar dinilai formalitas tetapi harus fungsional dan menjadi

prinsip dasar yang melandasi aksi operasionalnya. Tuntutan demikian ini wajar karena dalam dunia modern, khususnya dalam rangka persaingan global, memerlukan sumber daya manusia yang bermutu dan selalu melakukan improvisasi diri secara terus menerus. Sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga pendidik atau guru merupakan cetak biru (*blueprint*) bagi penyelenggaraan pendidikan. Seorang guru yang baik adalah mereka yang memenuhi persyaratan kemampuan profesional baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar atau pelatih. Di sinilah letak pentingnya standar mutu profesional guru untuk menjamin proses belajar mengajar dan hasil belajar yang bermutu.

Dengan demikian, berdasarkan undang-undang tersebut setiap guru profesional haruslah mempunyai sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

4.8.1 Guru SD yang Tersertifikasi

Sertifikasi guru dilakukan pada setiap jenjang pendidikan. Sampai dengan tahun 2015/2016, jumlah guru SD yang tersertifikasi di Kota Denpasar, dapat diketahui sebagaimana tersaji pada Tabel 4.17

Tabel . 4.17 Jumlah Guru SD yang sudah tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2015/2016

NO	Kecamatan	2015/2016		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	300	827	1,127
2	Kec. Denpasar Selatan	320	758	1,078
3	Kec. Denpasar Timur	239	649	888
4	Kec. Denpasar Utara	275	772	1,047
	Jumlah	1.134	3.006	4.140

Sumber : Disdikpora Kota Denpasar, 2017

Dari table tersebut di atas dapat dijelaskan ternyata masih ada guru SD di Kota Denpasar yang belum tersertifikasi, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Dari Jumlah guru SD sebanyak 4.157 orang, yang sudah tersertifikasi sebanyak 4.140 orang (99,6%). Karena secara proporsional jumlah guru SD

lebih banyak perempuan, maka mereka yang tersertifikasi juga didominasi oleh guru perempuan. Jika dilihat data per kecamatan menunjukkan bahwa Denpasar Barat adalah yang tertinggi yaitu 1,127 orang dan yang terendah di Kecamatan Denpasar timur yaitu 888 orang. Data ini menggambarkan bahwa kondisi guru SD di Kota Denpasar secara kualitas sudah cukup bagus karena sudah tergolong profesional dengan mengantongi sertifikat pendidik. Dengan demikian kesejahteraan merekapun sudah meningkat pula karena mereka yang sudah tersertifikasi berarti mereka sudah memperoleh tunjangan sertifikasi.

4.8.2 Guru SMP yang Tersertifikasi

Pada jenjang pendidikan SMP, jumlah guru yang sudah tersertifikasi kondisinya tidak jauh berbeda dengan di jenjang pendidikan SD, dalam artian masih relative banyak guru yang belum tersertifikasi. Sebagaimana disajikan pada tabel 4.7 tampak bahwa jumlah guru pada jenjang pendidikan SMP di Kota Denpasar yang sudah tersertifikasi mencapai 2.256 dari 2.296 orang guru SMP yang tercatat di Kota Denpasar. Artinya tinggal 1,7% yang belum tersertifikasi. Jika dilihat dari perspektif gender, kondisinya sama dengan guru SD yakni terjadi ketimpangan cukup menonjol pada guru laki-laki karena memang guru perempuan lebih banyak dibandingkan guru laki-laki. Dilihat dari data kecamatan, kecamatan Denpasar Utara memiliki guru SMP tersertifikasi tertinggi yaitu 809 orang, dan terendah Kecamatan Denpasar Timur yakni 316 orang. Secara rinci jumlah guru SMP yang tersertifikasi di Kota Denpasar tahun 2015/2016 disajikan pada tabel 4.18 berikut.

Tabel : 4.18 Jumlah Guru SMP yang sudah Sertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar

NO	Kecamatan	2015/2016		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Denpasar Barat	178	273	451
2	Denpasar Selatan	274	406	680
3	Denpasar Timur	115	201	316
4	Denpasar Utara	363	446	809
	Jumlah	930	1.326	2.256

Sumber : Disdikpora Kota Denpasar, 2016

4.8.3 Guru SMA dan SMK yang Tersertifikasi

Ada kecenderungan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit pula jumlah guru yang ada. Kondisi ini juga berimplikasi terhadap jumlah guru yang tersertifikasi. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa jumlah guru SMA dan SMK di Kota Denpasar yang sudah tersertifikasi mencapai **2.685** orang atau 93,1% dari seluruh guru SMA dan SMK yang ada di Kota Denpasar yang berjumlah 2.884 orang. Jadi sampai saat ini masih ada 6,9% guru SMA dan SMK yang belum tersertifikasi. Perbandingan guru laki-laki dan perempuan yang tersertifikasi secara absolute tidak terlalu menunjukkan adanya perbedaan yang menjolok.

Tabel .4.19 Jumlah Guru SMA dan SMK yang sudah tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar

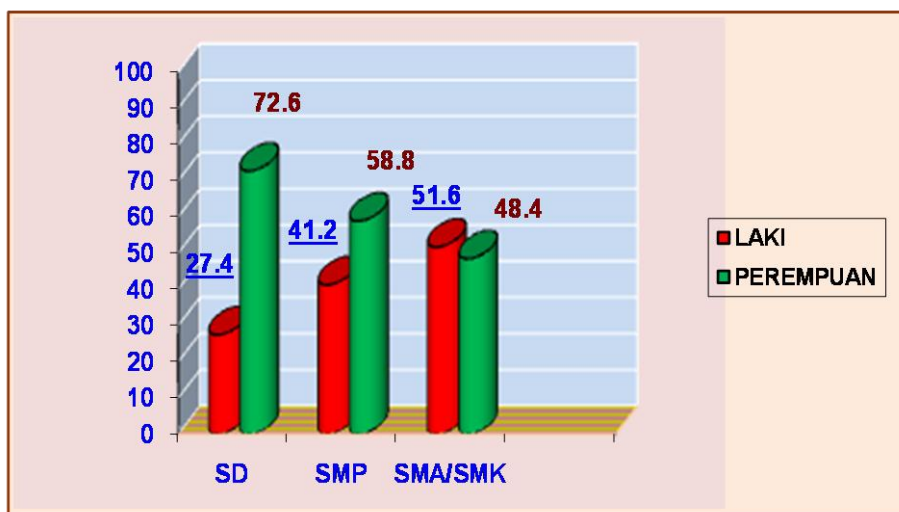
NO	Kecamatan	2015/2016		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Denpasar Barat	180	183	363
2	Denpasar Selatan	364	400	764
3	Denpasar Timur	326	380	706
4	Denpasar Utara	517	415	932
	Jumlah	1.387	1.298	2.685

Sumber : Disdikpora Kota Denpasar

Guru yang tersertifikasi ini tersebar di seluruh kecamatan dan yang tertinggi ada di Kecamatan Denpasar Utara yakni 932 dan terendah ada di Kecamatan Denpasar barat yakni 363 orang. Secara persentase jumlah guru SMA dan SMK yang sudah tersertifikasi dapat dikatakan sudah cukup tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP.

Untuk lebih gampang melihatnya, maka keberadaan guru yang sudah tersertifikasi berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin akan disajikan dalam grafik berikut ini.

Grafik: 4.6 Persentase Guru SD, SMP, SMA dan SMK yang Telah Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin, 2015/2016



Sumber: Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2015/2016

Dari gambar tersebut di atas jelas tampak bahwa pada jenjang pendidikan SD dan SMP jumlah guru perempuan yang tersertifikasi lebih tinggi persentasenya dibandingkan guru laki-laki karena memang secara absolute jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan ini juga lebih banyak dibandingkan guru laki-laki. Sementara untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK jumlahnya hamper seimbang.

BAB V

KESEHATAN

Dalam sebuah slogan disebutkan *ora et labora*, yang berarti “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula”. Makna slogan ini menjadi nilai budaya ber-kaitan dengan hidup sehat yang dipandang menjadi sesuatu sangat berharga dalam hidup manusia. Pada umumnya, nilai budaya tentang hidup sehat ini meresapi bagian terbesar warga masyarakat. Ini menunjukkan manusia tidak ada yang ingin menderita disebabkan oleh suatu penyakit, baik pada jasmani maupun rohani selama ayatnya masih di-kandung badan.

Dalam hubungan ini, dikenal suatu asumsi; jika jasmani seseorang dalam keadaan sakit maka akan mempengaruhi juga kesehatan rohaninya. Sebaliknya, bila rohani seseorang dalam keadaan sakit akan mempengaruhi pula kondisi kesehatan jasmaninya. Apabila jasmani (fisik) seseorang sedang sakit lebih mudah dilihat oleh orang lain jika dibandingkan dengan seseorang yang sedang mengalami sakit pada rohaninya.

Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa di Negara Republik Indonesia memerlukan orang-orang yang sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah membentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah mengatur secara yuridis masalah kesehatan bagi setiap warga Negara Indonesia. Tujuan dibentuk-nya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampu-an hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Dalam hal ini, pemerintah membentuk dan mensosialisasikan suatu program jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam usaha mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia terbukti telah berusaha dengan gigih untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan warga masyarakat Indonesia. Upaya ini dibuktikan dengan dicetuskan lima program untuk mencapai pembangunan kesehatan yang di-canangkan oleh pemerintah. Rumusan mengenai lima program untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut dinamakan Program Panca Karsa Husada. Program Panca Karsa

Husada ini mencakup: (a) peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan; (b) perbaikan lingkungan hidup masyarakat yang dapat menjamin kesehatan; (c) peningkatan status gizi masyarakat; (d) pengurangan kesakitan dan kematian; dan (e) pengembangan keluarga sehat sejahtera dengan semakin diterimanya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan Program Panca Karsa ini, yakni dengan menyusun buku panduan yang disebarluaskan ke instansi-instansi terkait.

Relevan dengan program pembangunan kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia maka dalam hal ini pembahasannya diawali, yaitu di sekitar ke-adaan Balita (bayi berumur lima tahun), peserta KB (Keluarga Berencana), dan keadaan dokter/dokter gigi. Yang menjadi pertimbangan mengapa hal-hal tersebut menjadi pembahasan secara khusus dalam tulisan ini karena penyesuaian kesediaan data yang berhasil dikumpulkan.

5.1 Pemberian ASI Eksklusif di Kota Denpasar

Secara naluriah seorang bayi (manusia) yang baru lahir biasanya menangis dan siap mengisap air susu ibunya. Pemberian air susu ibu (ASI eksklusif) sebaiknya diteruskan sampai pada batas umur tertentu karena dari pendekatan kesehatan ASI eksklusif lebih baik daripada susu formula. Dari segi ilmu medis, ASI eksklusif mengandung nutrisi sehingga tubuh si bayi menjadi lebih kebal terhadap penyakit karena secara alami ASI menimbulkan kekebalan pada tubuh si bayi yang bersangkutan. Selain itu, dari segi ekonomi dan pragmatis, pemberian ASI eksklusif lebih murah dan praktis. Namun, karena sesuatu dan lain hal, relatif banyak pula di kalangan ibu si bayi yang tidak melanjutkan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, kemudian diganti-kan dengan pemberian susu formula. Tabel 5.1 di bawah ini mencantumkan tentang pemberian ASI eksklusif kepada bayi yang berumur 0 – 6 tahun pada tahun 2016.

Tabel 5.1 Pemberian ASI Eksklusif di Kota Denpasar Tahun 2016

NO	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi Yang Diberi Asi Eksklusif					
			USIA 0--6 BULAN					
			L		P		L + P	
			Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1	Denpasar Utara	Puskesmas I Denpasar Utara	106	72.1	86	71.1	192	71.6
		Puskesmas II Denpasar Utara	44	45.8	35	44.9	79	45.4
		Puskesmas III Denpasar Utara	143	34.0	116	33.8	259	33.9
			293	44.2	237	43.7	530	44.0
2	Denpasar Timur	Puskesmas I Denpasar Timur	69	66.3	56	65.9	125	66.1
		Puskesmas II Denpasar Timur	45	39.1	37	39.4	82	39.2
			114	52.1	93	52.0	207	52.0
3	Denpasar Selatan	Puskesmas I Den. Sel.	47	41.2	39	41.9	86	41.5
		Puskesmas II Den. Sel.	110	38.2	90	38.3	200	38.2
		Puskesmas III Den. Sel.	38	42.2	31	41.9	69	42.1
		Puskesmas IV Den. Sel	12	42.9	9	39.1	21	41.2
			207	39.8	169	39.8	376	39.8
4	Denpasar Barat	Puskesmas I Denpasar Barat	55	41.7	26	24.1	81	33.8
		Puskesmas II Denpasar Barat	33	55.0	45	91.8	78	71.6
			88	45.8	71	45.2	159	45.6
JUMLAH			1.404	44.0	1.140	43.7	2.544	43.9

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2016

Data pada tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa Kota Denpasar yang terdiri atas empat kecamatan didukung oleh sebelas puskesmas. Walaupun di Kota Denpasar terdapat dua rumah sakit negeri dan puluhan rumah sakit swasta, ternyata warga Kota Denpasar masih relatif banyak yang mempergunakan jasa puskesmas untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Dengan mencermati data pada tabel 5.1 di atas dapat dipahami bahwa belum semua ibu-ibu memberikan ASI eksklusif kepada anaknya yang berusia antara 0 sampai dengan 6 tahun. Di antara sekian banyak puskesmas yang terdapat di Kota Denpasar ditemui data berfluktuasi, yaitu di satu puskesmas ditemui data yang secara kuantitas sangat tinggi di kalangan ibu yang memberi ASI eksklusif kepada bayinya, misalnya di Puskesmas III Denpasar Utara. Di Puskesmas III Denpasar Utara tercatat sebanyak 143 bayi laki-laki dan sebanyak 116 bayi perempuan diberikan ASI eksklusif oleh ibunya.

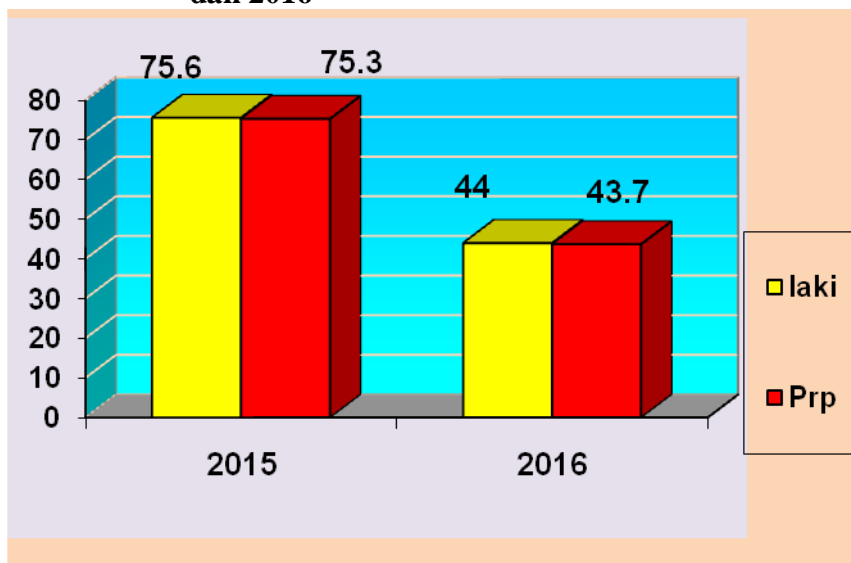
Di antara tiga puskesmas yang terdapat di wilayah Kecamatan Denpasar Utara ini, terdapat pula data di satu puskesmas, tepatnya di Puskesmas II Denpasar utara hanya tercatat 44 orang bayi laki-laki dan sebanyak 35 orang bayi perempuan (jumlah totalnya 79 orang bayi laki-laki & perempuan) yang masih menikmati ASI eksklusif secara berkesinambungan sampai batas umur kurang-lebih enam tahun.

Dalam hubungan ini, di Puskesmas yang terdapat di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan juga mengalami keadaan yang berfluktuasi pemberian ASI eksklusif di kalangan ibu yang memiliki anak di bawah umur enam tahun. Misalnya, di Puskesmas II Denpasar terdapat data yang sangat menonjol pemberian ASI eksklusif kepada bayi, yaitu sebanyak 110 orang bayi yang berjenis kelamin laki-laki dan 90 orang bayi perempuan. Jadi, jumlah totalnya sebanyak 200 orang bayi yang masih diberikan ASI eksklusif oleh ibunya. Sementara ini, dijumpai jumlah angka yang sebaliknya, yaitu di Puskesmas IV Denpasar Selatan dijumpai di pihak ibu yang memiliki bayi berumur 0--6 tahun hanya terdapat 12 orang bayi laki-laki dan sebanyak 9 orang bayi perempuan yang masih diberikan ASI eksklusif oleh ibunya.

Ditinjau dari perspektif gender dan dikaitkan dengan tabel 5.1 di atas, dapat dipahami bahwa bahwa para orang tua yang memiliki anak yang berumur antara 0 – 6 tahun, rupanya tidak membedakan jenis kelamin

anaknya dalam pemberian ASI eksklusif. Baik, anak yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan diberlakukan sama. Pada umumnya, ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, biasanya ibu-ibu rumah tangga yang waktu kerjanya tidak terikat oleh waktu. Sementara para ibu karier biasanya memberi ASI eksklusif dalam waktu yang relatif singkat kepada anaknya yang berumur antara 0 – 6 tahun. Ini disebabkan karena waktu mereka lebih banyak berada di tempatnya bekerja. Oleh karena itu, pengasuhan kepada anaknya, terutama pada waktunya kerja dipercayai kepada anggota keluarga atau kerabatnya. Bahkan, relatif banyak yang mempercayinya kepada pembantu rumah tangga. Padahal, secara psikologis pemberian ASI eksklusif kepada anak-anak balita lebih baik dalam hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan mental dan emosi anak-anak. Melalui pemberian ASI eksklusif si anak lebih merasakan curahan cinta kasih dari orang tuanya. Dengan demikian, gambar berikut ini menunjukkan perbandingan mengenai perkembangan pemberian ASI eksklusif antara tahun 2014, 2015, dan 2016 di Kota Denpasar sebagai berikut.

Gambar: 5.1 Cakupan ASI Eksklusif Di Kota Denpasar Tahun 2015 dan 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2016

Apabila dibandingkan perkembangan pemberian ASI eksklusif dalam rentang waktu dua tahun terakhir ini sebagaimana yang tampak pada gambar

di atas, menunjukkan bahwa terjadi keadaan fluktuasi, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Keadaan ditunjukkan oleh data, yaitu pada tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan yang cukup drastis, karena semakin berkurang yang menggunakan ASI eksklusif. Keadaan terjadi karena ibu-ibu memiliki anak yang berumur berkisar antara 0 – 6 tahun cenderung tidak memberi ASI eksklusif secara terus menerus sampai pada umur enam tahun. Ini disebabkan karena kaum ibu tersebut memiliki semakin banyak yang memiliki kesibukan di luar rumahnya sehingga antara ibu dan anaknya tidak setiap saat berada bersama-sama. Dengan demikian, ketika ibunya tidak ada di rumah, maka orang yang menjaga anaknya di rumah memberikan susu formula kepada balita tersebut.

Jika dibandingkan antara pemberian ASI eksklusif dengan susu formula tentunya pemberian susu eksklusif lebih baik pada perkembangan fisik dan mental si anak. Orang tua si bayi jauh lebih peduli dari perkembangan fisik dan mental si anaknya. Pada seseorang yang bukan ibu si bayi tersebut pembantu rumah tangganya dalam merawat perkembangan fisik dan mental si anak. Mengingat, bila terjadi kelalaian dalam pengasuhan dan perawatan si bayi, dampaknya sangat riskan terhadap si bayi, misalnya si bayi rewel, akan sering sakit, bahkan ada yang meninggal dunia.

5.2 Angka Kematian Anak Balita (AKAB)

Tinggi atau rendahnya derajat kesehatan anak Balita di suatu daerah dapat dilihat dari angka kematian anak Balita (AKAB) yang terdapat di daerah tersebut. Seorang ibu yang sedang hamil misalnya, apabila sejak awal kehamilannya sudah mulai dan secara kontinu menjaga ke-sehatannya dan merawat dirinya dengan baik, niscaya bayinya akan lahir dengan sehat. Selanjut-nya, sejak bayi dilahirkan mendapat pengasuhan dan perawatan sebagaimana mestinya, niscaya pula anak itu akan hidup sehat dan perkembangan fisiknya menjadi normal.

Keadaan si bayi akan berbeda apabila sejak bayi itu dalam kandungan kurang diperhatikan dan dirawat sebagaimana mestinya, maka besar kemungkinan perkembangan si bayi yang masih dalam kandungan ibunya tidak normal, bahkan ada kemungkinan bayi yang baru dilahirkan itu meninggal

dunia. Misalnya pula, walaupun bayi itu ketika lahir masih hidup maka pertumbuhannya tidak menjadi sebagaimana mestinya, bahkan ada yang meninggal dunia jika tidak dirawat dan diasuh dengan baik. Dalam hal ini, peranan seorang wanita sangat penting merawat dirinya sendiri sejak mulai merasa dirinya mulai mengandung sampai anaknya lahir. Kemudian, mengasuh dan merawat anak yang dilahirkan sebagaimana mestinya bersama-sama dengan suaminya agar badannya tetap sehat walafiat. Data di bawah ini menunjukkan mengenai perkembangan tingkat kematian Anak Balita di Kota Denpasar.

Tabel 5.2 Jumlah Angka Kematian Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014,2015, 2016

No.	Kecamatan	Bayi								
		2014			2015			2016		
		L	P	L + P	L	P	L+P	L	P	L + P
1.	Denpasar Timur	1	1	2	1	0	1	4	0	4
2.	Denpasar Selatan	1	0	1	0	0	0	3	1	4
3.	Denpasar Barat	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4.	Denpasa Utara	1	0	1	0	0	0	6	1	7
	Jumlah	3	1	4	1	0	1	14	2	16

Sumber : Dinas kesehatan Kota Denpasar, 2014, 2015, 2016

Apabila dicermati mengenai keadaan angka kematian anak Balita (AKAB) tiga tahun terakhir ini, tampak terjadi peningkatan AKAB secara mencolok pada tahun 2016. Sebagaimana tampak dalam tabel 5.2 di atas, selama tahun 2014 hanya terjadi kematian anak Balita 4 orang, yaitu di Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Utara masing-masing terjadi 1 orang, sedangkan di Kecamatan Denpasar Timur terjadi dua orang kematian anak Balita. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2015 justru terjadi penurunan AKAB. Pada tahun 2015 ini hanya terjadi satu orang kematian anak Balita, yaitu di Kecamatan Denpasar Timur. Namun, pada tahun 2016 terjadi kematian anak Balita yang paling menonjol di Kecamatan di Denpasar Utara,

yaitu sebanyak tujuh orang yang didominasi oleh anak Balita jenis kelamin laki-laki, dengan rincian enam laki-laki dan satu orang perempuan.

Justru yang mengagetkan adalah terjadi kematian anak Balita di tahun 2016, yaitu sebanyak 16 orang. Berarti, kejadian ini empat kali lipat daripada AKAB yang terjadi pada tahun 2014, dan enam belas kali lipat daripada yang terjadi di tahun 2016. Angka dalam tabel 5.2 menunjukkan kekurangberhasilan dari program penanggulangan AKAB yang diprogramkan di Kota Denpasar. Keadaan ini dapat memberikan inspirasi kepada tim pelaksana program penanggulangan AKAB untuk lebih meningkatkan dan mengintensifkan peranannya kepada ibu-ibu yang masih berusia subur agar merawat dirinya sebagaimana mestinya, terutama selama masa kehamilan dan sejak lahir anaknya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Terkait dengan program penanggulangan AKAB maka peranan PKK mulai tingkat yang terendah, yaitu *banjar* (lingkungan atau dusun) perlu lebih ditingkatkan dan diintensifkan. Dalam hal ini, diperlukan pembentukan kader-kader PKK yang mampu berperan memberikan wawasan dan pengetahuan untuk penanggulangan AKAB di Kota Denpasar. Di sini dipandang perlu lebih diintensifkan mengenai sosialisasi dan penyuluhan mengenai program-program PKK, antara lain: Gerakan Sayang IBU (GSI), pelayanan Posyandu, apotik hidup, dan hidup sehat. Dalam konteks ini, disebutkan dalam laporan Save The Children (<http://www.bbc.co.uk>), yaitu di tingkat Global sekitar satu juta bayi meninggal ketika baru berusia satu hari. Ditegaskannya pula jika tenaga kesehatan yang terlatih hadir saat kelahiran bayi tersebut, sebenarnya sebagian besar kematian itu mampu dicegah.

Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif gender kematian anak Balita yang mencolok terjadi di Kota Denpasar pada tahun 2016 didominasi oleh anak balita berjenis kelamin laki-laki. Kondisi ini perlu dikaji lebih jauh, mengapa balita laki-laki yang mendominasi kematian anak Balita di Kota Denpasar, apakah Balita laki-laki lebih mudah kena penyakit, atau ada faktor lain yang menjadi faktor penyebabnya. Padahal, seandainya bisa memilih, pasangan suami-istri yang berusia subur rupanya lebih cenderung supaya di antara anak-anaknya, ada yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan di Bali menganut prinsip keturunan patrilineal, yaitu menghitung garis keturunan melalui pihak laki-laki.

5.3 Kepemilikan Akte Kelahiran

Keberadaan anak sebagai generasi penerus diwajibkan memiliki identitas diri yang berupa akte kelahiran. Akte kelahiran ini menjadi identitas diri pada seorang anak yang menjelaskan jati diri anak yang dilahirkan, yakni (1) nama anak, (2) tempat dan tanggal lahir anak, (3) nama orang tua anak, (4) jenis kelamin anak, dan (5) tanda tangan pejabat yg berwenang. Akte kelahiran ini berbentuk selembar kertas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Dari perspektif hukum perdata, akte kelahiran ini menjadi dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status seorang anak.

Setiap ada yang memiliki anggota keluarga baru, sebaiknya sesegera mungkin dilaporkan dan diurus syarat-syarat untuk membuat akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. yaitu selambat-lambat 60 hari setelah hari kelahiran bayi tersebut. Akte kelahiran ini menjadi syarat utama untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya, yaitu pelayanan publik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Sebagai generasi penerus, anak-anak sebagai warga negara memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh Negara Republik Indonesia. Tabel 5.3 menjelaskan mengenai jumlah anak yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2016.

Tabel 5.3 Jumlah Anak yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2016

No	Kecamatan	Anak 0 – 18 Tahun						
		Jumlah		Memiliki Akte		Tidak Memiliki Akta		Kepemilikan (%)
		L	P	L	P	L	p	
1.	Denpasar Selatan	26.978	19.777	19.309	17.713	5.263	4.470	79,18
2.	Denpasar Timur	18.457	13.990	13.324	12.339	3.561	3.223	79,09
3.	Denpasar Barat	29.822	22.410	21.424	19.923	5.756	5.129	79,16
4.	Denpasar Utara	25.747	19.714	18.651	17.301	5.142	4.367	79,08
Jumlah		101.004	75.891	72.708	67.276	19.722	17.189	79,13

Sumber : Catatan Sipil Kota Denpasar, 2016

Mencermati tabel 5.3 di atas dapat dijelaskan bahwa anak-anak di Kota Denpasar belum semuanya memiliki akte kelahiran. Dalam hubungan ini, dapat pula dikatakan bahwa orang tua anak yang bersangkutan belum semuanya sesegera mungkin mengurus surat-surat untuk mem-buat akte kelahiran anaknya.

Data dalam tabel 5.3 di atas, jika dicermati lebih teliti lagi, menunjukkan bahwa jumlah anak secara keseluruhan (laki-laki dan perempuan) yang berumur antara 0 – 18 tahun, yang sudah memiliki akte kelahiran jika dibandingkan dengan anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran, tampak tidak menunjukkan selisih angka yang begitu mencolok. Hal ini bisa di-tafsirkan bahwa ada kemungkinan anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran sampai sekarang ini, karena orang tua anak yang bersangkutan masih mengulur-ulur waktu untuk mengurus dan mencari akte kelahiran anaknya. Keadaan ini terjadi karena orang tuanya belum memandang mendesak bagi anaknya untuk memiliki akte kelahiran karena belum mendesak memanfaatkannya. Misalnya, anaknya baru berumur beberapa bulan atau tahun, atau masih dalam proses pengurusan akte kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Denpasar.

Menyadari kondisi sekarang ini dan manfaat akte kelahiran maka orang tua anak yang bersangkutan rupanya tidak akan membiarkan anaknya tanpa memiliki akte kelahiran selamanya karena manfaat akte kelahiran itu sangat banyak. Adapun manfaat akte kelahiran tersebut, antara lain untuk keperluan sekolah, administrasi kependudukan (KTP, KK), pendaftaran pernikahan, pendaftaran pernikahan di KUA, mengurus Hak Ahli Waris, mengurus asuransi, dan mengurus tunjangan keluarga. Oleh karena itu, kepemilikan akte kelahiran bagi seorang anak sangat penting sehingga orang tua tidak sampai hati atau pilih kasih terhadap anaknya berdasarkan jenis kelamin untuk membuat akte kelahirannya.

5.4 Peserta Keluarga Berencana (KB)

Berdasarkan atas fakta sesuai dengan realitas yang teramati di Kota Denpasar dapat dikatakan bahwa khususnya pasangan suami-istri selaku penduduk asli di Kota Denpasar rata-rata sudah menyadari, yaitu menjadi peserta Keluarga Berencana (KB) membawa prospek yang menjanjikan untuk

mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera di hari depan. Keadaan ini dibuktikan berdasarkan atas fakta, akhir-akhir ini relatif jarang yang memiliki anak lebih dari dua orang. Bahkan, pasangan suami istri usia subur, relatif banyak juga yang ditemui memiliki anak satu orang, walaupun pasangan tersebut belum puas hanya memiliki anak satu orang saja.

Pernyataan di atas secara kuantitas didukung oleh data mengenai jumlah peserta KB tahun 2016 di Kota Denpasar. Secara rinci peserta KB di Kota Denpasar seperti tampak pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Jumlah Peserta KB di Kota Denpasar Tahun 2016

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif	
			Jumlah	%
Denpasar Selatan	Puskesmas I Densel	10.133	8.467	83,6
	Puskesmas II Densel	5.287	4.412	83,4
	Puskesmas III Densel	3.368	2.748	81,6
	Puskesmas IV Densel	2.099	1,831	87,2
Denpasar Timur	Puskesmas I Dentim	8.319	6.856	82,4
	Puskesmas II Dentim	10.585	8.312	78,5
Denpasar Barat	Puskesmas I Denbar	11.784	9,961	84,5
	Puskesmas II Denbar	12.347	9,795	79,3
Denpasar Utara	Puskesmas I Denut	6.095	4,343	71,3
	Puskesmas II Denut	8.238	6,557	79,6
	Puskesmas III Denut	7.920	6,404	80,9
Jumlah		86.175	69,686	80,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2016

Berdasarkan atas wawancara di lapangan, kebanyakan pihak istri yang menggunakan kontrasepsi, sedangkan jika pihak suami yang menggunakan

alat kontrasepsi, biasanya memilih penggunaan kondom. Jadi, resiko yang dialami oleh pihak laki-laki selaku suami sangat kecil dibandingkan oleh pihak perempuan selaku istrinya.

Dari Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa di Kota Denpasar tahun 2016 jumlah PUS sebanyak 86.175 orang sementara peserta KB aktif sebanyak 69.686 orang. Jumlah sebanyak itu tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Denpasar yaitu Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara. Dari 4 kecamatan yang PUS yang tertinggi terjadi di Kecamatan Denpasar Barat, di Puskesmas II, dengan jumlah PUS 12.347 orang, sedangkan peserta KB aktif berjumlah 9.795 orang. Sementara PUS yang sedikit terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan, pada puskesmas IV, dimana jumlah PUS hanya 2.099 orang, sedangkan peserta KB aktif jumlahnya 1.831 orang. Sementara pada 3 kecamatan yang lainnya dimana kondisi PUS dan peserta KB aktif menunjukkan hampir tidak ada perbedaan yang sangat menonjol.

Data yang tertera pada table di atas tidak bias dianalisis dari perspektif gender karena data yang ada tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin. Namun demikian dari hasil pendataan tahun-tahun sebelumnya, secara umum persoalan KB masih tetap menjadi persoalan gender yang belum terpecahkan karena dapat dipastikan jumlah peserta KB di Kota Denpasar masih didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh Kabupaten di Bali. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan alat kontrasepsi yang tersedia untuk kaum laki-laki.

Kota Denpasar, 201

5.5 Jumlah Tenaga Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh banyak faktor, salah satu di antaranya, yaitu jumlah ketersediaan tenaga kesehatan. Berdasarkan atas suatu asumsi semakin

banyak ketersediaan jumlah tenaga kesehatan semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung pembangunan kesehatan perlu diusahakan secara memadai.

Di Kota Denpasar yang menjadi Ibu Kota Provinsi Bali rupanya sarana dan prasarana pendukung untuk menyukseskan keberhasilan pembangunan kesehatan di empat kecamatan yang termasuk wilayah Kota Denpasar telah memadai. Buktinya, di Kota Denpasar ini telah dibangun dua unit rumah sakit negeri dan sejumlah rumah sakit swasta. Bahkan, di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, ada unit pelayanan bertaraf internasional. Dengan demikian, rumah sakit yang di Daerah Tingkat II (di luar Kota Denpasar) acapkali merujuk pasiennya untuk berobat ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar di Jln. Nias Denpasar.

Dari segi ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di Denpasar, baik di rumah sakit maupun di puskesmas tidak menjadi masalah yang bersifat prinsipial. Hal ini disebabkan di Kota Denpasar terdapat perguruan tinggi (Unud dan Unwar) yang menghasilkan lulusan berprofesi menjadi dokter. Di lain pihak, Universitas Saraswati Denpasar juga menghasilkan lulusan strata 1 (S1) yang berprofesi menjadi dokter gigi. Khusus di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tidak saja menghasilkan lulusan dokter jenjang S1, juga menghasilkan dokter spesialis dan dokter ahli. Selain itu, masih ada politeknik kesehatan yang menghasilkan lulusan jenjang strata 1 dan diploma.

5.5.1 Dokter Umum

Saat ini eksistensi dokter umum sangat diperlukan di masyarakat. Namun tampaknya keberadaan tenaga kesehatan ini masih sulit untuk bias menjangkau semua wilayah terutama di pedesaan. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga medis ini masih relative terbatas, lebih lebih di daerah pedesaan. Terkait keberadaan dokter umum di Kota Denpasar seperti tampak pada Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.5 Jumlah Dokter Umum (IDI) yang ada di Kota Denpasar Tahun 2015 dan 2016

Tempat Tugas	2015		Jumlah	2016		Jumlah
	Dokter Umum			Dokter Umum		
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
Dikes,UPT PFM,Puskesmas	11	29	40	10	30	40
RS Pemerintah dan Swasta	85	134	219	116	192	308
Total	96	163	259	146	222	348

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2017

Mencermati tabel 5.4 tersebut di atas dimana pada tahun 2015 terdapat 259 orang dokter umum, baik yang bertugas di Dikes, UPT PFM, Puskesmas maupun RS Pemerintah dan Swasta. Jumlah tersebut terdiri dari 96 dokter laki-laki dan 163 dokter perempuan. Jumlah ini tampak meningkat pada tahun 2016, dimana pada tahun 2016 terdapat dokter umum 348 orang, yang terdiri dari 146 orang laki-laki dan 222 orang perempuan. Secara keseluruhan terdapat kenaikan jumlah tenaga kesehatan di Kota Denpasar. Dilihat dari perspektif gender baik tahun 2015 maupun tahun 2016 tenaga kesehatan didominasi oleh perempuan. Ini mencerminkan bahwa keterlibatan perempuan di bidang tenaga kesehatan sangat tinggi. Ini berarti perempuan sudah dapat bersaing dan bahkan melampaui laki-laki. Ini sungguh mengembirakan dan patut disyukuri.

5.5.2 Dokter Gigi

Selain dokter umum, dokter gigi juga memegang peranan sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat khususnya tentang kesehatan gigi. Dokter gigi di Kota Denpasar dapat dilihat dalam tabel 5.5 berikut ini.

Tabel: 5.6 Jumlah Dokter Gigi (IDI) yang ada di Kota Denpasar Tahun 2016

Tempat Tugas	2015			2016		
	Dokter Gigi			Dokter Gigi		
	L	P	Jmh	L	P	Jmh
Dikes,UPT PFM,Puskesmas	6	26	32	6	26	32
RS Pemerintah dan Swasta	15	33	48	99	73	172
Total	21	59	80	105	99	204

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2017

Mencermati tabel 5.5 tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam dua tahun terakhir peningkatan jumlah dokter gigi di Kota Denpasar dari 80 orang di tahun 2015 meningkat menjadi 204 orang pada tahun 2016 yang bertugas di Dikes, UPT PFM, Puskesmas dan RS Pemerintah dan Swasta. Dari jumlah 80 orang pada tahun 2015 didominasi oleh perempuan yakni 21 orang dan hanya 59 orang laki-laki, sementara pada tahun 2016, dari jumlah 204 orang, terdiri dari 105 orang laki-laki dan 99 orang perempuan. Dilihat dari perspektif gender, menunjukkan bahwa jumlah dokter gigi perempuan lebih banyak dibandingkan dokter gigi laki-laki.

5.5.3 Dokter Spesialis

Selain dokter umum dan dokter gigi, dokter spesialis juga sangat berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dokter spesialis sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota Denpasar. Keberadaan dokter spesialis di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut ini.

Tabel 5.7 Jumlah Dokter Spesialis yang ada di Kota Denpasar Tahun 2016

Tempat Tugas	2015		Jlh	2016		
	Dokter spesialis			Dokter spesialis		
	L	P		L	P	
RS Tk II Udayana	7	1	8	11	2	13
RS Polda Bali	17	3	20	16	3	19
RSUP Sanglah	126	57	183	204	100	304
RS Puri Raharja	51	16	67	50	15	65
RS Dharma Yadnya	3	1	4	8	1	9
RS Kasih Ibu Denpasar	52	21	73	53	22	75
RS Bakti Rahayu	19	8	27	29	11	40
RS Bali Med	77	35	112	74	34	108
RS SuryaHusada Ubung	20	8	28	17	8	25
RS BROS	78	16	94	68	37	105
RS Puri Bunda	26	14	40	25	17	42
R.S Mata RSBM				5	6	11
RSUD Wangaya				31	13	44
RS Manuaba				22	14	36
Harapan Bunda				9	3	12
RS Puri Raharja				50	15	65
RS Prima Medika				3	1	4
Total	476	180	656	685	302	987

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2017

Tabel 5.6 tersebut di atas tampak jelas menunjukkan keberadaan jumlah dokter spesialis di Kota Denpasar tahun 2015 dan 2016. Secara keseluruhan jumlah dokter spesialis tahun 2015 ada 656 orang yang terdiri dari 476 laki-laki dan 180 perempuan. Ini mencerminkan bahwa pada tataran dokter spesialis didominasi oleh dokter spesialis laki-laki. Jumlah dokter spesialis paling banyak bertugas di RS Sanglah yakni 183 orang yang terdiri dari 126 orang laki-laki dan 57 orang perempuan, sedangkan jumlah dokter spesialis yang paling sedikit bertugas di RS Dharma Yadnya yaitu hanya 4 orang dokter spesialis, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan satu orang perempuan. Pada tahun 2016 secara keseluruhan jumlah dokter spesialis mengalami penambahan sebanyak 331 orang,

Jumlah dokter spesialis yang bertugas pada beberapa rumah sakit seperti tersebut di atas dilihat dari perspektif gender, kurang memuaskan karena terdapat kesenjangan gender yang signifikan. Kondisi demikian apa karena jumlah dokter spesialis perempuan memang sedikit atau memang factor lain, ini juga memerlukan kajian yang mendalam.

BAB VI EKONOMI

Keberadaan Kota Denpasar yang berstatus pula sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, sekali-gus menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, dan pusat pariwisata sehingga berkembang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Bali. Penetapan Kota Denpasar menjadi pengembangan pembangunan ekonomi di Bali bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Implikasi penetapan ini dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Bali secara merata sehingga kesenjangan kehidupan warga masyarakat di bidang ekonomi tidak berbeda secara tajam. Dalam konteks ini, sumber daya manusia (SDM) atau *human resources* mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Denpasar.

Pada garis besarnya, pengertian sumber daya manusia (SDM) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, men-cerminkan sumber daya berkualitas untuk memproduksi jasa dan barang yang berkualitas pula yang diberikan oleh seseorang. Kedua, SDM berkaitan dengan manusia yg mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dalam hal ini, usia kerja dipandang mampu bekerja. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja ini dinamakan tenaga kerja atau *manpower* (Simanjuntak, 1985). Dalam konteks ini, SDM manusia yang dimanfaatkan dalam proses produksi untuk memberikan jasa atau usaha kerja tidak membedakan ber-dasarkan atas indikator jenis kelamin, kecuali suatu pekerjaan yang secara khusus memerlukan energi dan kekuatan fisik yang mampu dikerjakan oleh salah satu jenis kelamin saja. Pada dasa warsa terakhir ini, SDM yang tersedia di Kota Denpasar, yang berjenis kelamin perempuan, baik secara kuantitas maupun kualitas tidak kalah bersaing dengan SDM berjenis kelamin laki-laki. Keadaan ini tercipta karena angkatan kerja, mulai dari berpendidikan sekolah menengah dan berpendidikan tinggi relatif mudah

diperoleh di Kota Denpasar karena Kota Denpasar juga menjadi pusat pendidikan di Bali.

Dengan demikian, pelaksanaan sensus ekonomi menjadi sangat signifikan untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan ekonomi angkatan kerja dengan menanyakan tentang lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan penduduk yang bekerja. Variabel tersebut dikaitkan dengan variabel ekonomi seperti tingkat dan laju GNP (*Gross National Product*/Produk Nasional Bruto) per kapita dan alokasi GNP per sektor. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor.

Di sini, tidak saja terjadi persaingan secara vertikal antara orang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan sedang, dan berpendidikan rendah dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, di antara mereka juga mulai tampak terjadi persaingan secara horizontal, antara orang berjenis kelamin laki-laki dengan berjenis kelamin perempuan. Beberapa tabel dan gambar di bawah ini, menunjukkan tentang pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor sebagai berikut.

6.1 Kegiatan Utama Penduduk

Fakta menunjukkan bahwa pengalihan fungsi lahan di wilayah Kota Denpasar semen-tara ini tidak terbandung, yaitu dari lahan pertanian menjadi nonpertanian. Lahan pertanian yang beralih fungsi ini didominasi menjadi tempat pemukiman penduduk sehingga desa-desa di Kota Denpasar seluruhnya sudah mengota. Kondisi ini mencerminkan bahwa kaum migran, baik yang berasal dari daerah Bali maupun luar Bali berbondong-bondong ke Bali dan sebagian hidup menetap di Bali. Pekerjaan yang ditekuni oleh kaum migran di sini pada umumnya di sektor informal.

Di sisi lain, warga lokal Kota Denpasar sangat selektif memilih pekerjaan yang di-jadikan mata pencaharian hidupnya. Pada dekade ini generasi muda Kota Denpasar sangat jarang yang menekuni profesi menjadi petani sehingga pemilik lahan pertanian merasa kesulitan mencari penggarap

atau penyakap. Sementara ini, di wilayah Kota Denpasar relatif banyak lahan pertanian yang belum beralih fungsi yang tampak terbengkalai karena tidak ada yang menggarap. Dewasa ini pula tampak kecenderungan warga lokal Kota Denpasar memilih bekerja di kantor, bank, hotel, restoran, perusahaan, dan tempat-tempat wisata. Selain itu, semakin bertambah banyak juga generasi muda warga lokal Bali yang bekerja di luar negeri dan menjadi karyawan di kapal pesiar.

Sebaliknya, kaum migran yang datang ke Kota Denpasar, terutama yang berbekal pendidikan dan keterampilan seadanya justru tidak begitu memilih pekerjaan di sektor informal yang diabaikan oleh generasi muda warga Kota Denpasar. Misalnya, menjadi buruh, tukang batu, tukang gali tanah, pedagang kaki lima keliling, dan pekerjaan *serabutan* lainnya.

Dengan semakin bertambah banyaknya migran yang menetap dan bekerja atau mengais rejeki di Kota Denpasar menyebabkan penduduk Kota Denpasar menjadi heterogen, baik dari segi etnis, ras, agama, maupun pekerjaan. Dengan demikian, derajat persaingan terutama untuk mendapatkan pekerjaan relatif tinggi, baik di sektor formal maupun informal. Di Kota Denpasar, daya beli masyarakat menjadi relatif tinggi sehingga secara kuantitas mempengaruhi juga pemanfaatan tenaga manusia di sektor informal, antara lain semakin banyak yang menekuni profesi sebagai pedagang dan karyawan di suatu perusahaan.

Dari perspektif gender, bila menekuni pekerjaan terutama di sektor informal, tidak terjadi suatu ketimpangan yang begitu menonjol dalam hal pemilihan tenaga manusia berdasarkan pertimbangan jenis kelamin. Kecuali pekerjaan yang secara khusus memerlukan suatu kekuatan yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Misalnya, menjadi buruh bangunan yang sering bekerja mengangkat atau memindahkan bahan-bahan bangunan yang berat dan menggunakan alat-alat berat pula. Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis pekerjaan penduduk yang berhasil dihimpun oleh tim peneliti.

6.2 Juru Parkir

Warga Kota Denpasar, baik lokal maupun pendatang dalam beberapa dasa warsa terakhir ini, jika bepergian ke suatu tempat di Kota Denpasar dan sekitarnya cenderung mengendarai kendaraan bermotor roda dua atau mobil

pribadi. Mereka memandang menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian ke suatu tempat lebih praktis dan ekonomis daripada menggunakan angkutan kota (angkot), taksi, ojek, bis, dan sejenisnya. Dampaknya, angkutan kota di Denpasar mengalami kesulitan mencari atau menemui penumpang. Di sisi lain, arus lalu lintas di jalan-jalan Kota Denpasar menjadi padat, dan beresiko tinggi bagi keselamatan pengguna jalan.

Kecenderungan warga Kota Denpasar memanfaatkan angkutan kota dan sejenisnya semakin rendah, sehingga muncul kecenderungan menggunakan kendaraan pribadi menyebabkan pemilik kendaraan di kota ini secara kumulatif sangat tinggi. Masing-masing individu di setiap rumah tangga, mulai dari usia sekolah (SMU) sampai dengan berusia produktif yang sering bepergian, baik untuk urusan kerja maupun rumah tangga pada umumnya memiliki kendaraan roda dua. Keadaan ini membawa implikasi terhadap penciptaan lapangan kerja, terutama menjadi juru parkir.

Fakta menunjukkan bahwa hampir setiap ada warung dan toko yang relatif ramai dikunjungi oleh pembeli dijumpai adanya juru parkir. Dalam hal ini, belum terhitung relatif banyaknya terdapat tempat hiburan, tempat wisata, supermarket, minimarket, dan sejenisnya yang memerlukan jasa juru parkir di wilayah Kota Denpasar, baik dalam kota maupun di pinggiran kota. Peranan juru parkir ini memang sangat signifikan untuk mengatur penempatan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat sehingga kendaraan yang terparkir tersebut tertata rapi dan lalu lintas tetap berjalan lancar. Selain itu, penitip kendaraan di tempat parkir tersebut perasaannya menjadi tenang karena tidak merasa khawatir akan kehilangan helm, kendaraan, atau komponen kendaraannya.

Sehubungan dengan hal ini, adanya korelasi positif antara jumlah kendaraan bermotor roda dua dan mobil dengan kepadatan arus lalu lintas di jalan dan kebutuhan juru parkir, baik di dalam kota maupun pinggiran Kota Denpasar. Ini artinya, semakin meningkat jumlah orang yang menggunakan kendaraan pribadi maka semakin meningkat pula diperlukan tempat parkir dan juru parkir kendaraan di wilayah Kota Denpasar. Tabel 6.1 di bawah ini menunjukkan jumlah juru parkir di tepi jalan umum dan pelataran menurut jenis kelamin pada tahun 2015 dan 2016.

Tabel 6.1 Jumlah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pelataran menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 dan 2016

Kecamatan	2015			2016		
	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
Denpasar Selatan	94	1	95	82	1	83
Denpasar Timur	89	2	91	89	2	91
Denpasar Barat	76	4	80	78	2	80
Denpasar Utara	92	1	93	95	0	95
Pelataran (Swalayan)	96	11	107	86	13	99
RSUP Sanglah	37	11	48	35	11	46
RS Wangaya	15	3	18	8	0	8
Total	499	33	532	473	29	502

Sumber: Kantor PD Parkir Kota Denpasar, 2016

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa juru parkir di Kota Denpasar paling banyak dibutuhkan di pelataran swalayan, baik yang terjadi pada tahun 2015 maupun tahun 2016, yaitu masing-masing 107 orang dan 99 orang. Demikian pula, di pelataran rumah sakit dibutuhkan juru parkir dalam jumlah relatif banyak. Misalnya, pada tahun 2015 jumlah juru parkir di RSUP Sanglah dan RS Wangaya masing-masing 35 orang dan 8 orang. Sementara ini, jumlah juru parkir yang bertugas di masing-masing wilayah kecamatan di Kota Denpasar, tidak menunjukkan ketimpangan yang begitu signifikan.

Sampai saat ini, profesi sebagai juru parkir lebih banyak ditekuni atau didominasi oleh kaum laki-laki. Sebagai buktinya, yaitu pada tahun 2015 jumlah juru parkir di Kota Denpasar berkisar 532 orang, sementara tahun 2016 berjumlah 502 orang. Juru parkir ini tersebar hampir merata di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Utara, dan Kecamatan Denpasar Barat.

Perbandingan antara juru parkir laki-laki dan juru parkir perempuan, yaitu per-bedaan angkanya sangat mencolok. Keadaan ini bisa dimaklumi karena menjadi juru parkir harus pula mempunyai tenaga yang kuat dan prima. Di sini dibutuhkan tenaga kuat dan prima oleh juru parkir, terutama untuk mengatur kendaraan roda dua, yaitu untuk menggeser dan atau memindahkan kendaraan di tempat parkir. Ini terjadi karena pengendara kendaraan bermotor roda dua relatif banyak yang kelihatan kurang disiplin menaruh/menjongkrak kendaraannya di areal parkir sehingga perlu diatur kembali letak-nya agar

kelihatan teratur dan tidak mengganggu orang lalu-lalang di sekitarnya. Keadaan seperti inilah yang menjadi pertimbangan bagi kaum perempuan untuk memutuskan pilihan menjadi juru parkir sehingga jumlah juru parkir di kalangan kaum perempuan relatif sedikit sementara ini.

6.3 Petugas Kebersihan

Sebuah pepatah mengatakan “hidup bersih pangkal kesehatan”. Konsepsi atau ide-ide hidup bersih dan sehat ini menjadi nilai budaya yang meresapi bagian terbesar bagi warga masyarakat Kota Denpasar. Oleh karena itu, Pemerintahan Kota Denpasar menciptakan suatu slogan: “Kota Denpasar BERSERI (Bersih, Sehat, Rindang, dan Indah) yang berwawasan budaya”. Dengan terciptanya slogan ini diharapkan pemandangan Kota Denpasar menjadi bersih, sehat, rindang, dan indah sehingga warga masyarakat akan merasa nyaman dan sehat. Demikian pula, pengunjung dan wisatawan yang berkunjung atau *tour* ke Kota Denpasar meninggalkan kesan dan kenangan yang baik selama berada di Pulau Dewata.

Untuk mewujudkan Kota Denpasar “BERSERI” yang berwawasan budaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar menjadi ujung tombaknya, yang berwenang mengatur petugas kebersihan untuk menunaikan tugasnya setiap hari, yaitu menyapu, me-ngumpulkan, dan mengangkut sampah organik dan anorganik ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Daerah Pesanggaran Denpasar Selatan. Sampah organik dan anorganik yang terdapat di Kota Denpasar, terutama berasal dari sampah rumah tangga dan pedagang. Selain itu, pepohonan yang terdapat di pinggir-pinggir jalan raya di seputar Kota Denpasar juga menghasilkan sampah organik, yang setiap hari harus disapu, dikumpulkan, dan diangkut ke tempat pembuangan akhir. Untuk itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sudah memiliki petugas kebersihan dan pegawai yang sehari-harinya secara khusus menangani sampah di lapangan dalam upaya menjaga kebersihan Kota Denpasar. Tabel 6.2 menunjukkan jumlah petugas kebersihan dan pertamanan di Kota Denpasar.

Tabel 6.2 Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pertamanan di Kota Denpasar tahun 2015 dan 2016

Kecamatan	2015			2016		
	L	P	Jlh	L	P	Jlh
Denpasar Utara	270	97	367	272	98	370
Denpasar Timur	302	166	468	305	168	473
Denpasar Selatan	261	92	353	263	94	357
Denpasar Barat	274	100	374	277	103	380
Jumlah 2013	1107	455	1562	1117	462	1579

Sumber: DKP Kota Denpasar, 2017

Pada garis besarnya, petugas kebersihan yang bertugas sehari-hari untuk menjaga kebersihan Kota Denpasar dapat dibedakan menjadi tiga bagian: sopir truk, juru menaikkan sampah, dan juru sapu. Dalam hal ini, juru sapu inilah secara mayoritas ditekuni oleh kaum laki-laki dan perempuan, sedangkan supir dan juru menaikkan sampah ke kendaraan angkut hanya ditekuni oleh kaum laki-laki saja karena memerlukan tenaga yang relatif kuat dan prima. Oleh karena itu, pada tahun 2015 dan 2016 terjadi perbandingan yang mencolok antara petugas kebersihan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Pekerjaan di bidang ini sesungguhnya tidak memerlukan pendidikan relatif tinggi, namun nyatanya orang yang berpendidikan SMU relatif banyak melamar dan telah diterima menjadi petugas kebersihan yang tugasnya sehari-hari berhubungan dengan sampah di lapangan. Misalnya, menjadi tukang menaikkan dan menurunkan sampah di tempat penampungan sampah. Petugas kebersihan yang memiliki pendidikan SMU atau sarjana misalnya, hanya pekerjaan yang ditekuninya ini hanya untuk mengisi waktu kosong, sambil mencari pekerjaan di tempat lain. Prinsipnya, yang penting pekerjaan ini hahal dan mendatangkan duit, daripada hanya tinggal di rumah tanpa mengerjakan pekerjaan apa pun.

6.4 Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata

Tidak dipungkiri lagi bahwa perkembangan pariwisata di Bali umumnya dan di Kota Denpasar khususnya telah mampu membuka peluang kerja bagi

masyarakat lokal maupun masyarakat luar Bali. Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan *World Tourism Organization* (WTO), telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 1997, merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi masyarakat pariwisata Indonesia untuk melakukan *re-positioning* sekaligus *re-vitalization* kegiatan pariwisata Indonesia (<http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto>)

Perkembangan pariwisata pun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi rakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau *community-based tourism development* (<http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto> ...)

Untuk Kota Denpasar, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan, walaupun telah terjadi beberapa kali tekanan dalam bentuk teror bom yang mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Akan tetapi sector ini masih cukup potensial menjadi andalan Provinsi Bali. Akibat yang ditimbulkan dari penurunan jumlah kunjungan memang cukup berdampak luas, terutama pada berkurangnya usaha-usaha yang mendukung pariwisata. Dengan demikian juga sangat berdampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerjanya. Tabel berikut menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap di bidang-bidang usaha yang terkait dengan pariwisata seperti hotel dan restoran yang ada di wilayah Denpasar.

Tabel 6.3 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata di Kota Denpasar tahun 2015

Jenis Usaha	2015		
	L	P	Jumlah
Hotel Berbintang	3.076	1.077	4.135
Hotel Melati	1.735	877	2.612
Pondok Wisata	231	126	357
Panti Pijat	34	211	245
Karaoke	509	127	636
Fitness Centre	42	46	88
Total	5.627	2.454	8.081

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2016

Dilihat dari Tabel 6.3 di atas tampak bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap didominasi oleh jenis usaha hotel berbintang dan hotel melati, disusul kemudian oleh jenis usaha lainnya antara lain panti pijet, karaoke dan *fitness centre*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jenis usaha ini merupakan sarana utama pendukung pariwisata untuk memenuhi kebutuhan utama wisatawan. Jika dicermati lebih jauh jumlah tenaga kerja, pada jenis usaha hotel maka tampak tenaga kerja yang terserap didominasi laki-laki kecuali usaha panti pijat yang didominasi oleh perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa sampai saat ini memang masih ada pemahaman bahwa suatu pekerjaan tertentu pantas dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, artinya nilai gender masih tetap langgeng di masyarakat namun sudah mulai menunjukkan suatu perubahan. Hal ini bias dibuktikan dengan mulai banyaknya tenaga kerja perempuan yang terserap di hotel berbintang pada saat ini meskipun secara kuantitas belum setara dengan jumlah tenaga laki-laki. Pada jaman dulu orang menganggap perempuan tidak pantas bekerja di hotel karena itu dianggap ranahnya laki-laki. Untuk bidang kerja panti pijat lebih banyak ditekuni oleh tenaga kerja perempuan karena bidang ini memerlukan ketelatenan sehingga perempuan dianggap lebih pantas mengerjakannya.

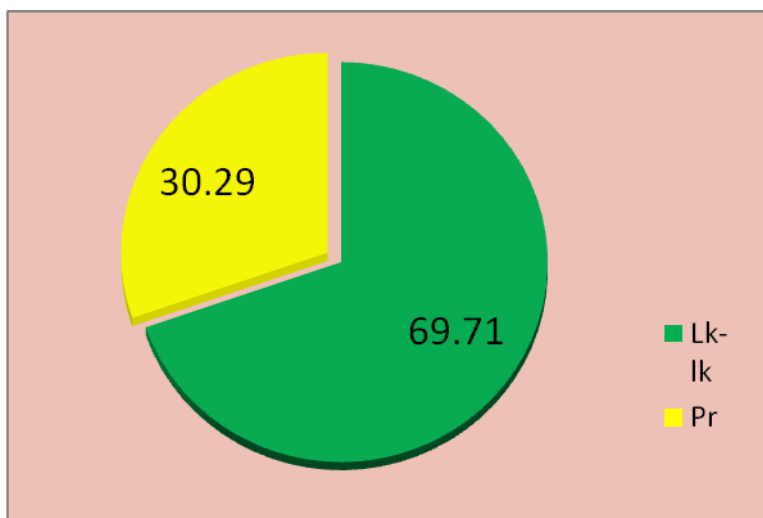
Di samping jumlah wisman yang makin meningkat, saat ini pun telah terjadi perubahan *consumers-behaviour pattern* atau pola konsumsi dari para wisatawan . Mereka tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati *sun-sea and sand*, tetapi saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih tinggi, yang meskipun tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat yakni menikmati produk atau kreasi budaya (*culture*) dan peninggalan sejarah (*heritage*) serta *nature* atau eko-wisata dari suatu daerah atau negara (<http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto>)

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa, di bidang budaya harus dirintis kembali pengembangan dan peningkatan kehidupan kebudayaan di kalangan masyarakat secara rutin dan berkesinambungan diberbagai tingkatan daerah mulai dari desa sampai ke perkotaan, dan tidak lagi dipusatkan hanya di Pusat ataupun di ibu kota propinsi saja. Seandainya pun Pemerintah memiliki dana cukup dan akan membantu kegiatan-kegiatan kesenian, hendaknya hanyalah bersifat “ *start-up* ” saja untuk menggulirkan kegiatan tersebut pada tahap-tahap awal. Sedangkan untuk selanjutnya harus dapat dikembangkan sendiri

oleh masyarakat secara swadaya. Hal ini akan dapat tetap melestarikan kesenian dan dapat mendukung Kota Denpasar sebagai kota berwawasan budaya.

Jika dilihat dari perspektif gender, maka perbandingan persentase tenaga kerja laki-laki dan perempuan di sektor pariwisata tampak seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 6.1 Persentase Tenaga kerja Laki-laki dan Perempuan yang Terserap di Sektor Pariwisata di Kota Denpasar Th.2015



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2016

6.5 Tenaga Kerja Restoran/RM

Restoran atau rumah makan merupakan salah satu sarana penting pendukung perkembangan pariwisata. Oleh karena itu di Provinsi Bali pada umumnya dan di Kota Denpasar khususnya restoran/rumah makan, merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh pengusaha. Hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa Bali merupakan pusat pariwisata di Indonesia, sehingga untuk memenuhi kebutuhan akomodasi kedatangan wisatawan baik mancanegara maupun domestik sangat membutuhkan jasa boga ini.

Bertolak dari prospek ini, usaha ini berkembang cukup pesat. Jika dilihat dari data per kecamatan, maka Denpasar Selatan menempati jumlah terbanyak dalam penyerapan tenaga kerja di bidang usaha jasa boga ini. Bahkan

perbedaan jumlahnya sangat signifikan, dibanding tiga kecamatan yang lain. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya jumlah konsumen yang memerlukan jasa boga. Table 6.4 menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap pada usaha jasa boga di kota Denpasar seperti berikut ini.

Tabel 6.4 Tenaga Kerja yang diserap pada Bidang Usaha Restoran dan Rumah makan Menurut Jenis Kelamin.

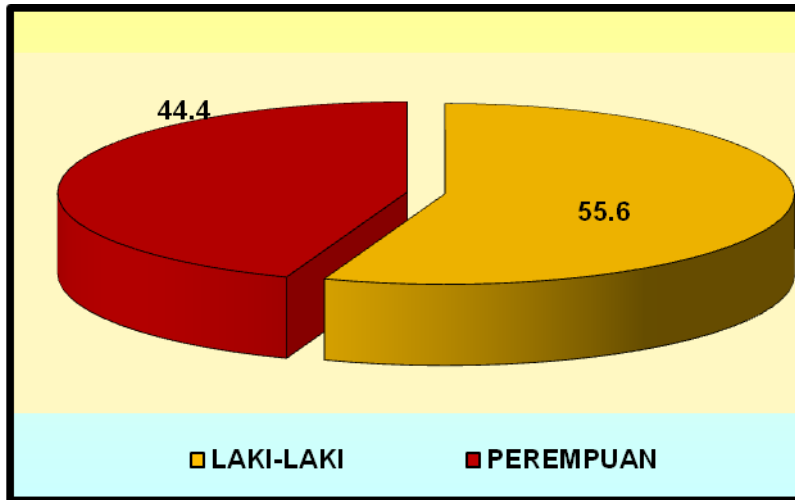
Kecamatan	2015		
	Lk-lk	Pr	Jml
Denpasar Selatan	1.439	1.385	2.824
Denpasar Timur	670	674	1.314
Denpasar Barat	678	658	1.336
Denpasar Utara	256	321	577

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2016

Dilihat dari tabel tersebut di atas tampak bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap berdasarkan atas jenis kelamin, Di kecamatan Denpasar Barat menunjukkan prosentase jumlah yang cukup proporsional antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Sedangkan di tiga (3) kecamatan lainnya, menunjukkan range 41% sampai 49% untuk tenaga kerja laki-laki dibandingkan range 51% sampai 59% tenaga kerja perempuan. Walaupun terjadi perbedaan dalam hal jumlah tenaga kerja perempuan dan laki-laki akan tetapi perbedaannya tidak terlalu mencolok, sehingga dapat dikategorikan cukup responsive gender di bidang ini. Hal ini sepertinya erat kaitannya dengan pandangan bahwa usaha restoran erat kaitannya dengan peran domestik sehingga hal ini menjadi kepentasan perempuan.

Secara persentase perbandingan laki-laki dan perempuan yang terserap di bidang restoran/rumah makan seperti tampak pada gambar berikut ini.

Gambar: 6.2 Persentase Tenaga Kerja yang diserap pada Bidang Usaha Restoran dan Rumah makan Menurut Jenis Kelamin, 2015



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2016

BAB VII

SEKTOR PUBLIK

Fakta menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia secara aktif memberikan sumbangsih mereka terhadap perekonomian nasional maupun rumah tangga melalui kerja produktif dan reproduktif mereka. Namun kenyataannya kaum perempuan masih kurang dilibatkan dalam berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan di keluarga, masyarakat dan tingkat negara. Di tingkat negara menunjukan kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sektor publik, dan hal ini telah berujung pada pembangunan kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan keistimewaan pada perspektif dan kepentingan kaum lelaki, serta investasi sumber-sumber daya nasional dengan mempertimbangkan keuntungan bagi kaum lelaki. Kondisi semacam ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan nilai sosial budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat.

Setiap masyarakat mengenal nilai-nilai yang dijadikan pedoman di dalam berperilaku. Pada umumnya masyarakat tradisional, mengenal adanya norma-norma, cara pandang atau anggapan bahwa perempuan tidak mempunyai peranan sebagai pengambil keputusan, baik di dalam maupun di luar rumah. Meminjam kerangka pikir Rosaldo tentang hubungan antara perempuan, kebudayaan, dan masyarakat, yang secara tegas membedakan pola kegiatan masyarakat menjadi dua. *Pertama*, kegiatan di sektor domestik adalah untuk perempuan, yaitu kegiatan di lingkungan rumah tangga saja. *Kedua*, kegiatan di sektor publik adalah bidang untuk pria, yaitu kegiatan di luar rumah tangga sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Sampai saat ini dikotomi seperti itu masih berlaku di masyarakat Bali sehingga menimbulkan ketidakadilan gender di berbagai bidang kehidupan seperti di bidang politik, pemerintahan, keamanan, dan lainnya. Hal ini berimplikasi pada keadaan yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan terutama berkaitan dengan partisipasi mereka di sektor publik.

Di tataran normatif sampai saat ini sebenarnya tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin bagi setiap warga negara untuk berperan

di sektor publik. Hal ini dapat dibuktikan dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak membedakan akses antara laki-laki dan perempuan untuk berperan di sector public. Sebutlah misalnya Undang-Undang Dasar 1945 memberi kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di muka hukum dan pemerintahan, memberikan hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta tanggung jawab yang sama pula dalam upaya pembelaan negara (pasal 27). Artinya, tidak membedakan antara warga negara laki-laki dengan perempuan. Ratifikasi Pemerintah Republik Indonesia atas Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) pada tahun 1984. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala perbedaan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam kesempatan berperan di sektor publik.

Untuk memahami bagaimana keterlibatan laki-laki dan perempuan di sektor publik, maka tulisan ini memfokuskan diri pada analisis gender, antara lain melingkupi Keanggotaan DPRD, Pimpinan Partai Politik, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, Anggota KPU, Pegawai Negeri Sipil, Pejabat berdasarkan Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menunjukkan telaah gender di bidang politik. Politik digambarkan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan. Ada anggapan bahwa urusan politik adalah dunianya laki-laki, sedangkan perempuan dianggap kurang pantas memasuki dunia politik itu. Akibatnya sejak jaman dahulu seolah-olah kekuasaan selalu terbuka, buat laki-laki, sebaliknya tertutup bagi perempuan. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia dibarengi dengan kesadaran semua pihak akan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan membuat perempuan mulai terakomodasi dalam kegiatan politik. Di Kota Denpasar keterlibatan perempuan di bidang politik dapat dilihat melalui analisis gender sebagai berikut.

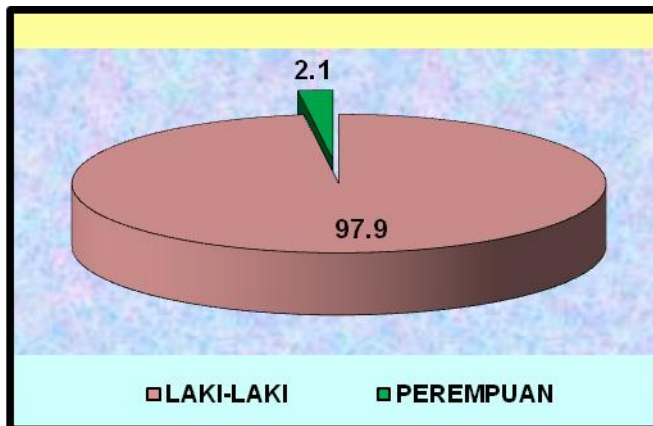
7.1 Legislatif

7.1.1 Keanggotaan DPRD

Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia pada abad ke 21. Meskipun telah ada berbagai konvensi, komitmen internasional, dan komitmen nasional namun kenyataannya secara rata-rata jumlah perempuan yang terlibat di dunia politik masih jauh lebih rendah dibandingkan lawan jenisnya. Di Kota Denpasar gambaran tentang kiprah perempuan dan laki-laki di dunia politik bisa dilihat di salah satu lembaga politik yakni sebagai anggota legislatif.

Partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan publik dapat dilihat dari proporsi mereka pada keanggotaan legislatif. Tabel 7.1 menggambarkan partisipasi perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Denpasar hasil Pemilihan Umum Legislatif, yaitu Pileg 2014 jauh di bawah laki-laki. Malahan menunjukkan kemunduran. Artinya, ada kesenjangan gender yang cukup tajam dalam keanggotaan legislatif di Kota Denpasar seperti tampak pada gambar berikut ini.

Gambar ; 7.1 Proporsi Keanggotaan DPRD menurut Jenis kelamin Periode pemilu 2014-2019



Sumber: KPU Kota Denpasar, 2016

Secara keseluruhan jumlah anggota DPRD Kota Denpasar hasil pemilu legislatif 2014 didominasi oleh laki-laki. Ketimpangan gender sangat tinggi dengan proporsi 97,9% untuk laki-laki dan 2,1% perempuan. Dikatakan demikian karena jumlah anggota DPRD tidak saja menunjukkan ketimpangan

gender, tetapi juga berkurangnya jumlah anggota DPRD perempuan dibandingkan periode sebelumnya.

Fakta menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang duduk dalam keanggotaan DPRD di Kota Denpasar amat kecil. Kondisi ini tentu menarik untuk dicermati, dan sangat penting pula untuk dilakukan upaya agar jumlahnya dapat ditingkatkan lagi. Pekerjaan ini tentu tidak mudah, dibutuhkan kemauan dan perjuangan keras. Sebab untuk dapat masuk sebagai calon anggota legislatif harus melalui sebuah proses politik cukup panjang dan kompleks. Berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diamanatkan rekrutmen atau penjaringan calon anggota legislatif dilakukan melalui partai politik. Oleh karena itu dukungan dari partai politik mutlak diperlukan. Artinya, bilamana seseorang ingin menjadi calon DPRD, dimulai dengan perjuangan agar mereka dapat diterima dan terlibat dalam kepengurusan salah satu partai politik peserta pemilu. Setelah dicalonkan dari partai bersangkutan baru berjuang untuk merebut salah satu kursi pada pemilihan umum legislative. Perjuangan di sini menuntut berbagai pengorbanan seperti pemikiran, tenaga, waktu, dan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Perjuangan yang dirasa cukup berat bagi setiap orang terlebih bagi kaum perempuan.

Kondisi tersebut di atas memperkuat anggapan yang berkembang di masyarakat, seolah-olah membenarkan pandangan bahwa dunia politik itu adalah dunia yang keras, kejam, kotor, dan kasar sehingga tidak cocok dan tidak pantas untuk perempuan. Akibatnya apabila perempuan memasuki dunia politik, maka siap dengan biaya sosial (ejekan, cemoohan, dan lain-lain). Untuk menghapus stigma yang demikian melekat pada perempuan maka perempuan harus berani melakukan terobosan terhadap stigma negatif tersebut dengan dan harus mempunyai kemampuan sumber daya pribadi untuk bersaing masuk pada dunia politik praktis dan bukan mengandalkan kekayaan semata.

7.2 Pengurus Partai Politik

Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi dan institusi strategis yang bisa dijadikan alat untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Intervensi kebijakan *affirmative action* atau tindakan khusus sementara yang

menyeluruh di Undang-Undang tentang partai politik dan pemilihan umum adalah suatu keniscayaan untuk mencapai tujuan di atas. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mencantumkan afirmasi berupa kuota 30 perempuan di kepengurusan, namun keyataannya tidak banyak membawa kemajuan terhadap perempuan di bidang politik. Hal ini dapat dilihat dalam bidang kepengurusan partai.

Untuk itu pada table 7.2 berikut ini dapat ditunjukkan gambaran yang jelas mengenai partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan partai politik di Kota Denpasar. Pada tabel tersebut tersaji data sebagai berikut.

Tabel 7.2 Jumlah Pengurus Partai Politik (Parpol) menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016

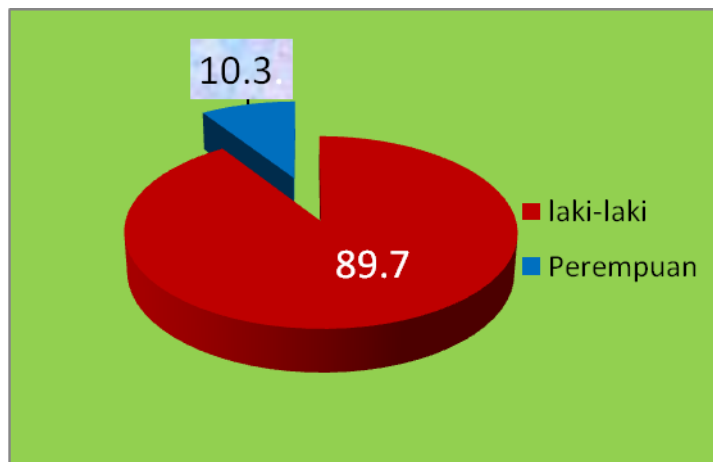
No.	Nama Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3	0	3
2	Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB)	3	0	3
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	2	1	3
4	Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN)	3	0	3
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3	0	3
6	Partai Barisan Nasional (PBN)	3	0	3
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	1	3
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	0	3
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	3
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)	3	0	3
11	Partai Kedaulatan	1	2	3
12	Partai Persatuan Daerah	3	0	3
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	0	3
14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	2	1	3
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM)	3	0	3
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	3	0	3
17	Partai Karya Perjuangan (PKP)	3	0	3
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	3	0	3
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	3	0	3
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	2	1	3
21	Partai Republika Nusantara (PRN)	2	1	3
22	Partai Pelopor	3	0	3
23	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	0	3

24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	2	0	2
26	(PNBK)	3	0	3
27	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	1	3
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	0	2
29	Partai Patriot	2	1	3
30	Partai Demokrat	3	0	3
Jumlah		79	9	88

Sumber: Kantor KPU, Kota Denpasar, 2016

Pada tahun 2016 di Kota Denpasar tercatat 30 partai politik dengan jumlah pimpinan sebanyak 88 orang. Dari jumlah itu terdapat pimpinan laki-laki sebanyak 79 orang dan perempuan 9 orang. Kenyataan ini menunjukkan terjadi dominasi laki-laki dalam pimpinan partai politik. Dominasi ini terjadi di semua partai politik yang ada di Kota Denpasar bahkan beberapa partai politik seperti Hanura, PKPB, PPRN, Gerindra, juga partai politik besar dan berkuasa di Bali yaitu, PDIP dan Golkar sama sekali tidak memiliki pemimpin perempuan.

Gambar: 7.2. Pengurus Partai Politik Di Kota Denpasar Menurut Jenis kelamin Tahun 2016



Sumber: Kantor KPU, Kota Denpasar

Berdasarkan atas data tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi kesenjangan gender dalam kepemimpinan di semua partai politik yang ada di Kota Denpasar. Sesungguhnya data ini juga telah menjelaskan terjadinya ketimpangan gender dalam keanggotaan DPRD. Pertanyaannya kemudian

adalah mengapa partisipasi kaum perempuan dalam pimpinan partai politik di Kota Denpasar sangat rendah? Jawaban terhadap persoalan ini penting diketahui agar ada sebuah gambaran diperoleh yang menyeluruh. Sehingga nantinya dapat dibuatkan suatu rencana aksi untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Tentunya ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan suatu proses panjang selain tenaga, pemikiran, dan dana yang memadai.

7.3 Anggota Panitia Pemilihan

Posisi perempuan dalam memperjuangkan hak politiknya di pemerintahan hingga kini masih menghadapi cukup banyak tantangan. Selain karena derajat keterwakilannya yang masih jauh dibawah ideal, sejumlah tantangan lainnya pun menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah untuk diselesaikan. Untuk memperjuangkan hak-hak politiknya perempuan tidak hanya dituntut agar sekedar berpartisipasi saja, tetapi hendaknya memiliki posisi sebagai pengambil keputusan terkait dengan kepentingan lembaga, misalnya duduk dalam kepengurusan.

Dalam kepengurusan suatu lembaga yang perlu diperhatikan adalah sudahkah lembaga tersebut memberi kesempatan terhadap perempuan menjadi anggota dan atau pimpinan? Kalau pun sudah seringkali ditemukan penempatan perempuan dalam kepengurusan masih bersifat stereotipe. Artinya, perempuan sering ditempatkan pada posisi yang dianggap cocok bagi perempuan seperti sebagai bendahara, seksi konsumsi, atau seksi-seksi lain yang kurang strategis. Sementara itu, posisi yang strategis seperti jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan lainnya selalu menjadi bagian kaum laki-laki. Kedudukan atau posisi dalam kepengurusan di suatu lembaga adalah sangat strategis karena agenda dan keputusan-keputusan penting ditentukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan. Untuk mengetahui partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga politik di Kota Denpasar dapat dilihat pada analisis berikut.

Tabel: 7.3 Jumlah Anggota pemilihan kecamatan (PPK) menurut jenis kelamin di Denpasar tahun 2016

Kecamatan	Pilkada (orang)		
	L	P	Jlh
Denpasar Selatan	5	0	5
Denpasar Timur	5	0	5
Denpasar Barat	3	2	5
Denpasar Utara	4	1	5
Jumlah	17	3	20

Sumber: Kantor KPU Denpasar, 2016

Proporsi laki-laki dan perempuan dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Pileg, Pilpres dan Pilkada di Kota Denpasar tampak seperti pada tabel 7.3 di atas. Melalui tabel 7.3 dapat dijelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2014 di Kota Denpasar ada 3 orang. Sementara laki-lakinya 17 orang. Kenyataan ini menunjukkan terjadinya ketimpangan gender yang sangat menonjol..

Kenihilan perempuan di dalam lembaga ini memang menimbulkan tanda tanya besar. Banyak dugaan yang muncul, apakah karena kualitas perempuan masih dipandang belum memadai atau karena memang perempuan masih belum diberi kesempatan dan akses untuk itu, atau karena perempuan yang tidak mau memanfaatkan kesempatan tersebut atau ada faktor lainnya. Hal ini sangat penting untuk dipertanyakan dan diketahui penyebabnya agar dapat mengukur kemampuan dan partisipasi perempuan di bidang politik.

7.4 Anggota Panitia Pemungutan Suara

Aneka rupa bentuk lembaga politik tempat perempuan mengaktualisasikan dirinya telah tersedia. Selain menduduki posisi penting di dalam kepengurusan lembaga seperti tersebut di atas, partisipasi laki-laki dan perempuan di bidang politik juga dapat dilihat pada keanggotaannya dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS), seperti tampak pada tabel 7.3 berikut.

Memperhatikan data pada Tabel 7.3 dapat dikemukakan bahwa partisipasi perempuan dalam keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) periode 2014-2019 sangat rendah.. Pada 2016 secara keseluruhan anggota

KPPS di Kota Denpasar yang tersebar di empat kecamatan berjumlah 129 orang terdiri atas laki-laki 27 orang dan perempuan 2 orang. Ke dua orang ini ada di wilayah Denpasar Barat..

Tabel: 7.4 Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, tahun 2016

Kecamatan	Tahun 2016 (orang)		
	L	P	Jumlah
Denpasar Selatan	30	0	30
Denpasar Timur	33	0	33
Denpasar Barat	31	2	33
Denpasar Utara	33	0	33
Jumlah	127	2	129

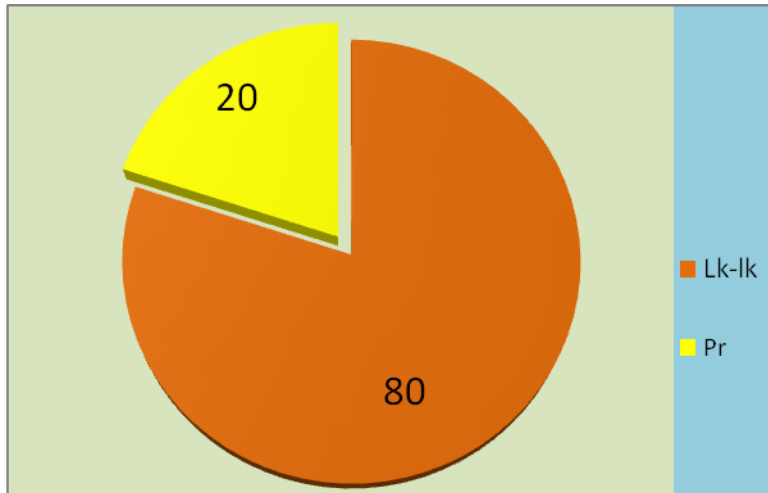
Sumber: Kantor KPU Kota Denpasar

Kenyataan tersebut di atas memang tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, yakni posisi perempuan masih menunjukkan adanya ketimpangan gender di bidang politik. Hal ini juga menegaskan bahwa, baik secara kuantitas maupun kualitas keterwakilan perempuan di bidang politik masih sangat rendah, dan diperlukan usaha-usaha keras untuk mengatasi kondisi ini.

7.5 Anggota KPU

Lembaga politik lain yang bisa menunjukkan partisipasi perempuan di bidang politik adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di Kota Denpasar bagaimana posisi perempuan di dalam keanggotaan KPU dapat dilihat pada gambar 7.3 berikut.

Gambar 7.3 Jumlah Anggota KPU Kota Denpasar Periode 2013-2018.



Sumber : Kantor KPU, Kota Denpasar Tahun 2016

Pada gambar 7.3 di atas menunjukkan bahwa terdapat lima (5) orang anggota KPU pada tahun 2016 yang terdiri atas laki-laki 4 orang dan perempuan 1 orang atau secara persentase 80% : 20%. Suatu proporsi yang cukup timpang. Tentu hal ini perlu dicermati karena sepertinya perempuan dan laki-laki kutang mampu bersaing untuk memperebutkan posisi di dalam keanggotaan KPU ini.

Aktivitas perempuan di bidang publik, selain dapat diamati melalui partisipasinya di bidang politik juga dapat teramati di bidang pemerintahan sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

7.6. Eksekutif.

Eksekutif sebagai aparatur negara mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Peran eksekutif sangat sentral karena mereka inilah yang berfungsi menjalankan pemerintahan. Eksekutif yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mereka yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS, baik yang masih honor maupun yang sudah berstatus sebagai PNS yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Denpasar. Keadaan pegawai negeri sipil di Kota Denpasar akan diuraikan secara rinci seperti berikut ini.

7.6.1 Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjunjung hak-hak perempuan melalui berbagai peraturan. Peran perempuan menjadi semakin publik, kini perempuan menikmati pendidikan yang sama dengan laki-laki dan merupakan bagian yang signifikan dari tenagakerja. Perempuan yang bekerja di pelayanan publik hampir mencapai setengahnya, dan sekarang terdapat lebih banyak perempuan yang duduk di parlemen dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Namun kenyataannya ketimpangan gender tampaknya terjadi hampir di semua lembaga, baik yang terkait dengan kegiatan politik maupun pada lembaga pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7.5 yang menyajikan komposisi pegawai negeri sipil berdasarkan golongan kepangkatan. Secara keseluruhan pegawai negeri sipil di Kota Denpasar berjumlah 8077 orang terdiri atas laki-laki 3.605 orang (44,6%) dan perempuan 4.472 orang (55,4%). Bilamana dirinci berdasarkan kepangkatannya, tampaknya pada golongan kepangkatan I dan II jumlah pegawai negeri sipil (PNS) perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan PNS laki-laki, yaitu laki-laki 1169 dan perempuan 934. Sebaliknya, pada golongan kepangkatan III terutama golongan kepangkatan IV PNS perempuan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki yakni 1.37 berbanding 2.10. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sebagai pegawai negeri sipil sangat tinggi. Selain itu, PNS perempuan juga menunjukkan kemampuan juangnya untuk menapaki kepangkatan tertinggi. Suatu prestasi yang membanggakan bagi semua pihak dan kaum perempuan khususnya.

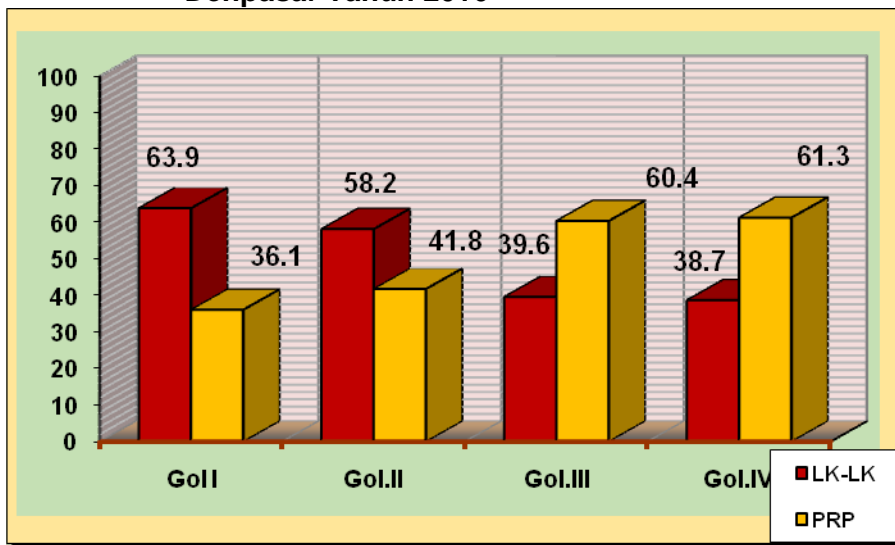
Tabel: 7.5 Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2016

Gol	Jenis Kelamin			
	L	P	Jumlah	%
I	124	70	194	2,61 %
II	902	647	1.549	20,85 %
III	1.067	1.627	2.694	36,26 %
IV	1.158	1.835	2.993	40,28 %
Jmh	3.251	4.179	7.430	100,00 %

Sumber: Laporan Data Pegawai Kota Denpasar, 2016

Jika dicermati sesuai dengan data yang tersaji pada tabel 7.6 di atas bahwa secara kuantitas partisipasi perempuan memang cukup tinggi, bahkan melebihi dari partisipasi laki-laki. Secara logika juga menunjukkan pegawai negeri perempuan memiliki peluang yang lebih banyak untuk menduduki jabatan strategis atau eselon di pemerintahan. Dikatakan demikian karena memang jumlah mereka jauh lebih banyak terutama yang memiliki golongan kepangkatan IV yang notabene golongan kepangkatan ini yang mendapat peluang luas untuk menduduki jabatan eselon. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal ini dapat dilihat pada Tabel 7.4 di bawah ini. Namun sebelumnya penting dilihat perbandingan persentase PNS menurut golongan kepangkatannya seperti tampak pada gambar 7.4 berikut ini.

Gambar: 7.4 Perbandingan Persentase Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan menurut Golongan Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2016



Sumber: BKD Kota Denpasar, 2016

7.7 Pejabat Berdasarkan Eselon

Meskipun jumlah PNS perempuan jauh lebih tinggi daripada PNS laki-laki yang memiliki golongan kepangkatan IV dan secara logika PNS perempuan memiliki peluang lebih banyak untuk menduduki jabatan eselon dibandingkan laki-laki, tetapi rupanya tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7.5 berikut. Secara keseluruhan jumlah pegawai negeri sipil di Kota Denpasar yang memiliki jabatan eselon (IIa s/d Va) sebanyak 830

orang terdiri atas laki-laki 472 orang (56.9%) dan perempuan 358 orang (43.1%).

Tabel 7.6 Jumlah Pejabat berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016

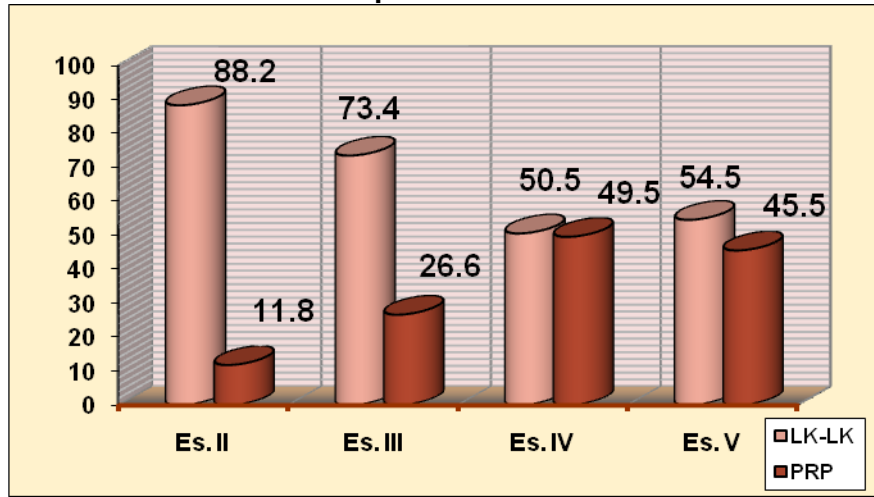
Eselon	2016		
	L	P	Jumlah
II a	1	0	1
II b	29	4	33
III a	40	11	51
III b	87	35	122
IV a	237	246	483
IV b	72	57	129
V a	6	5	11
Jumlah	472	358	830

Sumber: Laporan Data Pegawai Kota Denpasar, 2015

Apabila dirinci, tampak bahwa pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon II (IIa dan IIb) jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki. Data ini menunjukkan kewajaran karena memang jumlah pegawai perempuan pada golongan kepangkatan I dan II lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Sementara itu, pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon yang lebih tinggi, yaitu eselon IIIa, IIIb, IVa, IVb, dan Va jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pegawai laki-laki. Di sinilah tampak adanya suatu ketidakwajaran. Dikatakan demikian, karena sesungguhnya pegawai perempuan dengan golongan kepangkatan III dan IV jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Berkenaan dengan itu jabatan eselon III lebih-lebih eselon IV semestinya lebih banyak dipegang oleh pegawai perempuan. Pertanyaan paling penting adalah mengapa hal ini tidak terjadi. Berbagai dugaanpun muncul, misalnya bisa jadi karena pada unit kerja-unit kerja yang menyediakan jenjang karir eselon jumlah PNS perempuan memang lebih sedikit dan golongan kepangkatannya lebih rendah.

Secara umum jika dilihat dari perspektif gender maka gambaran perbandingan persentase laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan eselon dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini.

Gambar: 7.5 Persentase Pejabat berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016



Sumber: BKD Kota Denpasar, 2016

Tantangan yang paling mendasar yang dihadapi oleh perempuan ketika akan memasuki ranah publik justru datang dari pemisahan wilayah yang luas antara ranah publik dan privat. Ideologi pemisahan tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin menentukan perempuan sebagai seorang warga negara yang bersifat privat dengan peran utama di dalam rumah tangga sebagai ibu dan istri, sementara laki-laki diberikan peran yang lebih produktif di ranah publik. Dikotomi publik-privat ini membentuk struktur peluang bagi perempuan di Indonesia secara umum dan termasuk juga di Bali. Ideologi peran gender membuat kontribusi perempuan di ranah produktif tidak lagi terlihat dan peran mereka tidak diakui secara sosial, sehingga semakin sedikit sumber daya yang diinvestasikan pada perempuan sebagai sebuah modal (*human capital*) baik oleh keluarga maupun negara.

7.8 Yudikatif

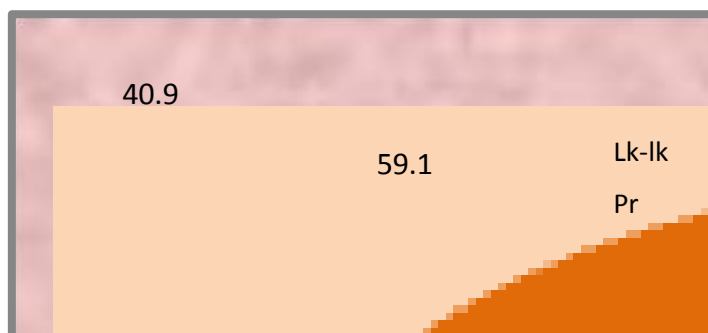
Peran penegak hukum tampaknya memang tidak bisa diabaikan di era globalisasi saat ini., karena kenyataan telah menunjukkan bagaimana gejolak sosial di masyarakat seperti persoalan korupsi, narkoba, penyelewengan kekuasaan dan lain-lain sedang ramai-ramainya mewarnai kehidupan masyarakat. Untuk menangani persoalan ini sudah tentu peran penegak hukum menjadi sangat sentral. Penegak hukum ini secara umum dikelompokkan dalam satu lembaga yang dinamakan lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif

adalah lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum yang meliputi; jaksa, hakim, pengacara, dan kepolisian. Dalam kaitan lembaga yudikatif, jika diperhatikan kondisi PNS pada bidang-bidang yang terkait dengan penegakan hukum atau bidang yudikatif proporsinya tampak variatif. Secara rinci keberadaan penegak hukum di Kota Denpasar akan diuraikan sebagai berikut:

7.8.1 Jaksa

Kadang banyak orang yang mengatakan bahwa jaksa merupakan orang yang menentukan nasib seorang kriminal dan pelanggar hukum. Jika dilihat dari definisinya maka **Jaksa** adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (*Pasal 1 Angka 6 Huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*). (<http://penelithukum.org>). Dengan demikian jelas pada saat ini keberadaan jaksa menjadi sangat penting karena saat ini banyak terjadi kasus-kasus hukum yang harus diselesaikan secara cepat. Terkait dengan keberadaan jaksa di Kota Denpasar tampaknya tidak terlalu menunjukkan kesenjangan gender. Tahun 2016 di Denpasar terdapat 45 jaksa yang terdiri dari 27 laki-laki dan 19 perempuan. Jumlah ini mengalami penambahan jika dibandingkan jumlah pada tahun 2015 yang berjumlah 46 orang. Kalau digambarkan dalam persentase, maka perbandingan jumlah jaksa laki-laki dan perempuan pada tahun 2016 tampak sebagai berikut ini.

Gambar: 7.6 Persentase Jaksa berdasarkan jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016



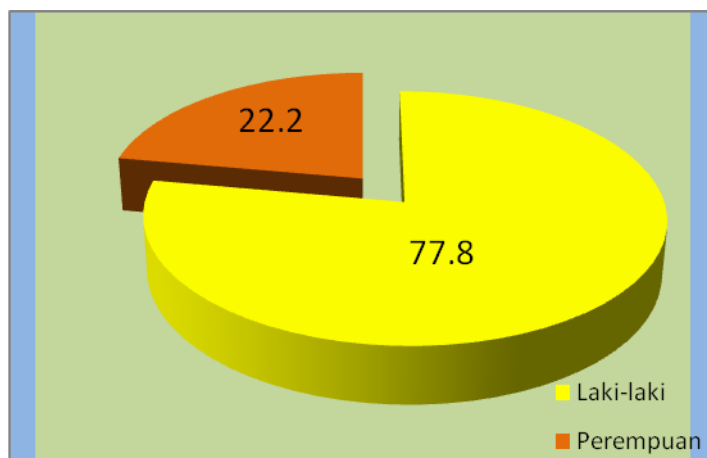
Sumber: Kantor Kejaksaan Denpasar. 2016

Dari gambar 7.6 ini tampak bahwa jumlah jaksa laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Denpasar tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa akses perempuan untuk menjadi jaksa sudah tidak terlalu terhalang oleh budaya maupun stereotipe yang berkembang di masyarakat. Selain jaksa yang termasuk penegak hukum lainnya adalah hakim, notaris, dan kepolisian. Untuk mengetahui keberadaan penegak hukum ini akan dipaparkan berikut ini.

7.8.2 Hakim

Hakim dapat diartikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (*Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*) (<http://penelitihukum.org>). Tidak banyak orang yang bisa mengemban profesi ini karena untuk menjadi hakim sangat diperlukan suatu skill terutama dalam berbicara, berargumen, dan yang pasti harus pintar berbicara. Disamping itu mereka yang berprofesi sebagai hakim juga harus bersedia sering mengalami mutasi dari satu daerah ke daerah lain, karena dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus netral, obyektif, dan jujur. Terkait dengan eksistensi hakim di Kota Denpasar berikut disajikan persentase hakim berdasarkan jenis kelamin.

Gambar: 7.7 Persentase Hakim Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2013.



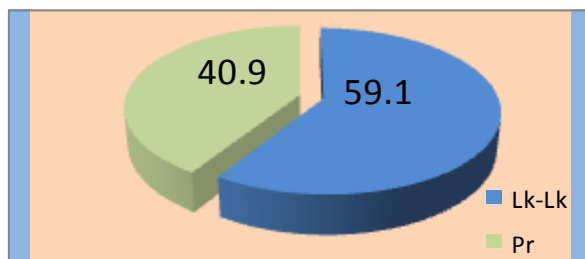
Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, 2014

Jika dicermati gambar 7.9 tersebut di atas tampak bahwa di Kota Denpasar profesi sebagai hakim sebagian besar (77,8%) dilakoni oleh laki-laki. Kondisi ini memang tidak jauh berbeda dengan keberadaan jaksa yang masih didominasi oleh laki-laki. Namun kesenjangan gender lebih menonjol terjadi pada keberadaan hakim. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai persyaratan untuk menjadi seorang hakim yang diantaranya adalah bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia, dan bersedia sering dipindah dari satu daerah ke daerah lain. Seorang perempuan kalau harus berpindah-pindah tempat tugas tentu tidak setega dan semudah kaum laki-laki karena seorang perempuan PNS dalam aturan kepegawaian bisa berpindah mengikuti suami, namun tidak ada aturan suami ikut istri. Disinilah aturan itu bersifat bias gender. Oleh karena itu, seorang hakim perempuan kalau dia harus berpindah-pindah tugas harus mempertimbangkan banyak hal seperti ijin suami, ijin anak-anak dan pertimbangan lain-lain, disamping itu juga suami mereka sulit untuk mengikuti istri karena kendala aturan.

7.8.3 Notaris

Saat ini keterlibatan perempuan sebagai notaris tampak sudah semakin banyak, meskipun belum sebanyak jumlah notaris laki-laki namun secara kuantitatif keterlibatan mereka semakin menggembirakan. Sama halnya dengan profesi yudikatif lainnya, bidang kenotariatan masih lebih banyak ditekuni oleh laki-laki. Dari 105 notaris yang tercatat di ikatan notaris Indonesia, 43 orang (40,9%) perempuan dan 62 orang (59,1%) laki-laki. Keberadaan notaris laki-laki dan perempuan secara umum digambarkan sebagai ini.

Gambar; 7.8 Persentase Notaris menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016.



Sumber: Ikatan Notaris Indonesia Cabang Bali dan Persatuan Advokat Indonesia, 2016

Dari data di atas menggambarkan bahwa keberadaan notaris laki-laki dan perempuan masih menunjukkan sedikit kesenjangan gender. Hal ini kemungkinan disebabkan karena masih adanya anggapan profesi ini lebih pantas ditekuni oleh laki-laki. Demikian juga penegak hukum lainnya yang selama ini cukup laris dengan semakin banyaknya masyarakat yang menghadapi masalah seperti korupsi, dan konflik soaial lainnya yakni advokat atau pengacara. Advokat atau pengacara memegang peranan penting dalam mendampingi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Untuk mengetahui secara rinci keberadaan advokat di Kota Denpasar akan diuraikan seperti berikut ini.

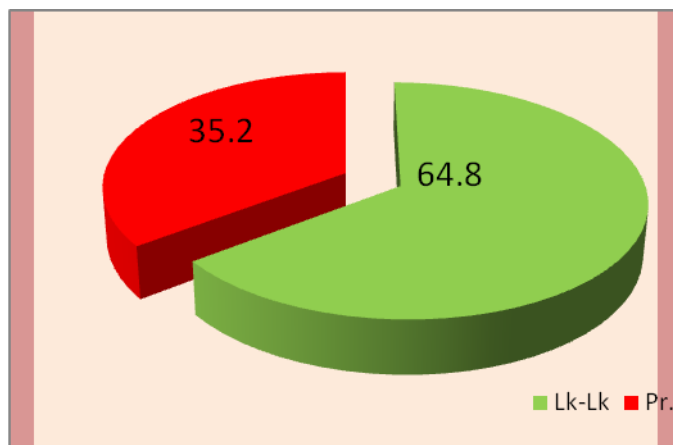
7.8.4 Advokat

Penegak hukum yang satu ini juga hampir sama kondisinya dengan penegak hukum yang lainnya dimana jumlah perempuan masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 4255, maka profesi advokat di Indonesia memasuki era baru. Suatu era yang dalam konteks ini diartikan sebagai pemacu bagi seorang calon advokat/advokat untuk lebih baik dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat. Jika dilihat dari definisinya, maka pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya dalam UU Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain (<http://pengertiandefinisiarti.blogspot.com/2012/03>).

Di setiap kota besar keberadaan advokat relatif banyak karena kota besar seperti Denpasar biasanya menjadi ranah mereka untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Biasanya di kota-kota besar banyak kasus yang memerlukan keberadaannya. Profesi ini juga ditekuni oleh kaum perempuan, hal ini tampak dari data yang tercatat dimana jumlah perempuan yang menjadi advokat mencapai 125 orang atau 35,2%, dan laki-laki sebanyak 230 orang

(64,8%). Jika digambarkan dalam bentuk gambar maka akan tampak seperti gambar berikut ini.

Gambar; 7.9 Persentase Advokat menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016.



Sumber: Persatuan Pengacara Indonesia Cabang Bali , 2016

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pengacara yang ada di Kota Denpasar dilakoni oleh laki-laki yang artinya di bidang ini masih terjadi ketimpangan gender yang relatif menonjol. Mengapa hal ini terjadi, apakah karena perempuan yang kurang meminati profesi ini atau karena adanya kebijakan yang bias gender. Untuk memperoleh jawaban yang pasti tentu masih memerlukan kajian lebih jauh. Setelah ditemukan jawabannya baru bisa diambil kebijakan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi.

7.8.5 Polisi

Polisi sebagai penegak hukum mempunyai peran sangat penting selain keberadaan Hakim dan Jaksa yang memegang peran penting dalam mengatasi fenomena sosial di masyarakat. Polisi merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan masyarakat, karena itu di setiap lapisan masyarakat mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi eksistensi polisi sangat penting. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pusat-pusat lainnya tentu mengalami berbagai persoalan baik terkait keamanan

maupun lalu lintas yang memerlukan peran aktif polisi. Oleh karena itu jumlah polisi yang tercatat di Polresta Denpasar dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

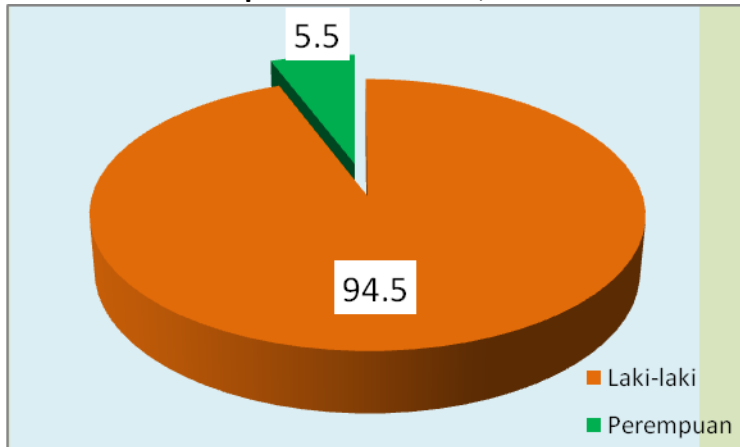
Tabel. 7.6 Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar 2015 dan 2016

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
2015	1745	109	1754
2016	1745	109	1754

Sumber : Polresta Denpasar, 2016

Mencermati tabel di atas, jelas menggambarkan bahwa polisi laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan polisi perempuan dalam dua tahun terakhir. Polisi laki-laki sangat mendominasi dan perbedaannya sangat tajam yaitu tahun 2014 polisi laki-laki berjumlah 1735 orang sementara polisi perempuan berjumlah 109 orang. Pada tahun 2015 polisi laki-laki berjumlah 1745 orang, sedangkan polisi perempuan berjumlah 109 orang. Secara keseluruhan tahun 2015 jumlah polisi di Kota Denpasar 1754 orang, dibandingkan sebelumnya berjumlah 1745 orang. Jadi terjadi kenaikan jumlah personil polisi sebanyak 10 orang tahun 2015, ini terjadi pada polisi laki-laki. Jadi dengan demikian maka pada lembaga kepolisian terjadi kesenjangan gender yang sangat tajam. Hal ini terjadi karena pekerjaan polisi dianggap keras, penuh tantangan dan resiko tinggi sehingga lebih cocok untuk laki-laki atau rekrutmennya memang memprioritaskan laki-laki. Hal ini perlu mendapat perhatian dari para pemerhati perempuan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Gambar: 7.10 Persentase Polisi menurut jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2013,

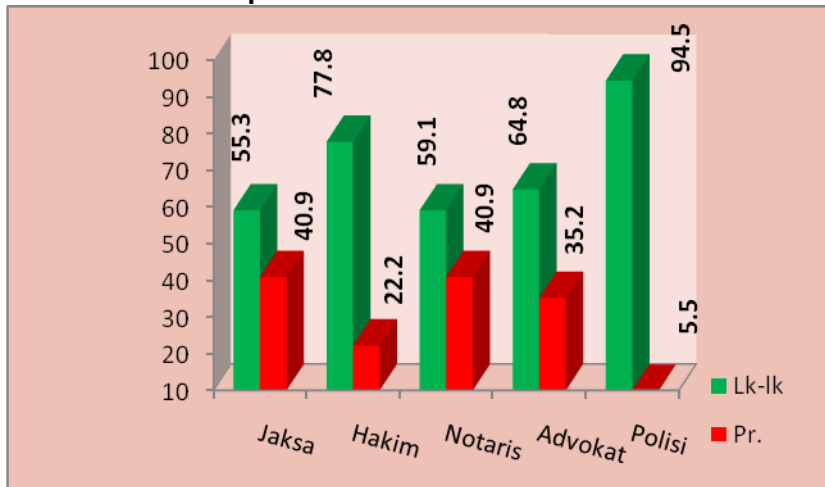


Sumber: Polresta Denpasar, 2014.

Jika kita amati di lapangan secara realita tampaknya polisi wanita memang lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah polisi laki-laki. Kenyataan ini terlihat juga dari data yang tertera pada gambar 2.12 di atas. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena profesi ini kurang diminati oleh perempuan mengingat tugas-tugas polisi identik dengan tugas yang penuh tantangan, berat dan berisiko tinggi. Perempuan yang secara stereotip gender dianggap sebagai lemah lembut dan perlu dilindungi dianggap kurang pantas menekuni profesi ini. Namun demikian tidak berarti perempuan harus tunduk dan menyerah pada stereotip itu, buktinya cukup banyak perempuan yang mampu dan mau berperan sebagai polisi yang selama ini dianggap sebagai ranahnya laki-laki.

Jika keberadaan penegak hukum tersebut di atas digambarkan secara umum, maka perbandingan partisipasi laki-laki dan perempuan di bidang yudikatif atau penegak hukum maka akan tampak seperti gambar berikut ini.

Gambar: 7.11 Persentase Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016



Sumber: Kantor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta, PPI, 2016

Gambar di atas mencerminkan bahwa pada semua indikator yang tergolong dalam profesi yudikatif atau penegak hukum masih menunjukkan terjadinya ketimpangan gender. Hal ini mengindikasikan bahwa di masyarakat masih ada pandangan bahwa penegak hukum merupakan ranahnya kaum laki-laki. Pandangan ini tidak saja dianut oleh kaum laki-laki, tetapi perempuan sendiri juga masih menganggap seperti itu sehingga hal ini pada gilirannya memunculkan rasa tidak berminat untuk melakoninya. Untuk menumbuhkan minat kaum perempuan menekuni bidang ini tentu memerlukan strategi tersendiri.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pada Bab VIII ini dibahas mengenai beberapa hal berkaitan dengan gejala sosial yang mencakup tentang korban kekerasan dan pelakunya serta masalah kehidupan sosial, antara lain mencakup ulah kehidupan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang sampai saat ini masih sulit teratasi. Di samping itu, juga dibahas mengenai manusia lanjut usia (lansia), anak berkebutuhan khusus (ABK), dan panti asuhan penampungan anak. Dengan membahas beberapa hal ini dapat memperoleh gambaran tentang statistik gender di Kota Denpasar secara menyeluruh.

8.1 Korban dan Pelaku Kekerasan

Tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang atau sekelompok manusia merupakan gejala kehidupan pada masyarakat. Secara historis, tidak ditemui adanya suatu sumber yang menjelaskan awal dari mulai terjadi tindakan kekerasan pada kehidupan manusia. Ini artinya, memang sejak zaman dahulu kala telah terjadi tindakan kekerasan tersebut. Kekerasan ini dapat didefinisikan, yaitu suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain meninggal dunia atau cedera, atau dapat menyebabkan terjadi kerusakan fisik atau barang lain. Efek atau akibat langsung dari tindakan kekerasan ini, pada umumnya dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menderita. Di samping itu, orang yang mendapat perlakuan kekerasan tersebut merasa dirinya dirugikan atau menjadi korban. Oleh karena itu, warga masyarakat, khususnya korban acapkali mengutuk pelaku kekerasan tersebut.

Pada hakikatnya, apabila terjadi kekerasan di masyarakat biasanya ada pemicu-nya atau sumbernya yang menyebabkan terjadi konflik di antara yang terlibat dalam kekerasan itu. Di pihak yang melakukan kekerasan tersebut dinilai oleh masyarakat adalah orang-orang yang melanggar norma sosial yang ada di masyarakat. Di samping itu, pelakunya dipandang tidak bisa mengendalikan dirinya dan tidak sabar sehingga timbul tindakan yang termasuk kategori merusak. Merusak dapat dilakukan terhadap manusia dan benda. Dari dua obyek ini, kekerasan terhadap manusia yang paling fatal

karena terkait pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu pertama, kekerasan yang tidak direncanakan. Ini mencakup skala kecil. Kedua, kekerasan yang dilakukan secara terkoordinir, yakni kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, baik yang diberi hak maupun tidak. Contohnya, antara lain perang atau kekerasan antar masya-rakat atau antarnegara, dan terorisme.

Selanjutnya, orang yang pernah mendapat kekerasan tersebut sering kali akan membalasnya, namun tidak selalu dengan kekerasan pula, tetapi bisa juga dengan bentuk yang lain. Itulah sebabnya, akhirnya kekerasan sekarang menjadi isu yang krusial atau hangat dan menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Begitu pentingnya masalah kekerasan sampai pemerintah mengaturnya dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 5 Undang-undang itu ditegaskan bahwa kekerasan dapat digolongkan ke dalam empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran rumah tangga atau ekonomi. Tabel 8.1 di bawah ini menunjukkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di Kota Denpasar menurut jenis kelamin.

Tabel: 8.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

Bentuk kekerasan	Jenis Kelamin		
	L	P	L + P
Fisik	1	12	13
Psikis	3	12	15
Seksual	1	19	20
Penelantaran	1	15	16
Pencuarian	19	0	19
Perdagangan Orang	0	0	0
Eksplorasi	0	0	0
Lainnya	17	22	39
T o t a l	42	80	122

Sumber: P2TP2A Kota Denpasar, 2016

Mencermati tabel 8.1 di atas dapat dipahami bahwa sampai sekarang ini tetap di pihak perempuan yang mendominasi menjadi korban kekerasan. Mereka tergolong kaum lemah sehingga mudah menjadi korban kekerasan dari pada kaum laki-laki. Bentuk-bentuk kekerasan yang relatif sering dialami oleh

kaum hawa, yaitu seksual, penelantaran, fisik, dan psikis. Sementara ini, di pihak laki-laki lebih sering menjadi sasaran dari pencurian harta benda dan kekerasan lainnya. Namun, selama tahun 2016 belum pernah terjadi eksploitasi dan perdagangan orang di Wilayah Kota Denpasar.

Sesuai dengan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan yang tercantum pada tabel 8.1 di atas, kekerasan yang terjadi di Kota Denpasar adalah masih berbasis pada ketimpangan gender. Di sini yang menjadi korbannya secara mayoritas adalah perempuan, yaitu berjumlah 80 orang, sementara di pihak laki-laki 42 orang. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan pada perempuan secara fisik maupun nonfisik terjadi, baik di tempat umum maupun di lingkungan pribadi dan rumah tangga. Kekerasan fisik dimaksud adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain. Pelaku dalam melakukan tindakan ini dapat menggunakan tangan, kaki, dan atau mulut (menggigit), serta biasanya memakai benda. Bahkan, kekerasan yang menggunakan benda dapat berakibat lebih fatal. Kekerasan nonfisik adalah tindakan yang dilakukan untuk merendahkan atau melecehkan kepercayaan diri seseorang. Misalnya, yang terjadi pada kaum perempuan mengucapkan kata-kata kasar atau perkataan yang tidak menyenangkan orang lain. Sementara, kekerasan psikologis adalah tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengganggu atau menekan emosi korban sehingga secara kejiwaan, korban menjadi tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Dalam kondisi demikian korban menjadi penurut, kemudian dan menjadi bergantung pada orang yang bersangkutan sehingga mudah ditaklukkan, akhirnya menjadi korban.

Di sisi lain, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, ketidak-setaraan. Kekerasan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, ketika kekuasaan yang ada pada seseorang dimanfaatkan untuk membohongi atau memaksa orang lain. Kondisi ini membawa akibat secara langsung pada derajat integritas dan kepercayaan orang yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dimungkinkan oleh adanya ketidaksetaraan status antar-individu, antar-kelompok, atau antar-negara (Sadli, 2002). Selanjutnya, tabel 8.2 berikut ini

menjelaskan mengenai cirri-ciri dan palaku serta korban kekerasan menurut umur di Kota Denpasar.

Tabel 8.2 Ciri – Ciri dan Pelaku Korban Kekerasan menurut Umur di Kota Denpasar. 2016

Umur	Ciri - Ciri Pelaku			Ciri-Ciri Korban		
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
	L	P	L + P	L	P	L + P
0 – 17 Tahun	34	2	36	9	38	47
18 – 24 Tahun	7	0	7	1	4	5
25 – 59 Tahun	49	12	61	0	26	26
60 +	0	0	0	0	0	0

Sumber:P2TP2A Kota Denpasar, 2016

Tabel 8.2 di depan, jika dicermati menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki yang berumur antara 25 tahun sampai dengan 59 tahun yang mendominasi menjadi pelaku kekerasan. Laki-laki yang interval umurnya antara 25 tahun sampai dengan 59 tahun termasuk usia produktif yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk menafkahi anggota keluarganya. Di tahun 2016 yang lalu, anak berjenis kelamin laki-laki yang berumur tujuh belas tahun dan berumur di bawahnya (0—17 tahun) menduduki peringkat kedua yang melakukan tindakan kekerasan. Sebaliknya, di pihak kaum perempuan yang berumur 24 tahun ke bawah hanya sebanyak 2 orang yang terdeteksi melakukan tindakan kekerasan. Namun, pada umumnya yang menjadi korban adalah kaum hawa (perempuan) pula, yang didominasi oleh anak perempuan yang termasuk kelompok umur 0—17 tahun, yaitu sebanyak 38 orang, dan kelompok 25—59 tahun sebanyak 26 orang.

Mencermati komposisi tabel 8.2 di atas dapat mempertegas bahwa masyarakat Bali pada umum, dan masyarakat Kota Denpasar khususnya yang menganut prinsip keturunan patrilineal maka sifatnya sangat patriarkhis, di mana anak-anak perempuan berkedudukan subordinat sehingga lebih banyak menjadi korban kekerasan bagi kaum laki-laki. Ini tidak berarti pihak laki-laki tidak ada yang menjadi korban, namun jumlah pihak laki-laki yang menjadi

korban sangat kecil, seperti tertera dalam tabel 8.2, yaitu sebanyak 9 orang berumur 0—17 tahun, dan 1 orang berumur 18—24 tahun.

8.2. Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Istilah gepeng yang merupakan kepanjangan: “gelandangan dan pengemis” mengandung pengertian seseorang atau sekelompok orang yang menggelandang sambil mengemis (meminta-minta) dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada juga di antara mereka yang menggelandang dan mengemis di tempat tertentu, dalam posisi duduk dan atau berdiri sambil berjalan-jalan dan menengadahkan tangan ditujukan kepada orang yang kebetulan lalu-lalang di sekitarnya. Dampaknya, gepeng yang beroperasi di Kota Denpasar memberi citra yang kurang baik terhadap Kota Denpasar sebagai kota berwawasan budaya sehingga keberadaannya dipandang menjadi salah satu masalah sosial yang sekarang ini belum dapat diatasi.

Menurut hasil operasi penangkapan gepeng yang berkeliaran di Kota Denpasar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar yang dibantu oleh Tramtib dan SATPOL PP Kota Denpasar, ternyata gepeng yang berhasil ditangkap di Kota Denpasar sebagian besar berasal dari salah satu kabupaten di Bali, yaitu Kabupaten Karangasem, dan sebagian berasal dari luar Pulau Bali, yaitu Pulau Jawa. Gepeng ini sebagian besar tidak memiliki tempat tinggal tetap atau kos di Kota Denpasar. Setelah mereka mengemis, biasanya sebagian ada yang bermalam di emper-emper pertokoan dan sering berpindah-pindah tempat. Selain itu, ada juga sebagian gepeng yang berasal dari Bali mengakui bahwa mereka tinggal mengelompok di Denpasar di rumah kos.

Sehubungan dengan hal ini, ada suatu asumsi yang menyebutkan bahwa “adanya ketimpangan kehidupan sosial-ekonomi di masyarakat yang menimbulkan adanya gelandangan dan pengemis”. Faktor penyebab terjadinya ketimpangan hidup yang dialami oleh gepeng adalah tidak memiliki keterampilan untuk mencari nafkah yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kota Denpasar sesungguhnya sudah berusaha menertibkan gepeng yang beroperasi di wilayah Kota Denpasar. Dalam hal ini, instansi terkait yang menangani masalah sosial ini adalah Dinas Sosial Kota Denpasar yang acapkali sudah melakukan penangkapan gepeng yang

berkeliruan di wilayah Kota Denpasar. Gepeng yang telah berhasil ditangkap itu diberikan pembinaan di tempat penampungannya di Jln. Prof. I.B. Mantra, selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

Dalam konteks ini, pelaksanaan pembinaan di tempat penampungan itu bertujuan agar para gepeng tersebut menjadi sadar bahwa menggepeng adalah pekerjaan hina dan kurang terpuji. Bahkan, dari ulah perbuatannya dapat merusak citra Pulau Bali yang mendapat berbagai julukan serta sangat populer di manca negara sebagai daerah tujuan wisata (DTW).

Dalam kenyataannya, gepeng yang pernah tertangkap dan telah dibina beberapa hari di tempat penampungan, namun setelah dikembalikan ke kampung halamannya acapkali kembali lagi ke Kota Denpasar menjadi gepeng. Padahal, di daerah asalnya sendiri, pihak pemerintah yang terkait telah memberikan pembinaan dan pelatihan agar mereka yang sering menjadi gelandangan dan pengemis itu memiliki keterampilan untuk membuat kerajinan tangan yang bisa menjadi nafkah hidupnya sehingga berhenti menjadi gepeng. Dengan demikian, gepeng yang sering tertangkap di Kota Denpasar biasanya muka-muka lama yang sudah pernah ditangkap oleh petugas dari Dinas Sosial Kota Denpasar yang bekerja sama dengan Dinas Tramtib dan SATPOL PP Kota Denpasar.

Berdasarkan atas hasil pengamatan, gepeng yang berasal dari Bali biasanya beroperasi masuk rumah ke rumah. Ada juga yang tampak beroperasi dari pedagang/warung/toko yang satu ke pedagang/warung/toko yang lainnya. Sedangkan, gepeng yang berasal dari luar Bali biasanya menggunakan kerudung (perempuan) dan peci (laki-laki), jika mengemis acapkali terlihat duduk di trotoar di dekat *traffick-light*. Selain itu, ada juga yang meneladahkan tangannya ketika *traffick-light* sedang menyala merah. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar pada tahun 2015 gepeng yang terjaring sebanyak 117 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 26 orang laki-laki (22,22%) dan sebanyak 91 orang perempuan (77,78 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 8.3 berikut.

Tabel 8.3 Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin Yang Telah Dibina di Kota Denpasar, Tahun 2015 dan 2016

Kelompok Umur (tahun)	2015			2016		
	L	P	Jlh	L	P	Jlh
0 - 4 tahun	8	11	19	7	7	14
5 - 9 tahun	1	8	9	2	5	7
10 - 14 tahun	1	1	2	2	6	8
15 - 18 tahun	-	2	2	-	1	1
19 tahun ke atas	16	69	85	41	70	111
Jumlah	26	91	117	52	89	141

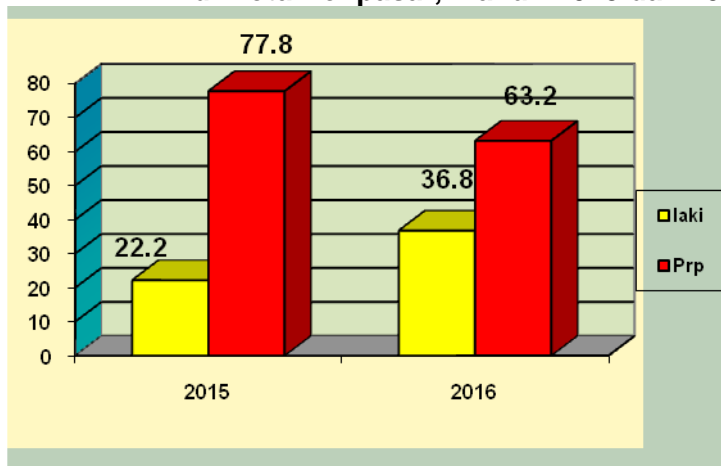
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, 2016

Apabila dicermati data pada tabel 8.3 di atas tercermin adanya peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis yang ditangkap dan dibina pada tahun 2015 dan 2016. Gepeng yang tertangkap dan dibina, baik terjadi di tahun 2015 maupun 2016 didominasi oleh orang berumur 19 tahun ke atas. Yang mencengangkan di sini, adanya anak balita bermur 0—4 tahun yang menduduki peringkat kedua, dan anak berumur 5—9 tahun yang diajak menggelandang dan mengemis. Keadaan ini bisa ditafsirkan, yaitu keterlibatan anak kecil yang diajak menggelandang dan mengemis ini tujuannya agar orang-orang yang didekati merasa kasihan melihat anak kecil tersebut. Dengan rasa kasih terhadap anak tersebut maka ia akan lebih ikhlas atau bersedia memberikan uang atau sesuatu.

Ditinjau dari perspektif gender, jenis kelamin perempuan yang mendominasi orang-orang yang menggelandang dan mengemis tersebut. Kondisi ini muncul karena secara psikologis orang lebih banyak merasa kasihan kepada gepeng yang berjenis kelamin perempuan daripada berjenis kelamin laki-laki, karena gepeng perempuan lebih sabar menunggu pemberian orang yang didekatinya dengan menengadahkan tangan. Apalagi gepeng perempuan itu sedang menggendong anak yang masih di bawah umur maka orang-orang yang didekatinya tidak sampai hati akan mengusir tanpa memberikan sesuatu sebelumnya. Selain itu, menurut informasi ada yang memang sang suami menyuruh istrinya menjadi gepeng ke luar daerahnya, sedangkan suaminya tetap tinggal di rumah sambil bercocok tanam.

Namun, gepeng perempuan biasanya tidak seorang diri tampak meminta-minta dengan berjalan kaki mengunjungi rumah-rumah penduduk. Ini membuktikan bahwa mereka menghindari diri dari hal-hal yang tidak wajar yang kemungkinan bisa saja terjadi dilakukan oleh orang laki-laki terhadap dirinya. Jika dipersentasekan, maka perbandingan antara gepeng laki-laki dan perempuan seperti tampak pada gambar berikut ini;

Gambar:8.1 Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin Yang Telah Dibina di Kota Denpasar, Tahun 2015 dan 2016



Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, 2016

8.3 Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Manusia yang dilahirkan di dunia ini dalam menjalani hidupnya mengikuti suatu siklus yang bersifat alami. Secara struktural, seorang manusia yang menjalani hidupnya di dunia ini akan menempuh fase-fase, antara lain fase balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, akhirnya meninggal dunia. Sejak fase balita, seorang manusia akan tampak jelas mengalami pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada fisik dan mentalnya semakin kuat sampai fase dewasa. Pada fase dewasa ini biasanya menjadi fase puncak kekuatan seorang manusia. Selanjutnya, memasuki fase lanjut usia (lansia) biasanya ditandai dengan terjadi penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial secara alami.

Sampai dewasa ini belum adanya satu pendapat yang disepakati oleh para ilmuwan untuk memberikan batasan pengertian tentang masa lanjut usia.

Untuk memahami pengertian masa tua atau lanjut usia ini biasanya digunakan indikator penjenjangan umur dari fase balita sampai fase lanjut usia. Namun, rentang umur setelah fase balita itu masih bervariasi. Misalnya, Hurlock (2002) berpendapat bahwa masa tua merupakan tahap terakhir dalam perkembangan hidup manusia dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara umur 40 sampai dengan 70 tahun, sedangkan usia lanjut dimulai sejak usia 70 tahun hingga manusia yang bersangkutan meninggal dunia.

Orang tua muda atau usia tua (usia 65 hingga 74 tahun) dan orang tua yang tua atau usia tua akhir (75 tahun atau lebih) (Balte, Smith & Staudinger, Charness & Bosman) dan orang tua yang lanjut (85 tahun atau lebih) dari orang-orang dewasa lanjut yang lebih muda (Johnson & Perlin). Sedangkan, menurut J.W. Santrock (J.W, Santrock, 2002, h. 190), ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang barat dan orang timur (Indonesia). Pandangan orang barat yang tergolong orang lanjut usia atau lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas. Pada fase usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sementara ini, pandangan orang Indonesia, lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Usia manusia yang lebih dari 60 tahun pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai maksimal kerja dan mulai tampak pada tubuhnya ciri-ciri ketuaan. Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan usia 65 tahun sebagai lansia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia (<http://chirpstory.com/li/79452>). Khusus dalam tulisan ini yang dipakai tolok ukur lansia adalah seseorang yang berumur 60 tahun ke atas.

Seseorang yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas atau lanjut usia secara fisik sudah rentan terhadap berbagai penyakit, baik fisik maupun psikis. Itulah sebabnya, pada usia-usia ini sangat diperlukan adanya perhatian serius terhadap kesehatan tubuh. Di samping itu, pada usia-usia ini pula jika tidak mempunyai aktivitas, kadang-kadang seseorang lansia akan mengalami stres atau depresi karena mereka merasa tergantung pada orang lain. Terkait dengan hal tersebut maka pada saat ini Pemerintah Kota Denpasar tidak hanya menaruh perhatian besar terhadap persoalan anak-anak, namun perhatian khusus juga diberikan kepada penduduk lanjut usia (lansia). Hal ini tampak dari berbagai program yang diluncurkannya guna kepentingan kesejahteraan

lansia. Adapun bentuk program dimaksud, antara lain senam sehat lewat program Posyandu Paripurna, dan pelayanan kesehatan. Tabel 8.4 berikut ini mencantumkan mengenai penduduk Lansia menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2016.

Tabel: 8.4 Penduduk Lansia di Kota Denpasar menurut Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, Tahun 2016

Umur	Jenis kelamin		Total
	L	P	
60 - 64	9.787	8.919	18.706
65 - 69	6.003	6.131	12.134
70 - 74	3.339	3.693	7.032
75 +	3.119	4.453	7.572

Sumber: KBPP Kota Denpasar. 2016

Mencermati tabel 8.4 di atas menunjukkan bahwa lansia yang berumur 60 - 64 tahun paling banyak jumlahnya, tetapi jumlah perbedaan jenis kelaminnya agak mencolok, yaitu jumlah lansia laki-laki lebih banyak daripada lansia perempuan. Adapun selisih jumlahnya 868 orang. Selanjutnya, dalam kelompok umur 65—69 tahun, keadaannya terbalik, yaitu jumlah lansia perempuan lebih banyak daripada lansia laki-laki, namun selisihnya sangat kecil, berkisar 128 orang. Demikian pula keadaannya, pada kelompok umur 70—74 tahun, yaitu jumlah lansia perempuan tetap lebih banyak, selisihnya berkisar 354 orang. Pada kelompok umur 75 tahun ke atas, terjadi selisih umur lansia laki-laki dan lansia perempuan sangat tajam, karena lansia perempuan jumlahnya 4.453 orang, sedangkan lansia laki-laki 3.119 orang. Jadi, lansia perempuan lebih banyak jumlahnya, yaitu berkisar 1334 orang. Dengan terjadinya ketimpangan jumlah lansia berdasarkan atas kelompok umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam tabel 8.4 di atas, diperlukan diadakan penelitian yang lebih khusus untuk menjelaskan faktor-faktor penyebabnya.

Pada umumnya dalam kehidupan berumah tangga di Bali dan khususnya di Kota Denpasar adanya suatu tradisi, yaitu orang tua yang sudah berusia lanjut tetap bergabung dengan keluarga inti anak laki-lakinya yang bungsu. Misalnya, walaupun orang tua kandungnya secara fisik masih relatif kuat dan secara ekonomis masih sanggup membiayai hidupnya sendiri,

keluarga inti anak laki-laki yang bungsu tersebut wajib tetap mengajak, mengasuh, dan merawat orang tua kandungnya sampai (orang tuanya) meninggal dunia. Apabila ada orang tua yang lanjut usia yang hidupnya (misalnya) terlantar maka yang menjadi sorotan adalah anak-anaknya, terutama anak laki-laki yang bungsu karena mengabaikan tanggung jawab mengasuh dan merawat orang tuanya. Dari perspektif gender, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi di sini karena tidak adanya ketidaksetaraan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Ketidaksetaraan di sini terjadi karena anak perempuan yang sudah menikah tidak punya kesempatan dan tanggungjawab untuk mengajak orang tuanya hidup bersama-sama dalam keluarga intinya. Ada anggapan bahwa anak perempuan yang sudah menikah berarti sudah lepas haknya untuk ikut mengajak orang tuanya bergabung dengan keluarga intinya. Apabila terjadi kasus, misalnya anak perempuan yang sudah menikah mengajak orang tuanya bergabung dengan keluarga intinya akan menanggung risiko, baik dialami oleh anak perempuan maupun anak laki-laki (dari orang tua tersebut), yaitu akan menjadi buah pembicaraan yang kurang sedap didengar dari tetangga-tetangganya.

Walaupun demikian, tradisi ini mempunyai implikasi positif, yaitu hampir tidak ada orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya setelah anak-anaknya menikah. Hal ini disebabkan karena sudah ada kepastian yang digariskan oleh tradisi tentang ke-wajiban pihak keluarga inti anak laki-laki bungsu yang diutamakan atau digariskan oleh tradisi untuk mengajak, mengasuh, dan merawat orang tua kandung di masa tuanya.

8.4 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Dambaan orang tua kepada anak-anaknya sejak baru lahir, baik fisik, mental, rohani maupun perilakunya supaya dalam keadaan normal, tanpa ada kelainan. Anak ini diharapkan menjadi anak yang pikirannya cerdas, berpendidikan, pandai bergaul, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Namun, ada di antara orang tua yang mengalami nasib di luar harapan tersebut karena memiliki keturunan yang mengalami keterbatasan sehingga memerlukan perhatian, pengasuhan, perawatan, dan pendidikan

secara khusus. Anak yang mengalami kondisi semacam ini mendapat sebutan anak berkebutuhan khusus (ABK).

Secara konseptual anak berkebutuhan khusus (ABK) mengandung pengertian, yaitu jika anak tersebut dicermati merupakan seorang anak yang memiliki kelainan, baik dalam fisik, emosional, mental maupun sosial dalam proses pertumbuhan bila dibandingkan dengan sejumlah anak lain yang seusianya. Oleh karena itu, seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus membutuhkan pendidikan berkebutuhan khusus. Salah satu kelompok anak yang digolongkan ABK, yaitu bernama autis. Anak berkebutuhan khusus yang dikelompokkan pada kategori uatis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilakunya. Meskipun anak tersebut memiliki kebutuhan khusus, ia masih bisa belajar seperti anak yang lainnya. Tempat mereka belajar di sekolah atau lembaga yg menyediakan pen-didikan untuk ABK. Tabel 8.5 di bawah ini menunjukkan jumlah ABK menurut jenis kelamin dan umur pada tahun 2016 di Kota Denpasar.

Tabel: 8.5 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang terlayani di Kota Denpasar menurut umur dan Jenis Kelamin, 2016

No	Nama Lembaga	Jumlah ABK					
		Jenis Kelamin		Usia			
		L	P	1 - 6	7 - 12	13 - 15	16 - 18
1.	Pusat Layanan Autis	87	24	19	58	19	4
2.	Darmawangsa	8	2	4	3	1	2
3.	SLB C	88	40	-	-	-	-
4.	SLB C 1	78	53	-	-	-	-
5.	SLB A	95	40	1	48	39	31
6.	SLB B	63	51	-	-	-	-
7.	Anak Emas	12	8	-	20	-	-
8.	Pradnyagama	22	23	7	18	9	11
9.	Youth Shine	35	12	-	21	9	9
	Jumlah	488	253	31	168	77	57

Sumber : Pusat Layanan Autis Kota Denpasar, 2016

Mencermati tabel 8.5 di atas menunjukkan bahwa secara kuantitatif anak laki-laki hampir dua kali lipat jumlahnya (488 orang) yang tergolong ABK,

jika dibandingkan dengan anak perempuan (253 orang). Adanya perbedaan yang mencolok seperti ini diperlukan adanya penelitian lanjutan yang mendalam, apakah memang jumlah anak laki-laki lebih rentan mengalami kelainan atau gangguan yang me-nyebabkan mereka menjadi ABK. Dari perspektif gender, akan dapat dijelaskan apakah ada kecenderungan pihak orang tua memprioritaskan anak laki-laki, sebaliknya menomorduakan anak perempuan untuk disekolahkan di tempat layanan ABK.

Tabel 8.4 di atas juga menggambarkan bahwa anak yang berumur 7 – 12 tahun jumlahnya sangat mencolok, yaitu 168 orang, sementara anak yang berumur antara 0—6 tahun berjumlah 31 orang; berumur 13—15 tahun berjumlah 77 orang; dan berumur 16—18 tahun. Berarti jumlah ABK yang berumur 7—12 tahun, yaitu lebih dari dua kali lipat dari anak yang kelompok umur yang berada di bawah dan di atasnya. Data ini menggambarkan seorang anak baru akan jelas kondisi fisik dan mentalnya, apakah ABK atau tidak lebih banyak diketahui oleh orang tuanya setelah berumur antara 7—12 tahun. Walaupun memang ada yang mengetahui anaknya termasuk kategori ABK di bawah dan di atas umur 7—12 tahun, namun jumlahnya relatif kecil. Dengan demikian, setelah orang tuanya mengetahui bahwa anaknya termasuk kategori ABK barulah disekolahkan di lembaga bagi ABK.

8.5 Panti Asuhan Penampungan Anak

Secara alami seorang anak idealnya diasuh oleh orang tuanya sendiri. Akan tetapi, bagi orang tuanya yang kurang mampu atau miskin maka tidak mampu meng-asuh dan menjamin kebutuhan hidup anak-anaknya sebagaimana mestinya. Orang tua anak ini walaupun memaklumi dirinya tidak mampu secara material, namun mendambakan supaya anaknya tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun pendidikannya secara normal. Dalam konteks ini maka ada orang-orang yang peduli terhadap perkembangan anak-anak yang keluarganya kurang mampu untuk mengasuh anak tersebut di panti asuhan. Panti asuhan yang terdapat di Kota Denpasar pada umum-nya berbentuk yayasan.

Panti asuhan di Kota Denpasar, tidak saja mengasuh anak-anak yang orang tua atau keluarganya kurang mampu secara ekonomi, tetapi mengasuh

pula anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, bahkan ada pula yang menampung anak yang cacat. Jumlah panti asuhan di Denpasar yang berbentuk yayasan adalah relatif banyak, seperti yang tercantum pada tabel 8.6 berikut ini.

Tabel: 8.6 Panti Asuhan dan Jumlah Anak yang diTampung menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2016

No	Nama Yayasan	Anak dalam Panti		Asuhan Keluarga di luar Panti		Jlh
		L	P	L	P	
1.	P.A. Anugrah (Putri) Bala Keselamatan	-	36	-	-	36
2.	P.A. Putra William Booth Bala Keselamatan	31	-	6	-	37
3.	P.A. Elisama	28	36	-	-	66
4.	P.A. Eben Haizer	14	15	-	-	29
5.	P.A. Pendidikan KH.M. Mansyur (Yappa) Putra	-	22	8	3	33
6.	P.A. Pendidikan KH.M. Mansyur (Yappa) Putri	-	29	-	-	29
7.	P.A. Tunas Bangsa	25	18	16	11	70
8.	P.A. Al Islam	57	3	-	-	60
9.	P.A. Tatwam Asi	-	39	3	-	42
10.	P.A. Dharma Jati II	45	25	-	-	70
11.	P.A. Sunya Giri	5	6	13	11	35
12.	PSTW Wana Seraya	12	35	-	-	47
13.	Panti Guna Kerta Wiweka	12	6	-	-	18
14.	Panti Guna Dria Raba	31	14	-	-	45
15.	P.A. Kasih Peduli Anak	9	8	-	-	17
16.	Panti Sosial Tuna Daksa Bunga	17	13	453	321	804
	Jumlah	308	283	499	346	1436

Sumber : Dinas Sosial Kota Denpasar, 2016

Anak-anak yang kurang mampu diasuh di panti asuhan tersebut pada umumnya dididik agar dapat menyelesaikan sekolahnya minimal sampai pendidikan SMA. Dengan demikian, yayasan panti asuhan tersebut harus mempunyai dana secara khusus untuk membiayai sekolah bagi anak-anak yang diasuhnya, biasanya secara swadaya.

Sesuai dengan data yang tertera pada tabel 8.5 di atas menggambarkan anak-anak yang diasuh oleh yayasan panti asuhan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pertama anak dalam panti, dan kedua, asuhan keluarga di luar panti. Jumlah anak-anak yang diasuh di dalam panti dan asuhan keluarga di luar panti secara kuantitatif menunjukkan perbedaan jumlah yang menonjol. Dalam hal ini, secara khusus jumlah anak yang diasuh di dalam panti sebanyak 591 orang, sedangkan asuhan keluarga di luar panti sebanyak 845 orang. Di sisi lain, anak asuhan keluarga di luar panti menunjukkan perbedaan jumlah yang cukup menonjol antara jumlah anak laki-laki (499 orang) dan jumlah anak perempuan (346 orang). Dengan adanya perbedaan jumlah angka yang mencolok ini diperlukan adanya penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Padahal, anak asuh keluarga di luar panti, pihak orang tuanya tetap bisa berinteraksi dengan anaknya. Keadaan ini berbeda dengan anak asuh dalam panti, mereka hanya sewaktu-waktu saja dapat bertemu dengan pihak orang tua atau keluarganya.

Berbeda halnya, apabila secara khusus dicermati mengenai jumlah anak asuh laki-laki dan anak asuh perempuan yang ada di dalam panti, selisih angkanya relatif kecil, yaitu jumlah anak laki-laki berjumlah 308 orang, dan anak perempuan 283 orang. Dari perspektif gender dapat dijelaskan bahwa di pihak orang tua atau keluarga anak asuh tersebut tidak membeda-bedakan bagi anak laki-laki dan perempuan untuk mendapat pengasuhan di dalam yayasan panti asuhan tersebut.

Dari perspektif gender dapat dijelaskan pula bahwa di pihak orang tua atau keluarga anak asuh tersebut tidak membeda-bedakan bagi anak laki-laki dan perempuan untuk mendapat pengasuhan di dalam panti asuhan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah anak asuh laki-laki dan anak asuh perempuan di dalam panti, selisih angkanya relatif kecil, yaitu jumlah anak laki-laki dalam panti 308 orang dan perempuan 283 orang.

BAB. IX

PENUTUP

9.1 SIMPULAN

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa simpulan yang dapat diambil dari seluruh uraian di atas. Jika dilihat dari realitas data yang tersaji pada masing-masing indikator, secara umum tampak bahwa di Kota Denpasar terjadi kesenjangan gender pada beberapa aspek pembangunan. Isu gender yang masih cukup menonjol antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, di bidang pendidikan isu gender yang masih cukup menonjol tampak pada indikator; angka partisipasi murni (APM), terutama APM siswa laki-laki dan perempuan pada jenjang pendidikan SMP (55,8: 104,8). Sementara pada jenjang pendidikan SD dan SMA hampir setara antara laki-laki dan perempuan. Sementara pada indikator angka partisipasi kasar (APK) disparitas gender paling menonjol terjadi pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Isu gender pada indikator pendidikan yang masih cukup menonjol adalah pada keberadaan guru terutama guru SD dan SMA. Guru SD didominasi oleh perempuan, sementara guru SMA didominasi oleh laki-laki.

Kedua, di bidang kesehatan, tampak pemberian ASI eksklusif yang masih relatif rendah, belum mencapai angka 100%. Sementara isu gender tampak terjadi pada beberapa indikator lainnya yakni pada peserta KB, jumlah dokter umum dan dokter gigi yang masih didominasi oleh perempuan. Sementara dokter spesialis didominasi oleh laki-laki. Kepemilikan akta kelahiran juga masih menjadi isu menarik karena belum semua anak memiliki akta kelahiran.

Ketiga, di bidang ekonomi nampak terjadi kesenjangan gender pada pekerjaan seperti sebagai petugas parkir, petugas kebersihan, pegawai fitness dan karyawan hotel yang masih didominasi oleh laki-laki. Sementara pekerja salon, rumah makan dan restoran didominasi oleh perempuan.

Keempat, di sektor publik, kesenjangan gender tampak terjadi di bidang politik, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Di legislatif tampak dari keanggotaan DPRD yang didominasi oleh laki-laki. Di eksekutif tampak dari jumlah PNS terutama dalam eselonisasi masih terjadi kesenjangan yang

sangat menjolok. Di kelompok yudikatif, kesenjangan tampak pada keberadaan jaksa, hakim, notaris dan advokat yang masih didominasi oleh laki-laki.

Kelima, dalam hal lain tampak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang lebih banyak menjadi korban adalah perempuan, demikian juga persoalan gepeng sampai saat ini masih belum bisa diatasi. Sebagian besar penggepeng adalah perempuan ibu rumah tangga dan anak-anaknya.

9.2 Rekomendasi

Atas dasar simpulan tersebut di atas, maka diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi permasalahan gender yang masih terjadi di Kota Denpasar maka penting dilakukan sosialisasi gender secara kontinu dengan sasaran masyarakat secara keseluruhan. Untuk mempercepat terwujudnya KKG maka perlu pengimplementasian strategi pengarusutamaan gender (PUG) melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang responsif gender di segala bidang.
2. Untuk meningkatkan persentase pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar, maka sangat penting adanya penyediaan pojok laktasi di setiap tempat kerja yang melibatkan tenaga kerja perempuan.
3. Penting digalakkan sosialisasi pemakaian alat kontrasepsi untuk KB pria sehingga sasaran dari program KB tidak didominasi oleh kaum perempuan.
4. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, penting dilakukan pendidikan politik bagi kaum perempuan, baik melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun partai politik yang ada di Kota Denpasar.
5. Untuk dapat mendeteksi isu-isu gender secara kontinyu di Kota Denpasar, maka penyusunan statistik dan analisis gender perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dalam proses penyusunan statistik dan analisis gender Kota Denpasar Tahun 2017 ini, sangat dirasakan hambatan pada ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin pada indikator-indikator gender yang diperlukan. Oleh karena itu disarankan kepada

setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) senantiasa menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin.

6. Untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kota Denpasar, maka isu-isu gender yang muncul dalam buku statistik gender ini perlu ditindaklanjuti oleh setiap SKPD dengan melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan yang dapat mengatasi isu-isu atau permasalahan gender yang terjadi. Untuk itu penting bagi setiap SKPD untuk menyusun program yang dilandasi kondisi riil sehingga program yang disusun tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arjani, dkk. 2005. "Profil Gender Bidang Pendidikan Provinsi Bali." (laporan penelitian). Denpasar: Pusat Studi Wanita UNUD.
- Atmadja, Nengah Bawa, Astiti, TIP., Arjani, Ni Luh dan Sudarta, I Wayan, 2009. *Gender dalam Perspektif Budaya Bali*. Denpasar: Swasta Nulus
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Denpasar Dalam Angka*. Denpasar: Bappeda.
- Bachtiar, Harsja W. 1977. "Pengamatan sebagai suatu Metode Penelitian" dalam *Koentjaraningrat* (ed.). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bhasin, K. 1996. *Menggugat Patriarkhi, Pengantar Tentang persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan* (Nug Kantjasungkana, penterjemah). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Eja Yuarsi, Susi. 1997. "Wanita dan Akar Kultural Ketimpangan Gender" dalam Irwan Abdullah (ed.). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansur. 1966. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidz, Wardah. 1995. "Pola Relasi Gender dan Permasalahannya" paper disampaikan pada diskusi Gender Suatu Tinjauan Multidimensi. Yogyakarta. 29 April.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Surya Dharma (ed.). Malang: UMM Press.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2005. "Panduan dan Bunga Rampai Pembelajaran Pengarusutamaan Gender". Jakarta: KPP, BKKBN dan UNFPA.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.